



# GEOGRAFI BUDAYA DAERAH RIAU



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Dep. P dan K  
Tidak diperdagangkan.

# GEOGRAFI BUDAYA DAERAH RIAU

MILIK KEPUSTAKAAN  
DIREKTORAT TRADISI  
DITJEN NBSF DEPBUDPAR



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI  
KEBUDAYAAN DAERAH  
JAKARTA 1983.

PERPUSTAKAAN  
DIT. TRADISI DAN BUDAYA  
DEPBUDPAR

NO. INV : 3658  
PEROLEHAN :  
TGL : 25-11-'09  
SANDI PUSTAKA :

## PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Geografi Budaya Daerah Riau Tahun 1977/1978.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. U.U. Hamidy, H. Nahar Effendy, BA, Drs. Nurdin Mahmud, Drs. Abu Bakar Sulaiman, Syahdanur, BA, Selamat. K. dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Prof. Dr. Sudjiran R, Drs. Djenen Msc, Drs. P. Wayong, Dra. Mc. Soeprapti.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, September 1983

Pemimpin Proyek,



**Drs. H. Bambang Suwondo**

**NIP. 130 117 589**

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1977/1978 telah berhasil menyusun naskah Geografi Budaya Daerah Riau.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, September 1983

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.

# DAFTAR ISI

## Halaman

PENGANTAR .....	III
KATA SAMBUTAN .....	V
DAFTAR ISI .....	VII
DAFTAR TABEL .....	IX
DAFTAR PETA .....	XV
PENDAHULUAN .....	I
<b>BAB I. SUMBER DAYA ALAM</b>	
A. Lokasi .....	3
B. Geologi .....	3
C. Iklim .....	5
D. Topografi .....	10
E. Tanah .....	12
F. Vegetasi dan Dunia Hewan .....	15
G. Sungai, Danau, dan Rawa .....	17
<b>BAB II. SUMBER DAYA MANUSIA</b>	
A. Jumlah Penduduk .....	20
B. Komposisi Penduduk .....	22
C. Perkembangan Penduduk .....	40
D. Migrasi .....	44
E. Pendidikan .....	54
F. Kebudayaan .....	62
G. Kesejahteraan dan Kesehatan .....	63
H. Agama dan Kepercayaan .....	70
<b>BAB III. SISTEM SOSIAL BUDAYA</b>	
A. Pertanian Rakyat .....	73
B. Perkebunan .....	77
C. Pertambangan .....	79
D. Perhutanan .....	83
E. Peternakan .....	85
F. Perikanan .....	90
G. Perindustrian .....	101
H. Perhubungan .....	107
I. Perdagangan .....	118

#### **BAB IV. WILAYAH-WILAYAH PEMBANGUNAN DALAM PROPINSI RIAU**

A.	Pendahuluan . . . . .	128
B.	Regionalisasi Daerah Propinsi Riau . . . . .	130
C.	Satuan Wilayah Pengembangan 1 . . . . .	134
D.	Satuan Wilayah Pengembangan 2 . . . . .	138
E.	Satuan Wilayah Pengembangan 3 . . . . .	141
F.	Satuan Wilayah Pengembangan 4 . . . . .	144
G.	Satuan Wilayah Pengembangan 5 . . . . .	146
H.	Satuan Wilayah Pengembangan 6 . . . . .	150
I.	Satuan Wilayah Pengembangan 7 . . . . .	153
J.	Satuan Wilayah Pengembangan 8 . . . . .	155
K.	Satuan Wilayah Pengembangan 9 . . . . .	157
L.	Satuan Wilayah Pengembangan 10 . . . . .	161
M.	Satuan Wilayah Pengembangan 11 . . . . .	163
N.	Satuan Wilayah Pengembangan 12 . . . . .	165
O.	Satuan Wilayah Pengembangan 13 . . . . .	167
P.	Satuan Wilayah Pengembangan 14 . . . . .	168
Q.	Satuan Wilayah Pengembangan 15 . . . . .	172
R.	Satuan Wilayah Pengembangan 16 . . . . .	174
S.	Satuan Wilayah Pengembangan 17 . . . . .	177
T.	Pembangunan Prasarana Ekonomi . . . . .	180
U.	Sebab dan Latar Belakang Pemilihan Wilayah Pembangunan Dalam Daerah Riau . . . . .	188
	Daftar Informan . . . . .	193
	Daftar Bacaan . . . . .	194

## DAFTAR TABEL

1. Tabel I. 1. Keadaan cuaca di Propinsi Riau hasil pengamatan iklim di P.U. Pekanbaru 1961 – 1965.
2. Tabel I. 2. Catatan curah hujan dari stasiun-stasiun penakar hujan dalam propinsi Riau.
3. Tabel I. 3. Luas Wilayah Ketinggian di Riau Daratan.
4. Tabel I. 4. Luas penyebaran jenis-jenis tanah di daerah.
5. Tabel I. 5. Daftar nama jenis kayu komersil yang terdapat di daerah Riau Daratan.
6. Tabel II. 1. Banyaknya WNA Cina di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Riau dibandingkan dengan WNA Propinsi Riau dari tahun 1971 – 1976.
7. Tabel II. 2. Perbandingan prosentase WNA di Propinsi Riau dengan WNA Cina tahun 1971 – 1976.
8. Tabel II. 3. Pertambahan penduduk dan kepadatan dalam kota madya Pekanbaru tahun 1970 – 1976.
9. Tabel II. 4. Banyaknya penduduk dalam Propinsi Riau diperinci menurut jenis kelamin dan umur, tahun 1971 – 1976.
10. Tabel II. 5. Selisih jumlah lelaki dan perempuan di Propinsi Riau tahun 1971 – 1976.
11. Tabel II. 6. Penduduk Propinsi Riau menurut umur dan jenis kelamin dalam tahun 1971.
12. Tabel II. 7. Perbandingan besar kecilnya jumlah penduduk yang bekerja dalam 5 macam lapangan pekerjaan di daerah kota dan pedesaan dalam Propinsi Riau tahun 1971.
13. Tabel II. 8. Banyaknya pegawai Negeri pusat di Propinsi Riau per lembaga negara non Departemen akhir tahun 1976.
14. Tabel II. 9. Penduduk berumur 10 tahun ke atas diperinci menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja dalam kabupaten/Kodya di Propinsi Riau tahun 1971.
15. Tabel II. 10. Penduduk yang mencari pekerjaan menurut kabupaten/Kodya Lapangan pekerjaan dalam Propinsi Riau tahun 1971.

16. Tabel II. 11. Jumlah penduduk Propinsi Riau tahun 1961 – 1971 menurut daerah tingkat II.
17. Tabel II. 12. Jumlah penempatan Transmigrasi di daerah Propinsi Riau tahun 1962 – 1976.
18. Tabel II. 13. Jumlah suku Melayu dalam kecamatan Bintang Selatan dan kota Tanjung Pinang dalam tahun 1976.
19. Tabel II. 14. Banyaknya masyarakat terasing dalam Propinsi Riau tahun 1976.
20. Tabel II. 15. Banyaknya murid dan guru pada S.D. SLTP dan SLTA dalam Propinsi Riau tahun 1976.
21. Tabel II. 16. Perbandingan dan Keadaan mengenai beberapa aspek pendidikan dasar di daerah Riau catatan tahun 1976.
22. Tabel II. 17. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam komposisi mahasiswa Universitas Riau tahun 1976.
23. Tabel II. 18. Banyaknya mahasiswa IAIN Sisqa tahun 1976.
24. Tabel II. 19. Banyaknya mahasiswa Islam Riau tahun 1976.
25. Tabel II. 20. Banyaknya mahasiswa dalam tiga Perguruan Tinggi dalam daerah Propinsi Riau menurut jenis kelamin 1976.
26. Tabel II, 21. Penduduk usia sekolah dalam Propinsi Riau diperinci menurut tingkat pendidikan dan umur tahun 1975 – 1977.
27. Tabel II. 22. Beberapa organisasi kesenian yang dapat dicatat di daerah Riau tahun 1977.
28. Tabel II. 23. Keadaan sarana kesehatan dalam tiap daerah tingkat I Riau tahun 1969 – 1974.
29. Tabel II. 24. Banyaknya sarana kesehatan tiap daerah tingkat II dalam Propinsi Riau keadaan tahun 1975.
30. Tabel II. 25. Banyaknya dokter dan para medis dalam daerah tingkat I tahun 1974 – 1975.
31. Tabel II. 26. Penyebaran dokter dan para medis dalam daerah tingkat II se Propinsi Riau tahun 1975.
32. Tabel II. 27. Rasio dokter dan para medis terhadap penduduk dalam daerah tingkat I Riau, keadaan tahun 1975.
33. Tabel II. 28. Banyaknya penderita penyakit menular tiap

- daerah tingkat II dalam Propinsi Riau tahun 1976.
34. Tabel II. 29. Banyaknya penduduk yang menderita dan meninggal oleh kolera dalam tiap daerah tingkat II dalam Propinsi Riau tahun 1975 – 1976.
  35. Tabel II. 30 Penganut agama dan rumah ibadah dalam Propinsi Riau, keadaan tahun 1975.
  36. Tabel III. 1 Produksi pertanian tahun 1971.
  37. Tabel III. 2. Jenis/luas/produksi tanaman perkebunan rakyat di Propinsi Riau tahun 1970.
  38. Tabel III. 3 Volume produksi minyak bumi serta nilai (sementara) dalam US Dollar yang dihasilkan propinsi Riau 1968 – 1971.
  39. Tabel III. 4 Volume ekspor dan nilai dalam US dollar dari Boksit yang dihasilkan Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.
  40. Tabel III. 5 Jumlah produksi (volume ekspor) serta nilai-nilai ekspor timah di kabupaten Kepulauan Riau tahun 1968 – 1972.
  41. Tabel III. 6 Produksi log (kayu bulat) daerah tingkat I Riau tahun 1969 – 1974.
  42. Tabel III. 7 Jumlah ternak sapi dalam Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.
  43. Tabel III. 8 Jumlah ternak kerbau dalam Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.
  44. Tabel III. 9 Jumlah ternak kambing dalam Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.
  45. Tabel III. 10 Jumlah ternak babi dalam Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.
  46. Tabel III. 11 Jumlah pemasukan ternak Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.
  47. Tabel III. 12 Jumlah ternak dalam Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.
  48. Tabel III. 13 Perkembangan ayam Ras di Propinsi Riau tahun 1976 – 1971.
  49. Tabel III. 14 Letak dan jumlah desa nelayan di Propinsi Riau.
  50. Tabel III. 15 Keadaan penduduk di kabupaten yang berbatasan dengan laut.
  51. Tabel III. 16 Keadaan pendapatan dan pengeluaran rumah

- tangga nelayan 1970.
52. Tabel III. 17 Perahu dan alat penangkapan rumah tangga nelayan tahun 1970.
  53. Tabel III. 18 Hasil penangkapan dalam bulanan dan rata-rata rumah tangga nelayan tahun 1970.
  54. Tabel III. 19 Pemasaran hasil tangkapan dari rumah tangga nelayan di Riau tahun 1970.
  55. Tabel III. 20 Keadaan rumah tangga nelayan di daerah Riau tahun 1970.
  56. Tabel III. 21 Produksi ikan basah dan kering (dalam ton) tahun 1967 – 1972.
  57. Tabel III. 22 Kegiatan perdagangan ikan tahun 1967 – 1972.
  58. Tabel III. 23 Perkembangan perusahaan/perindustrian lemonade dan produksi di Propinsi Riau.
  59. Tabel III. 24 Perkembangan perusahaan dan produksi ikan asin/teri di Propinsi Riau.
  60. Tabel III. 25 Perkembangan perusahaan dan produksi batubata di Propinsi Riau.
  61. Tabel III. 26 Perkembangan dan produksi pembuatan kapal kayu di Propinsi Riau.
  62. Tabel III. 27 Perkembangan perusahaan/produksi pemakaian kopra pada perindustrian minyak kelapa di Riau.
  63. Tabel III. 28 Perkembangan perusahaan dan jumlah produksi penggergajian kayu di Propinsi Riau.
  64. Tabel III. 29 Perkembangan perusahaan/industri percetakan di Propinsi Riau.
  65. Tabel III. 30 Banyaknya pesawat tilpon yang terpasang di Propinsi Riau.
  66. Tabel III. 31 Jumlah tilpon yang dipakai langganan tahun 1972.
  67. Tabel III. 32 Jumlah wisatawan asing yang datang/berangkat di Propinsi Riau tahun 1969 – 1974.
  68. Tabel III. 33 Daftar travel Biro yang ada di Propinsi Riau.
  69. Tabel III. 34. Volume perdagangan antar pulau, barang-barang daerah pengawasan di Dati I Riau tahun 1975 – 1976.
  70. Tabel III. 35 Volume perdagangan antar pulau kopra dari daerah Riau menurut pelabuhan asal dan daerah pemasaran tahun 1976 (ton).

71. Tabel III. 36 Volume perdagangan antar pulau, minyak kelapa di daerah Riau menurut pelabuhan asal dan daerah pemasaran 1976 (ton).
72. Tabel III. 37 Angka-angka ekspor minyak bumi daerah Riau (berdasarkan E3 yang diterima) tahun 1975 – 1976.
73. Tabel III. 38 Angka-angka ekspor minyak bumi daerah Riau menurut pelabuhan tujuan tahun 1975 – 1976.
74. Tabel III. 39 Volume ekspor menurut komoditi (dalam ribuan).
75. Tabel III. 40 Nilai ekspor menurut komoditi (dalam ribuan US Dollar).
76. Tabel IV. 1 Jumlah dan laju rata-rata tahun pertambahan penduduk serta luas wilayah satuan wilayah pengembangan I.
77. Tabel III. 41 Nilai ekspor daerah Riau menurut Negara tujuan (dalam ribuan US Dollar).
78. Tabel IV. 2 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayah satuan wilayah pengembangan.
79. Tabel IV. 3 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah satuan pengembangan – 3.
80. Tabel IV. 4 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayah satuan wilayah pengembangan – 4.
81. Tabel IV. 5 Jumlah dan laju rata-rata tahun pertambahan penduduk serta luas wilayah SWP – 5.
82. Tabel IV. 6 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayah SWP – 6.
83. Tabel IV. 7 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayah SWP – 7.
84. Tabel IV. 8 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayah SWP – 8.
85. Tabel IV. 9 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayah SWP – 9.
86. Tabel IV. 10 Jarak antara Tanjungpinang dengan sentra-sentra wilayah dalam DP-W dan dengan sentral Utama I, II dan III.

87. Tabel IV. 11 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayah SWP – 10.
88. Tabel IV. 12 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayah SWP – 11.
89. Tabel IV. 13 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah SWP – 13.
90. Tabel IV. 14 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah SWP – 13.
91. Tabel IV. 15 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah SWP – 14.
92. Tabel IV. 16 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah SWP – 15.
93. Tabel IV. 17 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah SWP – 16.
94. Tabel IV. 18 Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayah SWP – 17.
95. Tabel IV. 19 Kapasitas pelabuhan sungai dan pantai Propinsi Riau.
96. Tabel IV. 20 Nama-nama sub sentra wilayah daerah pembangunan III.
-

## DAFTAR PETA

	Halaman
1. Peta 1	Peta Propinsi Riau .....197
2. Peta 2	Peta Curah Hujan .....199
3. Peta 3	Peta Penyebaran Stasiun Curah hujan .....201
4. Peta 4	Peta Propinsi Riau, Wilayah Ketinggian .....203
5. Peta 5	Peta Tanah Eksplorasi .....205
6. Peta 6	Peta Daerah Aliran Sungai .....207
7. Peta 7	Peta Nama-nama Sungai .....209
8. Peta 8	Peta Pusat-pusat Pembangunan Propinsi Riau ...211
9. Peta 9	Peta Lokasi Proyek-Proyek Utama Propinsi Riau .113

-----

## PENDAHULUAN

Jika geografi budaya dipandang sebagai inter-relasi antara manusia dengan tempat tinggalnya dalam suatu sistim keruangan, maka mempelajari dan menyusun suatu geografi budaya dari suatu daerah melibatkan banyak faktor. Tapi secara sederhana dapatlah masalah itu diamati melalui tiga faktor penting; yaitu sumber daya manusia, serta sistem kehidupan sosial budaya. Dengan kerangka masalah yang demikian, maka jelas bahwa uraian mengenai geografi budaya suatu daerah meliputi aspek material dan non material. Aspek materialnya merupakan komponen manusia dengan tempat tinggalnya, sedangkan aspek non materialnya merupakan inter-relasi manusia dengan tempat tinggalnya, yang secara sederhana disebut komponen kebudayaannya. Meskipun dalam pengamatan dan penelitian itu telah dicoba menempuh berbagai jalan atau metode yang mungkin dapat menolong, namun haruslah diakui bahwa jangkauan yang jauh, belumlah dapat dicapai. Dengan berbagai segi keterbatasan, maka Penelitian mengenai geografi budaya daerah Riau ini, sebagian besar memakai data sekunder, yaitu data yang dapat diperoleh dalam berbagai instansi yang dipandang dapat dipercayai memberikan data tentang berbagai aspek geografi budaya di daerah ini. Banyak mengalami hambatan dalam penganalisaan data karena data banyak yang tidak lengkap, kita mendapatkan data yang tidak seragam, sedangkan kita sangat tidak mungkin mengadakan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Karena itulah pemakaian data sekunder itu dirasa amat perlu, dibantu dengan berbagai wawancara, memeriksa berbagai laporan, serta membaca beberapa tulisan yang nampaknya dapat membantu untuk memperjernih beberapa masalah.

Tapi hendaklah dipertimbangkan, bahwa penyusunan dan pengumpulan data mengenai geografi budaya daerah Riau, tidaklah dapat dipandang sebagai suatu usaha yang mudah. Daerah Propinsi Riau dengan luas wilayah 94.561,61 kilometer persegi atau sekitar 9.456,161 hektar, yang terdiri dari 6 daerah tingkat dua, dengan 67 kecamatan dan 873 desa, yang meliputi 3.214 buah pulau, bukanlah suatu daerah yang dengan mudah dapat diamati keadaan geografi budayanya. Uraian mengenai geografi budaya daerah Riau ini bertujuan sedemikian jauh mengamati dan mempelajari melalui berbagai sumber yang dapat dikumpulkan,

bagai segi keterbatasan, maka penelitian mengenai geografi budaya sosial budaya, telah dicoba didekati sedemikian rupa melalui berbagai sumber, dengan maksud dapat memperoleh suatu gambaran atau deskripsi tentang geografi budaya daerah ini. Kita akan menjumpai betapa deskripsi itu, bukanlah sekedar suatu lukisan alam dengan manusia dan kebudayaannya saja, tetapi juga meliputi berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi manusia. Baik dalam kesulitannya mempertahankan daya hidupnya, maupun dalam kesulitannya mempertahankan serta mengembangkan kemampuan budayanya. Alamnya sendiripun tidak luput mempunyai berbagai masalah, seperti masalah makin hilangnya faktor kelestarian, yang di satu pihak tampaknya disebabkan oleh faktor manusia dengan kebudayaannya, tapi di pihak lain tentulah juga oleh faktor alam itu sendiri dengan sifat-sifatnya.

Dengan demikian jelaslah, bahwa bagaimanapun uraian ini sudah dikerjakan, namun tidaklah luput dari berbagai kesulitan, yang tidak akan dapat diperlihatkannya secara keseluruhan.

Karena itu haruslah dicatat, bahwa uraian ini hendaklah diamati jauh lebih seksama, sehingga berbagai kelemahannya, laporan dari hasil penelitian ini diperinci dalam Bab I berisi uraian mengenai sumber daya alam, meliputi lokasi, geologi, iklim topografi, keadaan tanah, vegetasi, dunia hewan, sungai, danau dan rawa, Bab II, uraian mengenai sumber daya manusia, Bab III, uraian mengenai sistem sosial budaya penduduk, pada Bab IV diuraikan mengenai wilayah-wilayah pembangunan dalam Propinsi Riau.

# BAB I

## SUMBER DAYA ALAM

### A. LOKASI

Berdasarkan pada letak astronomi, propinsi Riau terletak di antara garis lintang  $2^{\circ} - 25'$  L.U. sampai  $1^{\circ} - 5'$  L.U. dan di antara B.T. sampai  $109^{\circ}$  B.T. Berdasarkan pada letak geologinya Propinsi Riau dibedakan menjadi 2 (dua) daerah Propinsi geologi yang mempunyai sifat berbeda yaitu Riau Daratan dan Riau Kepulauan.

Riau Daratan terletak pada cekungan pengendapan Sumatera Tengah. Riau Kepulauan merupakan bagian dari Paparan Sunda. Propinsi Riau mempunyai luas  $94.568 \text{ km}^2$ , terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kotamadya, terdiri dari 67 kecamatan meliputi 873 desa. Propinsi Riau sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara, sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat, sebelah Timur berbatasan dengan selat Malaka, selat Singapura, laut Cina Selatan dan sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi.

Propinsi Riau dialiri oleh 4 (empat) sungai besar, yaitu sungai Rokan di sebelah Utara, sungai Siak dan sungai Batang Kampar di bagian tengah dan sungai Batang Kuantan di bagian Selatan (lihat peta 2). Luas perairan laut  $176.530 \text{ km}^2$ . Dengan daerah yang terdiri dari daratan dan kepulauan, membentang dari lereng Bukit Barisan sampai laut Cinta Selatan, daerah ini memiliki sumber alam yang meyakinkan antara lain bahan-bahan minteral, kayu-kayu hutan, hasil-hasil hutan yang mengandung pelbagai jenis ikan yang seluruhnya merupakan bahan ekspor.

### B. GEOLOGI

Riau Daratan terletak pada cekungan pengendapan Sumatera Tengah (Centra Sumatera Sedimentang Basin). Endapan tersebut telah menjadi lapisan sedimen yang beribu-ribu meter tebalnya. Sedimen tersebut kemudian terangkat, terlipat kemudian mengalami patahan di beberapa tempat membentuk antiklinal dan sinklinal dengan sumbu-sumbu yang pada umumnya mengarah Barat Laut dan Tenggara.

Pada struktur tersebut banyak terdapat cebakan-cebakan hidro-

karbon atau minyak bumi atau gas bumi. Di sebelah Timur terang Timur Bukit Barisan sampai ke pulau-pulau sepanjang pantai Timur tertutup oleh endapan alluvium. Beberapa singkatan (out-crop) yang terdapat di daerah Bukit Barisan menunjukkan umur lapisan batuan yang berkisar dari zaman tersier atau Permo-karbon (kira-kira 300 juta tahun yang lalu), tersier Bawah atau Paleogen (kira-kira 40 juta tahun yang lalu) sampai tersier Atas atau Miosen Pliosen (kira-kira 10 juta tahun yang lalu). Beberapa singkatan yang menunjukkan adanya instruksi batuan beku atau granit diketemukan di sekitar lubuk Bendahara dan pasir Pangaraian sumber-sumber mineral penting adalah minyak bumi, timah putih dan emas.

Riau Kepulauan adalah bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama paparan Sunda. Gugusan pulau-pulau yang terbesar merupakan sisa-sisa erosi daratan pra-tercier yang membentang dari Semenanjung Melayu di Utara sampai pulau-pulau Bangka dan Biliton di sebelah selatan. Batuan yang tersingkap kebanyakan merupakan batuan metamorf atau batuan beku yang berumur pra-tercier. Di bagian sebelah barat, termasuk pulau-pulau Kundur, Karimun, Batan, Lingga, Bintan dan Singkap secara geologis mempunyai susunan batuan yang serupa dengan batuan yang terdapat di Semenanjung Malaya, pulau Singapura dan pulau-pulau Bangka dan Biliton. Sedangkan di sebelah Timur, termasuk kepulauan Anambas, Nатура, Tambelan dan lain-lain yang agaknya mempunyai persamaan geologis dengan daerah Kalimantan Barat. Pengungkapan tentang daerah Laut Cina Selatan telah dimodifikasikan dengan adanya data dari geofisika dan pengeboran yang terbaru. Daerah yang luas ini dibagi atas Natura Barat dan Miri Seria basin. Basin-basin ini dipisahkan oleh Natura Ridge, yang terdiri dari batu-batuan yang sama dengan Singkapan di Natura Besar dan pulau-pulau sekitarnya. Batuan-batuan ini merupakan batu pasir Natura, yang umurnya tergolong dalam formasi Lower Cretaceous Eocene (plateau batu pasir di Serawak). Dari Paparan Sunda dan Natura Ridge, dasar Pra-Tersier berangsur-angsur melandai semakin dalam ke arah Utara di bawah Laut Cina Selatan. Diperkirakan umurnya tergolong Miosen. Akan tetapi data dari pengeboran-pengeboran lepas pantai di Malaysia menunjukkan umur yang tergolong Eosen. Pada umumnya jalur Eosen Pliosen terdiri lapisan-lapisan batu pasir dan tanah yang tebalnya tak ter-

atur, tergantung dari lokasinya di dalam basin. Kebanyakan dari struktur-struktur tersebut, di mana arahnya timur barat dan timur laut – barat daya adalah sangat kompleks dan sangat berpatah-patahan.

Basin Natura Barat berjalur dua :

1. Zone Barat yang stabil dengan mantel tersier yang tidak berubah;
2. Zone Timur yang berubah bentuknya karena gerakan tektonis. Sebagian besar potensi hidrokarbon banyak terdapat di formasi Miosen-Seria Atas dan sebelah bawah formasi dimaksud. Hal ini dibuktikan dengan diketemukannya sumur Lumandang (Conoco) 100 mil sebelah timur pulau Natura Besar, yang meledak pada bulan September 1970. Pada tahun 1972 AGIB (Aziende Generale Italiana Petroli Societe) telah menemukan juga sumur AI-IX gas dengan kapasitas 9,2 juta cubic feet per hari dari batu pasir tersier dari kedalaman 5.158 – 5.183 kaki.

## C IKLIM

### 1. Suhu.

Suhu pada bulan terdingin lebih dari  $18^{\circ}\text{C}$  curah hujan bulanan rata-rata lebih dari 60 mm dan suhu utara pada bulan terpanas lebih dari  $22^{\circ}\text{C}$ , kadang-kadang suhu maksimum mencapai  $30,7^{\circ}\text{C}$  (tabel I.1.).

Temperatur udara siang hari pada umumnya tinggi mencapai  $30,7^{\circ}\text{C}$ , sedangkan temperatur malam hari sedang. Tingginya temperatur pada siang hari menyebabkan rendahnya kelembaban udara di permukaan tanah.

### 2. Tekanan dan kelembaban udara.

Daerah ini dipengaruhi angin musim. Musim hujan pada bulan-bulan September sampai dengan bertiup angin Barat Laut dan Barat Daya dengan kecepatan rata-rata 5 – 7 knots. Musim kemarau pada bulan Maret – Agustus bertiup angin Timur Laut dan Tenggara dengan kecepatan 5 knots. Kadang-kadang kecepatannya mencapai 10 – 15 knots. Pada musim penghujan kelembaban udara maksimum berkisar antara % – 86%, dengan kelembaban minimum berkisar antara 65% – 68% (tabel I.2).

**Tabel I.1. Keadaan cuaca di propinsi Riau hasil pengamatan iklim DI-P.U.  
Pekan Baru periode 1961 – 1965.**

B U L A N	TEMPERATUR UDARA DALAM CELCIUS			KELEMBABAN RELATIF PROSES			ANGIN ARAH Kecepatan (knots)		HUJAN mm
	Maks.	Rata2	Min.	Maks.	Rata2	Min.			
Januari	28,9	25,5	22,9	92	85	69	S	05	265
Pebruari	29,7	25,8	23,4	92	86	68	S	04	207
M a r e t	31,0	26,2	23,4	94	86	67	SE	04	275
A p r i l	31,3	26,9	24,0	93	86	65	S	04	240
M e i	31,8	27,1	24,0	92	85	66	S	04	206
J u n i	30,3	26,7	23,3	92	83	64	S	04	125
J u l i	31,1	26,2	22,4	93	84	64	SE	05	128
Agustus	30,7	25,6	22,2	92	82	63	SE	05	210
September	30,6	25,7	22,3	93	84	65	S	05	224
Oktober	31,0	25,8	22,7	93	86	68	S	04	284
Nopember	30,5	26,1	22,4	92	85	67	SE	04	371
Desember	29,4	25,6	22,9	92	85	67	S	04	329
T a h u n	30,7	26,1	22,9	93	83	65	S	04	2.870

Sumber : Direktorat Meteorologi dan Geofisik, Jakarta.

### 3. Curah hujan (peta 2 dan peta 3).

Pengaruh angin musim tidak begitu besar seperti terlihat dari arah angin. Sehingga perbedaan curah hujan pada musim kemarau dan musim hujan, kurang jelas. Sepanjang tahun hujan turun dan mencapai puncaknya pada bulan Nopember, sehingga berdasarkan perbandingan jumlah bulan-bulan kering dan basah, menurut Schmidt dan Ferguson (1951) hampir seluruh daerah Riau termasuk tipe iklim A.

Data hujan di beberapa stasion di daerah Riau menunjukkan curah hujan yang tinggi. Curah hujan terendah terdapat di Rengat (2093 mm/tahun), yang tertinggi terdapat di Pasir Pangaraian (3077 mm/tahun). Hari hujan berkisar antara 127 – 181.

Menurut Schmidt; Ferguson (1951) hampir seluruh daerah curah hujannya tipe A; nilai Q berkisar antara 3,7% (Sukajadi) sampai 10,1% (Bagan Siapi-api). Hanya di sekitar Rengat hujan tergolong tipe B dengan nilai Q sebesar 18,1% (tabel I.2.).

Menurut Boerema (1929) daerah Riau dapat dibedakan dalam 6 tipe hujan, yaitu tipe-tipe : 28, 29, 30, 31, 32 dan 33.

Tipe 28 : Pada bulan Desember, Januari dan Februari bertiup angin musim Timur Laut yang mendatangkan hujan. Hujan maksimum jatuh pada bulan Januari dan April. Minimum terjadi pada bulan Juli.

Tipe 29 : Pengaruh angin musim Timur Laut kurang besar di daerah ini. Hujan terutama jatuh pada waktu perubahan arah angin musim. Maksimum hujan terjadi 2 kali : Nopember merupakan maksimum primer dan April merupakan maksimum sekunder. Bulan-bulan Juni dan Juli mempunyai hujan terendah. Maksimum sekunder terjadi bulan Pebruari.

Tipe 30 : Pengaruh angin musim semakin tampak. Maksimum hujan pada bulan Nopember dan April yang disebabkan oleh perubahan angin musim, melebihi hujan yang disebabkan oleh angin musim pada bulan Desember, Januari dan Pebruari. Minimum hujan pada bulan Juli.

Tipe 31 : Pada bulan Desember, Januari dan Pebruari bertiup

Tabel I : 2. Catatan curah hujan dari stasiun-stasiun  
Penakar hujan di Daerah Propinsi Riau

No.	Stasiun	Ketinggian Meter	Jumlah tahun penga- matan	Jumlah rata- rata	Bulan Maks	Kering frek- vensi	Jumlah rata- rata	Bulan Maks	Basah frek- vensi	Schmids Ferg		Kop pen	Rata-rata tahun penga- matan
										11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58.	Bangkinang	40	20	0,5	1	1	11,2	12	7	4,4	A	Afa	3.11
65.	R u m b a i	160	18	0,9	3	9	9,1	12	2	9,8	A	Afa	2.50
150.	Bagan Siapi-api	—	29	1,0	5	1	9,9	12	4	10,1	A	Afa	2.71
151.	Tanah Putih	—	20	1,3	2	9	9,3	12	1	13,9	A	Afa	2.08
152.	Pasir Pengaraian	—	20	0,4	1	7	10,4	12	2	3,8	A	Afa	3.02
153.	Bengkalis	—	20	1,0	3	3	9,6	12	2	10,4	A	Afa	2.462
154.	Selat Panjang	2	20	0,6	3	1	9,6	12	2	6,2	A	Afa	2.395
155.	Siak Sri Indrapura	5	20	1,0	6	1	10,0	11	4	0,0	A	Afa	2.350
156.	Pekan Baru (Sukajadi)	10	20	0,4	3	1	10,8	12	6	3,7	A	Afa	2.708
157.	Pekanbaru	6	11	0,5	2	1	10,4	12	2	4,8	A	Afa	2.870
158.	T a l u k	30	20	0,8	2	5	10,4	12	3	7,6	A	Afa	2.720
159a.	Air Molek	30	13	0,2	1	3	10,2	12	1	1,9	A	Afa	2.604
159c.	Sei Sago Estate	17	17	0,6	1	10	10,2	12	3	5,8	A	Afa	2.581
160.	Rengat	20	19	1,4	5	1	7,7	11	1	18,1	B	Afa	2.121
161.	Kuala Gaung	—	20	1,2	6	1	9,2	11	3	13,0	A	Afa	2.758
162.	Sungai Guntung	—	20	0,6	2	2	9,4	12	4	6,3	A	Afa	2.342
163.	Tanjung Balai (Karimun)	—	20	1,1	4	1	9,5	12	2	11,5	A	Afa	2.124
164.	Pulau Buluh	—	20	0,8	3	2	10,1	12	1	7,9	A	Afa	2.006
165.	Pulau Bulang	1	18	0,3	2	2	10,9	12	8	2,7	A	Afa	3.611
166c.	Galang	10	13	0,5	2	1	10,9	12	2	4,5	A	Afa	3.077
166.	Tanjung Pinang	s.p.?.*)	20	0,5	2	3	11,1	12	8	4,5	A	Afa	3.119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166a.	Tanjung Berkait	—	10	1,3	3	2	9,6	12	2	13,5	A	Afa	2.322
167.	Numbing	30	20	0,8	22	5	10,5	12	5	7,6	A	Afa	2.658
168.	Tanjurt Jang	36	20	2,6	9	1	7,4	11	3	35,1	C	Afa	1.782
169.	P e n u b a	5	20	1,1	5	1	9,5	11	9	11,5	A	Afa	2.563
170.	R a j a h	30	20	0,2	2	1	01,6	12	11	1,8	A	Afa	4.092
171.	D a b o	—	20	0,4	3	1	10,9	12	7	3,6	A	Afa	2.818
172.	Pulau Kijang	—	20	1,0	4	1	9,4	12	1	10,6	A	Afa	2.152
167.	Terempa	4	20	1,6	4	3	8,4	11	4	19,0	B	Afa	2.512
168a.	Sedanau	5	20	1,8	7	1	8,2	11	3	21,9	B	Afa	2.343
169.	Serasan	s.p.l. *)	20	1,4	3	3	9,0	11	3	15,5	B	Afa	2.554

Keterangan : s.p.l. — setinggi permukaan laut.

Sumber data : "Verahndelingen No. 42", Jawatan Meteorologi dan Geofisika  
Kementerian Perhubungan, Jakarta 1951.

angin musim Timur Laut. Pengaruh angin musim ini kurang dari tipe 30. Hujan pada bulan Januari lebih kecil dari tipe 30, sedangkan kekurangan hujan pada bulan Pebruari lebih jelas. Maksimum hujan pada perobahan angin musim kedua masih lebih rendah dari pada hujan musim, sehingga Januari adalah bulan hujan maksimum. Maksimum sekunder karena perubahan angin musim pertama tetap terjadi pada bulan April. Maksimum primer terjadi bulan Juni dan Juli.

Tipe 32 : Sebagian besar daerah Riau Kepulauan tergolong tipe ini. Musim pertama terjadi pada bulan Pebruari dan kedua pada bulan Juli. Hujan agak merata sepanjang tahun. Terdapat tiga kali maksimum berturut-turut : Januari, April dan Nopember. Yang pertama disebabkan oleh angin musim Timur Laut, sedang yang kedua dan ketiga oleh perubahan angin musim. Tanjung Pinang dan Dabo curah hujan lebih tinggi dari pada rata-rata hujan tipe 32 ini.

Tipe 33 : Berbeda jelas dengan tipe 32, dimana hujan lebih tinggi dan variasinya lebih besar. Maksimum di bulan Januari, sedangkan maksimum peralihan jatuh pada bulan Nopember dan April. Minimum pada bulan Pebruari dan Juli.

#### **D. TOPOGRAFI**

##### **1. Dataran rendah dan tinggi.**

Apabila ditinjau dari letak-tingginya di atas permukaan laut, hampir 50% dari daerah Riau Daratan terletak pada ketinggian kurang dari 15 meter, yang terletak di sebelah Timur. Perimbangan luas wilayah ketinggian Riau Daratan, dimana 49,5% merupakan dataran rendah dapat dilihat pada tabel I.3.

**Tabel I.3. Luas wilayah ketinggian di Riau Daratan.**

No.	Ketinggian di atas permukaan laut meter	Luas Wilayah	
		Hektar *)	Persen
1.	Di bawah - 15	3.920.000	49,5
2.	Di atas 15 - 200	5.570.000	45,1
3.	Di atas 200 - 400	260.000	3,3
4.	Di atas 400	170.000	2,1
	<b>J u m l a h</b>	<b>7.930.000</b>	<b>100,0</b>

\*) angka dibulatkan

Apabila kita lihat di dalam peta, pada umumnya wilayah timur Riau Daratan secara keseluruhan disebutkan sebagai daerah rawa atau bencah. Bila dilihat di lapangan, kondisi sesungguhnya tidaklah demikian. Sepanjang aliran sungai-sungai pada umumnya terdapat jalur wilayah yang agak ketinggian, yaitu formasi tanggul-tanggul alami yang terbentuk karena proses pengendapan sedimen di sepanjang aliran sungai tersebut, yang dikenal dengan sebutan "tebing". Jalur wilayah ini relatif subur, sehingga penyebaran pemukiman penduduk umumnya mengikuti jalur ini. Lebar jalur ini tidak sama, berkisar antara 1 - 5 kilo meter dari tepi sungai. Di sana sini juga terdapat cekungan dan punggung-punggung (bukit) Cekungan tersebut merupakan tanah rawa atau bencah. Dataran rendah yang kering dan cukup luas terdapat di sekitar Kecamatan Pasir Pangarayan.

## 2. Kemiringan lereng.

Bagian tengah dari Riau Daratan merupakan wilayah yang bergelombang dengan lereng yang cukup curam, di mana punggungnya mencapai ketinggian sampai kira-kira 100 meter di atas permukaan laut. Lembah dari wilayah yang bergelombang ini merupakan rawa.

## 3. Pegunungan dan gunung.

Daerah berbukit terdapat di bagian barat sepanjang perbatasan

Riau dengan Sumatera Barat, merupakan bagian dari kaki pegunungan Bukit Barisan. Bukit-bukit di wilayah ini mempunyai lereng-lereng yang curam dan lembah-lembah yang sempit. Puncak tertinggi dari pegunungan ini ialah Gunung Jad (1.091 m). Di Daerah Riau Kepulauan, di gugusan pulau-pulau tanahnya berbukit-bukit. Rakyat mengenal beberapa gunung pada gugusan pulau-pulau, seperti Gunung Meral atau Gunung Karimun di pulau Karimun, Gunung Papan. Gunung Daik (+ 1.163 m), Gunung Tanda dan Gunung Sepican di pulau Lingga; Gunung Medang dan Gunung Lanjut di pulau Singkep. Gunung Bini di pulau Tambelan, Gunung Panjang di pulau Siantan dan Gunung Ranai di pulau Bunguran. Terkecuali Gunung Daik, pada umumnya yang dinamakan Gunung ini tidak mencapai ketinggian 1.000 meter.

#### **E. T A N A H** (lihat peta 5).

Menurut peta tanah Eksplorasi (Lembaga Penelitian Tanah, 1968) satuan tanah yang terdapat di daerah Propinsi Riau, dapat dibagi menurut letak topografinya sebagai berikut :

- 1. Di daerah dengan ketinggian di atas 400 meter dijumpai satuan-satuan tanah.**
  - a. Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol, yang berasal dari bahan induk batuan beku, endapan dan metamorf pada fisiografi pegunungan patahan.
  - b. Komplek Podsolik Merah Kuning dan Litosol dari bahan induk batuan beku pada fisiografi instruksi.
  
- 2. Di daerah dengan ketinggian antara 200 – 400 meter terdapat.**
  - a. Komplek Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol, yang berasal dari bahan induk batuan beku, endapan dan metamorf pada fisiografi pegunungan patahan;
  - b. Komplek Podsolik Merah Kuning dan Litosol dari bahan induk batuan beku pada fisiografi instruksi.
  - c. Podsolik Merah Kuning dari bahan induk batuan beku dan endapan pada fisiografi pegunungan lipatan.

- d. Podsolik Merah Kuning dari batuan endapan pada fisiografi dataran.
3. Di daerah dengan ketinggian antara 15 – 200 meter dijumpai satuan-satuan tanah.
    - a. Podsolik Merah Kuning dari bahan induk batuan beku pada fisiografi dataran.
    - b. Podsolik Merah Kuning dari bahan induk batuan beku dan endapan, pada fisiografi pegunungan lipatan.
    - c. Komplek Podsolik Merah Kuning dan Litosol, dari bahan induk batuan beku; pada fisiografi instruksi.
    - d. Podsolik Merah Kuning, dari bahan induk aluvial; pada fisiografi dataran.
    - e. Organosol dan Glei Humus; dari bahan induk aluvial; pada fisiografi dataran.
  4. Dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 15 meter umumnya didapati jenis-jenis tanah.

Organosol dan Glei Humus dari bahan induk aluvial pada fisiografi dataran.

Di daerah bagian barat, pada daerah yang berketinggian antara 12 – 200 meter sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning, baik di dataran maupun di daerah-daerah yang bergelombang. Makin ke sebelah barat di daerah yang berbatasan dengan Sumatera Barat pada ketinggian lebih dari 200 meter terdapat macam-macam tanah yang merupakan komplek antara jenis-jenis tanah Podsolik Merah Kuning Latosol dan Litosol berdasarkan pada peta tanah Eksplorasi dari lembaga Penelitian tanah tahun 1968, sesuai dengan tingkat ketelitian survey/kompilasi data yang masih bersifat eksploratif, maka dapat dibaca luas penyebab jenis tanah dalam perkiraan kasar (tabel I.4.).

**Tabel I.4. Luas Penyebaran jenis-jenis tanah di Wilayah Riau Daratan**

No.	Jenis tanah	Luas hektar	Penyebaran %
1.	Organosol dan Glei Humus	4.878.000	57,6
2.	Podsolik Merah Kuning	2.544.000	30,0
3.	Kompleks Podsolik Merah Kuning dan Litosol	490.000	5,8
4.	Kompleks Podsolik Merah Kuning, Latosol dan Litosol	237.000	2,8
5.	Kompleks Podsolik Coklat, Podsol dan Litosol	220.000	2,6
6.	L a t o s o l	96.000	1,2
J u m l a h		8.465.000	100,0

Lebih dari setengah luas wilayah Riau Daratan terdiri dari jenis tanah Organosol dan Glei Humus.

Jenis tanah *Organosol* sering disebut juga "tanah gambut", tanah sepek atau tanah rawang. Nilai tanah gambut untuk pertanian ditentukan oleh tebalnya lapisan gambut. Makin tebal lapisan gambut, semakin kurang baik arti tanah ini untuk pertanian. PH tanahnya sangat rendah, yaitu antara 3.55 – 3.77.

Di daerah Reteh (Indragiri Hilir), lapisan mineral di bawah gambut berwarna pucat kelabu. Di tempat-tempat dengan tebal bahan organik 100 – 200 cm, umumnya telah ditanami dengan kelapa, kopi, buah-buahan, karet dan tanaman tahunan lainnya.

Tanah-tanah gambut yang tebal bahan organiknya lebih dari 200 cm, praktis belum diolah, walaupun ada masih sangat kecil luasnya. Masalah yang dihadapi dalam usaha reklamasi tanah-tanah gambut dengan usaha mengadakan drainase, berakibat terjadinya pengerutan atau penurunan tanah (*subsidence*). Pengerutan ini terjadi karena berkurangnya kadar air tanah, sehingga terjadi oksidasi yang cepat dari bahan organik. Oleh sebab itu, pengaturan kedalaman air tanah yang dikehendaki harus diperhatikan, untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman, untuk

mengatur proses penurunan tanah dan untuk mencegah terjadinya irreversible drying dari bahan organik, pembentukan cat's clay, kebakaran serta erosi.

Tanah-tanah *Glei Humus* di daerah Riau terdapat dalam asosiasi dengan tanah-tanah Organosol. Pada jenis tanah ini terdapat keadaan drainase yang jelek dan lapisan bahan organik yang tipis (0 – 10 cm) sampai cukup tebal (30 – 110 cm). Sebagaimana halnya dengan Organosol, tanah *Glei Humus* peka pula terhadap peristiwa penurunan atau pengerutan tanah. Oleh sebab itu pengaturan tinggi muka air tanah perlu diperhatikan dalam usaha reklamasinya. Kesuburan kimia tanah-tanah *Glei Humus* termasuk sedang sampai tinggi, kecuali unsur kalium yang tidak jarang berlainan rendah. Tanah-tanah ini cukup baik untuk penanaman padi, palawija dan buah-buahan termasuk jeruk. Yang penting diperlukan adanya drainase supaya tanah tidak jenuh dengan air, yaitu dengan jalan menurunkan permukaan air tanah.

Tanah-tanah *Podsolik Merah Kuning* merupakan jenis tanah yang mempunyai penyebaran cukup luas di daerah Riau, kurang lebih 30%. Jenis tanah ini mempunyai selum yang agak tebal (1 – 2 meter). Derajat kemasannya antara masam hingga amat masam (pH H<sub>2</sub>O 3,5 – 5,0). Kadar unsur hara dari tanah ini rendah (N.P.K. dan Ca). Tanah-tanah ini peka terhadap erosi. Di daerah Propinsi Riau, jenis tanah *Podsolik Merah Kuning* umumnya merupakan hutan, kebun karet, perladangan atau padang alang-alang.

## F. VEGETASI DAN DUNIA HEWAN

### 1. Luas vegetasi

Luas kawasan hutan seluruhnya adalah 6,6 juta ha atau 70% dari luas propinsi berdasarkan pada struktur dan tempat tumbuhnya, areal hutan di Propinsi Riau ini dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Hutan pantai/hutan payau seluas kurang lebih 400.000 ha.
- b. Hutan rawa gambut (Peat swamp forat) seluas kurang lebih 3.500.000 ha.
- c. Hutan tanah kering atau pegunungan rendah kurang lebih seluas 2.000.000 ha.

d. Padang alang-alang dan hutan belukar yang telah mundur nilai ekonomi dan hydro-orologinya, kurang lebih seluas 600.00 ha.

## 2. Luas wilayah hutan cadangan dan hutan produksi.

Dari jumlah 6,6 juta ha hutan itu direncanakan 3,8 juta ha dipertahankan sebagai hutan tetap, 1 juta ha hutan lindung, 0,5 juta ha hutan pengawetan dan perlindungan alam, dan 2,3 juta ha hutan produksi. Sedangkan sisanya 2,8 juta sebagai hutan cadangan.

Selain dari berbagai jenis kayu, terdapat juga hasil hutan berupa rotan, damar dan getah, yang terkenal di kalangan rakyat bernama "sondoi". Kesemuanya ini merupakan mata pencaharian rakyat. Beberapa jenis kayu komersial yang terdapat di Riau tertera pada tabel I.5.

**Tabel I.5. Daftar Nama Jenis Kayu Komersial yang terdapat di Daerah Riau.**

No.	Nama Jenis Kayu, istilah		BD	Kelas Awet	Kelas Kuat	Penggunaan
	Daerah	Botanis				
1.	Balam	Payena spp	0,65	III-IV	II-III	Papan, peti
2.	Jelutung	Dyera spp	0,40	V	IV-V	Peti, kayu pahat
3.	Geronggang	Cratoxylon arborescens	0,55	IV	III-IV	Paper, peti
4.	G i a m	Cotylelobium spp	1,01	I	I	Kayu perkapalan
5.	K a p u r	Dryobalanops aramatica	0,76	II-III	II-I	Kayu konstruksi, papan, kayu perahu, peti.
6.	K a s a i	Pometia spp	0,72	III	II	Konstruksi di bawah atap
7.	Kempas	Koompassia melacaensis	0,96	III	-	Bantalan
8.	K u l i m	Scorocarpus	0,94	I	-	Papan, balok, lunas perahu.
9.	Medang	Litisia spp	0,60	II-IV	II-III	Balok, tiang, papan.
10.	Durian	Durio spp	0,65	IV-V	III-II	Peti, papan
11.	Merawan	Hopea spp	0,62	II-III	II-III	Balok, papan
12.	Meranti	Shorea ocuminata Dyer	0,51	IV-III	IV-III	Tripleks, perkakas, balok, konstruksi
13.	P u n a k	Tetramerata glabra	0,76	III-IV	-	Konstruksi di bawah atap.

Sumber : Dinas Kantor Kehutanan.

### 3. Dunia hewan

Propinsi Riau dilalui oleh garis katulistiwa, alamnya kaya dengan flora dan fauna, antara Riau Daratan dan Riau Kepulauan alamnya berbeda, menyebabkan keadaan faunanya berbeda pula. Binatang-binatang besar tidak terdapat di daerah Riau Kepulauan jenis yang ditemui di sini adalah berbagai burung, ikan, kerang dan penyu. Sedang binatang-binatang buas atau besar terdapat di daerah Riau Daratan.

## G. SUNGAI, DANAU DAN RAWA

### 1. Nama dan panjang sungai (lihat peta)

Di dalam wilayah ini mengalir empat buah sungai besar, berturut-turut dari utara ke selatan, yakni :

- a. Sungai Rokan dengan anak sungainya Rokan Kiri dan Rokan Kanan sepanjang  $\pm 260$  km, dalamnya  $\pm 6$  meter, bermuara di Selat Malaka.
- b. Sungai Siak yang bermuara di Selat Bengkalis hulunya bercabang dua, sungai Tapung Kiri dan Sungai Tapung Kanan. Panjangnya  $\pm 200$  km dan dalamnya  $\pm 12$  meter diwaktu surut.
- c. Sungai Kampar, hulunya bercabang dua, sungai Kampar Kiri dan Kampar Kanan, sepanjang  $\pm 325$  km, dalamnya  $\pm 6$  meter bermuara di Selat Malaka.
- d. Sungai Indragiri yang bermuara di Selat Berhala, sebelah hulu bernama Batang Kuantan dan lebih ke hulu lagi yaitu di daerah Propinsi Sumatera Barat bercabang dua, Batang Ombilin dan Batang Sinamar. Panjangnya  $\pm 250$  km dalamnya pada bagian daerah Indragiri Hilir  $\pm 12$  meter dan semakin ke hulu semakin dangkal serta berbatu-batu.

Keempat sungai ni bermata air di pegunungan Bukit Barisan. Selain dari empat sungai besar tersebut, dalam daerah ini terdapat juga anak-anak sungai dari sungai-sungai Rokan, Siak, Batang Kampar dan Indragiri. Anak-anak sungai ini bermuara pada sungai induknya. Selain itu terdapat juga sungai-sungai kecil lainnya bermuara langsung ke laut.

## 2. Fungsi sungai danau dan rawa

Fungsi sungai di daerah Riau adalah sebagai sarana transportasi, yang akan diuraikan di bawah ini. Sebagai sumber tenaga, sungai-sungai di daerah ini belum dimanfaatkan. Danau dan rawa adalah merupakan sumber perikanan pedalaman, sedikit sekali yang baru dimanfaatkan untuk tempat rekreasi, bahkan dapat disebut sama sekali belum diolah ke arah ini. Sebagai sumber perikanan pedalaman, tercatat masing-masing danau atau disebut juga "tasik" seluas 43,420 ha, rawa seluas 180.810 ha dan sungai seluas 44,600 ha. Danau atau tasik-tasik yang terpelihara baik dapat menghasilkan ikan  $\pm 1$  ton/ha/tahun, seperti umpamanya danau Bakuak di desa Tambang (Kamper). Danau ini terpelihara baik dan hubungannya dengan sungai asalnya, dalam hal ini sungai Kampar masih lancar. Pada musim kemarau danau ini merupakan resevaat ikan terhadap sungai asalnya. Lingkungannya masih cenderung menyerupai lingkungan sungai asalnya. Danau atau tasik yang kurang atau tidak terpelihara sudah mendekati lingkungan rawa. Potensi produksinya lebih rendah.

## 3. Sungai danau dan rawa sebagai sarana transportasi.

Daratan Propinsi Riau, diliputi oleh  $\pm 50\%$  rawa-rawa dan menembus sampai 2/3 penampang-lintang, mulai dari garis pantai sampai ke kaki daerah pegunungan. Karena itu sungai-sungainya sampai ke hulu cukup lebar (lebih dari 50 meter) dan dalamnya lebih dari 3 meter.

Sungai-sungai ini dapat dilayari dengan alat-alat angkutan sungai. Keadaan arus air cukup tenang untuk dilayari. Sungai-sungainya berliku-liku dan di sana-sini banyak terdapat tasik (meander). Karena dataran rendahnya banyak rawa dan sungai, problem angkutannya dibagi menjadi empat "daerah aliran sungai", yakni sungai Rokan di sebelah Utara, sungai Siak dan Batang Kampar di bagian tengah dan sungai Indragiri atau disebut juga Batang Kuantan di bagian Selatan. Dengan demikian sejak dari dahulu daerah-daerah ini dihubungkan satu sama lainnya dengan kombinasi sarana angkutan darat dan sarana angkutan sungai. Sampai sejauh 200 ha dari tepi pantai dapat dilayari, sedangkan sebagian pelosok-pelosoknya dihubungkan dengan anak sungainya.

Jenis angkutannya berupa sampan ukuran 0 – 1 ton, perahu-

motor berukuran antara 1 – 3 ton dan jenis "kapal pongpong" (menurut istilah rakyat) berkapasitas antara 3 – 10 ton. Sementara itu sungai Siak dapat dilayari oleh kapal-kapal laut berkapasitas  $\pm$  1000 ton sampai ke Pekanbaru. Sungai Indragiri hanya dapat dilayari sampai ke Tembilahan dengan kapal laut berkapasitas  $\pm$  300 ton.

---

## BAB II

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### A. JUMLAH PENDUDUK

Menurut catatan dan Kantor Sensus untuk penduduk Propinsi Riau pada tahun 1971 tercatat 1.641.074 jiwa. Tahun 1973 berjumlah 1.723.436 jiwa. Tahun 1974 sudah berjumlah 1.769.201, tahun 1975 berjumlah 1.797.875 jiwa. Dan tahun yang lalu 1976 penduduk daerah ini menjadi 851.468 jiwa.<sup>1)</sup> Jumlah Warga Negara Indonesia di daerah ini tahun 1971 adalah 1.514.813 jiwa dan Warga Negara Asing sebanyak 126.261 jiwa. Tahun 1973 WNI di Riau berjumlah 1.637.048 jiwa, sedangkan WNA 86,388 jiwa. Tahun 1974 WNI itu berjumlah 1.863.781 jiwa sedang WNA sebanyak 85.421 jiwa. Tahun 1975 perbandingan itu menjadi 1.713.073 jiwa untuk WNI dan 84.802 untuk WNA. Dan catatan terakhir tahun 1976 memperlihatkan ada 1.766.332 jiwa WNI di Riau dengan WNA sejumlah 85.136 jiwa.

Dari catatan angka penduduk di atas kelihatan pertambahan jumlah WNI dari tahun ke tahun, sedangkan WNA tidak memperlihatkan pertambahan yang demikian. Angka penduduk untuk WNA semenjak tahun 1973 sampai 1976 malah lebih sedikit dari jumlah tahun 1971. Hal ini sebagian mungkin disebabkan oleh masuknya WNA itu menjadi WNI, sebagian lagi perpindahan ke tempat lain. Dalam hal ini dapat dilihat perpindahan nelayan WNA Cina di daerah Kabupaten Bengkalis ke Tanjungbalai (Sumatera Utara) dan ke Cirebon (Jawa Barat). Perpindahan mereka ini disamping oleh merosotnya produksi ikan yang dapat mereka capai di daerah Kabupaten Bengkalis terutama daerah Bagan Siapi-api juga karena di Tanjungbalai dan Cirebon biaya hidup terasa lebih rendah daripada di Kabupaten Bengkalis. Di samping itu kabarnya dalam masalah administrasi, mereka merasa lebih sederhana di Sumatera Utara dan Jawa Barat, dari pada di Riau. Warga Negara Asing yang terdapat di Riau diantaranya : Cina, India, Arab dan Malaysia. Warga Negara Asing selain Cina boleh dikatakan kurang berarti, sebab jumlah mereka umumnya di bawah 100 jiwa. Juga mereka memperlihatkan peranan yang

tidak begitu penting dalam kehidupan sosial. Warga Negara Asing Cina sebagai WNA yang terbesar jumlahnya mendiami terutama Kabupaten Kepulauan Riau dan Kabupaten Bengkalis. Di Kabupaten Bengkalis mereka banyak tinggal di Kecamatan Tebingtinggi, Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bangko (meliputi kota Kecamatan Bagan Siapi-api). Di Kabupaten Kepulauan Riau mereka mendiami Kecamatan Bintang Selatan yang meliputi kota Tanjungpinang. Tabel di bawah ini memperlihatkan gambaran lebih jelas mengenai WNA Cina itu dari tahun 1971 sampai 1976.

**Tabel II.1. Banyaknya WNA Cina di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Riau dibandingkan dengan WNA dalam Propinsi Riau dari tahun 1971 sampai dengan 1976.**

Tahun	WNA Cina Bengkalis	WNA Cina Kep. Riau	WNA Propinsi Riau
1971	72.248	38.768	126.261
1973	25.749	35.518	86.388
1974	31.518	35.571	85.421
1975	31.505	35.440	84.802
1976	31.837	35.522	85.136

Sumber : Sensus Penduduk 1971 Penduduk Riau dan Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau.

Dari tabel di atas kelihatan betapa besarnya jumlah WNA Cina di Riau serta betapa kecilnya jumlah WNA lain di luar WNA Cina. Perbandingan persentasi WNA seluruhnya dengan WNA Cina saja dalam lima tahun belakangan ini lebih kurang sebagai berikut.

**Tabel II.2. Perbandingan persentasi WNA di Propinsi Riau dengan WNA Cina dari tahun 1971 sampai dengan 1976**

Tahun	WNA seluruhnya	WNA Cina
1971	7,7	7,6
1973	4,9	4,1
1974	5	4,3
1975	4,7	4,3
1976	4,7	4,1

Bahan : Sensus Penduduk 1971 Penduduk Riau dan Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau.

## B. KOMPOSISI PENDUDUK

Daerah Tingkat I Riau yang relatif cukup luas mempunyai penduduk yang jarang. Penyebaran penduduk belum dapat merata karena 70% dari luas daratan yang ada masih merupakan daerah hutan.<sup>2)</sup> Tapi yang tampaknya juga amat mempengaruhi penyebaran penduduk ini ialah faktor transportasi. Jalan raya ke daerah-daerah kabupaten di Riau masih merupakan tantangan yang cukup besar bagi pembangunan di daerah ini. Sebagian besar jalan raya antar kabupaten itu, masih merupakan jalan tanah yang diberi batu dan pasir. Keadaan seperti itu menyebabkan gangguan lalu-lintas yang sering terjadi dalam musim penghujan sehingga beberapa daerah sukar dicapai dengan kendaraan darat. Atau sekurangnya hal itu menyebabkan biaya pengangkutan yang tinggi. Bagi daerah-daerah yang dapat dicapai melalui jalan air sungai-sungai juga sering mendapat halangan kalau sudah tiba musim kemarau, karena banyak sungai-sungai di propinsi ini yang tak dapat dilayari lagi. Sedang bagi daerah kepulauan, masih terasa betapa masih kurangnya kapal dan motor yang akan menjadi sarana perhubungan antar pulau.

## 2. Data dasar Daerah Tingkat I Riau.

Penduduk di daerah Riau kebanyakan tinggal di sepanjang tepi sungai-sungai Kuantan/Indragiri, sungai Kampar, sungai Siak di tepi jalan raya, serta di kota-kota kecamatan dan kabupaten. Dari data hasil pendaftaran sensus penduduk tahun 1971 dapat dilihat bahwa di daerah ini sebanyak 86,00% dari jumlah penduduk tinggal di pedesaan, dan hanya 14,00% di daerah kota. Dari penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, terdiri dari yang berumur 0 – 14 tahun sebanyak 46,09%, yang berumur 15 – 16 tahun sebanyak 51,87% dan golongan yang berumur 65 tahun ke atas sebanyak 2,04%. Dari golongan penduduk yang berumur 15,64 tahun terdiri dari lebih kurang 476 ribu laki-laki dan 453 ribu perempuan. Sedangkan penduduk yang tinggal di kota terdiri dari golongan penduduk berumur 0 – 14 tahun sebanyak 52,95% dan golongan penduduk berumur 65 tahun ke atas sebanyak 1,37%. Penduduk berumur 15 – 64 tahun terdiri dari 75 ribu laki-laki dan 69 ribu perempuan. Kalau kita bandingkan jumlah penduduk daerah Riau dengan luas wilayahnya, maka kepadatan penduduk tahun 1971 tiap kilo meter persegi adalah sebanyak 17 jiwa.<sup>3)</sup>

Dalam tahun 1971 penduduk Indonesia yang tinggal di Propinsi Riau ada, 1,3% dengan luas wilayah sebesar 4,96% dari jumlah luas daerah seluruh Indonesia.<sup>4)</sup> Dengan demikian dibanding dengan kepadatan penduduk pada propinsi-propinsi lain di Indonesia dalam tahun yang sama, maka kepadatan penduduk 17 jiwa tiap kilometer persegi, masih jarang. Apalagi jika kita lihat kepadatan penduduk Indonesia saat itu 30 jiwa tiap kilo meter persegi.<sup>5)</sup> Kepadatan penduduk dalam Propinsi Riau tahun 1973 menurut catatan Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau ialah sebanyak 18 jiwa tiap kilometer persegi, dalam tahun 1974 menjadi 19 jiwa, tahun 1975 masih tetap 19 jiwa, sedangkan dalam tahun 1976 naik menjadi 20 jiwa tiap kilometer persegi. Dalam tahun 1976 ini menurut catatan kantor tersebut, kabupaten yang terpadat penduduknya ialah Kotamadya Pekanbaru, seba-

---

3) Lihat Ulasan Singkat Sensus Penduduk 1971 Propinsi Riau, 1973.

4) Lihat Ulasan Singkat Sensus Penduduk 1971 Propinsi Riau, 1973, halaman 5.

5) Lihat Ulasan Singkat Sensus Penduduk 1971 Propinsi Riau.

nyak 2.643 jiwa tiap kilometer persegi. Menyusul sesudah itu Kabupaten Kepulauan Riau, sebanyak 45 jiwa tiap kilometer persegi. Sedangkan kabupaten yang paling jarang penduduknya ialah Kabupaten Kampar, tercatat sebanyak 11 jiwa tiap kilometer persegi. Sesudah itu menyusul Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 13 jiwa tiap kilometer persegi. Dua kabupaten yang lain lagi yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Indragiri Hilir, masing-masing mempunyai kepadatan penduduk 15 jiwa dan 29 jiwa tiap kilometer persegi.

Kecamatan yang terpadat penduduknya dalam tahun 1976 yang lalu ialah kecamatan Pekanbaru Kota. Tercatat kepadatan penduduknya 14.488 jiwa tiap kilometer persegi. Kemudian disusul oleh Kecamatan Sukajadi (dalam lingkungan kota Pekanbaru juga) sebanyak 8.509 jiwa tiap kilometer persegi. Kecamatan yang terjarang penduduknya terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu Kecamatan Singingi dan sebuah lagi Kecamatan Langgam di Kabupaten Kampar, dengan kepadatan penduduk hanya 2 jiwa tiap kilometer persegi. Sesudah itu menyusul Kecamatan Bunut juga termasuk kepadatan penduduknya 3 jiwa tiap kilometer persegi.

Berdasarkan catatan kepadatan penduduk ini, tampak kepada kita, betapa Kotamadya Pekanbaru mempunyai kepadatan penduduk yang jauh melebihi daerah lainnya. Pertambahan penduduk pada Kotamadya Pekanbaru menanjak kuat tahun 1970. Satu tahun sebelumnya, tahun 1969 penduduk kota ini baru 117.470 jiwa, dalam tahun 1970 menanjak menjadi 132.064 jiwa.<sup>6)</sup> Pertambahan ini menanjak terus, sehingga angka-angka pertambahan itu tercatat seperti di bawah ini.

---

6) Kantor Sensus dan Statistik Kotamadya Pekanbaru.

**Tabel II.3. Pertambahan penduduk dan kepadatan dalam Kotamadya Pekanbaru dari tahun 1970 sampai tahun 1976.**

Tahun	Jumlah Penduduk	Luas (Km <sup>2</sup> )	Penduduk tiap Km <sup>2</sup>
1970	132.068	62,96	2.097
1971	144.790		2.303
1972	145.489		2.310
1973	156.186		2.489
1974	151.383		2.404
1975	151.650		2.408
1976			2.643

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Kodya Pekanbaru.

Pertambahan penduduk Kotamadya Pekanbaru tahun 1971 – 1972 itu ada hubungannya barangkali dengan pendatang baru ke kota tersebut. Dalam tahun 1971 itu sudah mulai dibuka usaha kayu balak yang mengundang banyak pekerja dari luar daerah Riau. Meskipun umumnya perusahaan kayu balak itu berada di luar kota, tapi kebanyakan dari pekerja perusahaan itu membuat alamat atau domisili mereka di Pekanbaru atau melalui perusahaan tempat mereka bekerja di kota tersebut. Sesudah tahun 1973 usaha kayu balak terasa sepi lagi, karena macetnya dalam bidang usaha. Maka akibatnya banyak pula pekerja itu yang terpaksa meninggalkan pekerjaan tersebut dan besar kemungkinan kembali pulang ke tempat semula atau pindah ke daerah lain.

Kepadatan penduduk yang relatif cukup besar jumlahnya itu bagi kota Pekanbaru, masih dipengaruhi oleh daerah perusahaan minyak Caltex, seperti Rumbai, Duri dan Dumai. Perusahaan minyak ini, yang meskipun hanya menerima sebagian besar tenaga yang bermutu saja, namun banyak memberi harapan dan daya tarik kepada penduduk di luar kota dan di luar daerah Riau untuk memanfaatkan perusahaan itu bagi kepentingan kehidupan mereka. Tenaga-tenaga yang tidak trampil, mengharapkan dapat di-

pakai oleh pegawai pegawai perusahaan minyak itu seperti pekerja rumah tangga, sopir dan sebagainya. Sedangkan bagi pedagang, mereka datang ke Pekanbaru dengan harapan di kota ini akan memperoleh daya beli masyarakat yang lebih besar, karena pegawai-pegawai Caltex mempunyai upah yang relatif cukup besar, dan tentu akan membelanjakan kelebihannya kepada pedagang-pedagang. Tetapi dari pembagian atas dua jenis tujuan tadi (menjadi buruh dan pedagang) dapat dilihat secara kasar suku-suku pendatang yang terlibat. Umumnya yang datang ke Pekanbaru dengan tujuan menjadi buruh kebanyakan terdiri dari suku Batak dan suku Jawa. Yang datang dengan tujuan berdagang umumnya dari suku Minang.

Kepadatan penduduk bagi Kabupaten Kepulauan Riau ada hubungannya dengan daerah ini yang dulu sebelum tahun 1960 masih merupakan daerah dollar. Waktu itu cukup banyak orang merantau ke daerah ini karena dengan alat tukar mata uang dollar Inggris tersebut, para pendatang atau perantau memperoleh penghasilan yang cukup lumayan. Kesan itu masih ada juga pengaruhnya sampai saat ini, sehingga masih ada juga pendatang yang mengira keadaan ekonomi daerah itu masih sebaik masa dollar tersebut. Dewasa ini para pendatang ke daerah ini terutama kota Tanjungpinang, tertarik kepada beberapa proyek di sana, terutama proyek pulau Batam. Beberapa kecamatan yang sangat lemah potensi ekonominya. Kecamatan Singingi dalam kawasan Kabupaten Indragiri Hulu, meskipun terletak di tepi jalan raya sebagian penduduknya, tapi sebagian besar penduduk itu hidup sebagai petani karet alam, yang selama hampir sepuluh tahun lebih, belakangan ini tidak mempunyai pasaran yang cerah bagi petaninya. Di samping itu pertanian untuk padi di kecamatan ini nyatanya belum dapat diharapkan, karena masih diolah dengan cara-cara yang belum maju.

Kesulitan dalam kehidupan ekonomi yang demikian pada satu pihak menyebabkan banyak penduduk yang merantau atau pindah ke daerah lain meninggalkan kecamatan tersebut. Di pihak lain tidak ada keinginan bagi para pendatang untuk menetap atau mencari penghidupan di sana. Kecamatan Langgam dan Bunut di samping masih juga mempunyai potensi ekonomi yang lemah yang pertama-tama karena masih rendahnya kemampuan penduduk menguasai lingkungannya merupakan pula daerah yang agak ter-

pisah, sukar dicapai dengan kendaraan, kecuali dengan melalui sungai. Ketiga kecamatan ini dari dahulu belum pernah bertambah angka kepadatan penduduknya. Pembagian atas jenis kelamin itu dibagi lagi menjadi golongan dewasa yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan anak-anak yang merupakan golongan penduduk berumur 0 – 15 tahun. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur dalam catatan lima tahun tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. (lihat tabel II.4.).

**Tabel II.4. Banyaknya penduduk dalam Propinsi Riau diperinci menurut jenis kelamin dan umur tahun 1971 sampai tahun 1978.**

Tahun	Dewasa 15 th ke atas		Anak-anak 0 – 15 th		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1971	453.051	432.724	386.049	360.250	1.641.074
1973	469.782	445.529	406.383	402.742	1.723.436
1974	476.458	452.130	420.532	420.081	1.769.201
1975	487.234	460.053	418.224	432.364	1.797.875
1976	498.554	477.983	435.355	439.576	1.851.468

Sumber : Sensus Penduduk 1971 Penduduk Riau dan Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau.

Dari tabel di atas kelihatan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari pada jumlah perempuan. Daerah pedesaan dan daerah kota mengenai jenis kelamin itu pada tahun 1971 ternyata juga mempunyai perbedaan. Di daerah pedesaan angka imbang jenis kelamin itu ialah 1043 laki-laki untuk setiap 1000 perempuan, sedang di daerah kota 1068 laki-laki untuk setiap 1000 wanita. Jadi perbedaan jumlah wanita dari laki-laki lebih besar di daerah kota daripada di daerah pedesaan. Menurut sensus penduduk tahun 1961, penduduk Riau terdiri dari 597.920 wanita dan 637.064 laki-laki. Kemudian tahun 1971 tercatat ada 801.974 wanita dan 839.100 penduduk laki-laki dengan angka imbang

jenis kelamin 1046 laki-laki untuk setiap 1000 wanita.<sup>8)</sup>

Dari angka-angka jumlah penduduk tahun 1971 sampai tahun 1976 dapat dilihat bahwa jumlah wanita makin lama makin mendekati jumlah laki-laki, sehingga angka imbangan itu makin saling mendekati. Perbedaan selisih yang makin kecil itu dalam catatan lima tahun belakangan ini, kiranya lebih kurang seperti digambarkan oleh tabel ini.

**Tabel II.5. Selisih jumlah laki-laki dan perempuan di Propinsi Riau dalam tahun 1971 sampai dengan 1976.**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Selisih jumlah laki-laki dengan perempuan	Banyaknya laki-laki tiap 1000 wanita
1971	839.100	801.874	38.026	1.046
1973	876.365	848.271	28.094	1.033
1974	896.990	872.211	24.779	1.028
1975	905.458	892.417	13.041	1.014
1976	933.909	917.559	16.041	1.017

Besarnya jumlah laki-laki daripada perempuan agaknya berhubungan dengan jumlah pencari kerja yang datang ke daerah Riau, karena tampaknya kebanyakan dari pendatang itu dari golongan laki-laki. Mereka itu seperti disebutkan juga terdahulu datang terutama sebagai buruh untuk beberapa proyek dan perusahaan, di antaranya yang penting : proyek pulau Batam, buruh kayu balak, buruh/pegawai perusahaan minyak Caltex, tambang timah Bintan dan tambang bauksit Bintan. Hal ini mempunyai kesejajaran dengan tabel di atas, di mana dalam tahun 1971 – 1973 kelebihan laki-laki cukup besar, sedang sesudah itu segera berkurang. Ini sejajar dengan usaha kayu balak dan proyek pulau Batam yang

dalam tahun-tahun tersebut berjalan lancar, sehingga mengundang banyak tenaga kerja. Kehadiran sesudah itu kedua usaha tersebut mengalami kemerosotan. Kemerosotan dalam lapangan pekerjaan itu tentu menyebabkan berkurangnya jumlah pekerja, karena mereka mau tidak mau harus mencari pekerjaan lain, yang dapat menyebabkan mereka keluar lagi dari daerah Riau.

Perbandingan penduduk dalam golongan umur menurut interval 5 tahun dapat kita lihat hasil sensus penduduk tahun 1971 seperti dalam tabel di bawah ini.

**Tabel II.6. Penduduk Propinsi Riau menurut umur dan jenis kelamin dalam tahun 1971.**

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase terhadap jumlah	Banyaknya laki-laki tiap 1000 perempuan
0- 4	138.306	134.354	272.660	16.615	1.029
5- 9	135.324	129.733	265.057	16.151	1.043
10-14	112.419	105.163	217.582	13.259	1.069
15-19	87.991	90.437	178.428	10.873	973
20-24	58.746	65.869	124.315	7.575	896
25-29	71.185	67.216	138.401	8.434	1.059
30-34	57.454	21.615	109.069	6.646	1.113
35-39	50.837	44.281	95.218	5.802	1.150
40-44	38.146	32.904	71.050	4.329	1.159
45-49	27.208	23.724	50.932	3.104	1.147
50-54	21.492	19.875	41.367	2.521	1.081
55-59	12.723	8.729	21.452	1.307	1.458
60-64	11.645	11.786	23.431	1.428	988
65-69	5.051	5.712	10.763	0,656	884
70-74	6.336	5.843	12.179	0,742	1.084
75+	4.137	5.033	9.170	0,559	822
<b>Jumlah</b>	<b>839.100</b>	<b>801.974</b>	<b>1.641.074</b>	<b>100.000</b>	<b>1.046</b>

Sumber : Sensus Penduduk 1971 Penduduk Riau.

Dari data golongan umur tersebut terlihat bahwa pada umumnya seks rasio lebih besar dari 1.000, yang berarti pada umumnya jumlah laki-laki lebih besar dari pada jumlah perempuan. Hanya pada golongan umur 15 – 19 tahun, 20 – 24 tahun, 65 – 69 tahun dan 75 ke atas seks rasionya lebih kecil dari 1.000, yang berarti pada golongan umur tersebut perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Penduduk yang berumur 0 – 14 tahun dari tabel di atas tampak sebesar 46,025% dari seluruh penduduk. Penduduk yang berada dalam golongan umur 15 – 64 tahun di daerah Riau terdapat sebanyak 52,014%, sedangkan penduduk dalam golongan umur 65 tahun ke atas tampak sebesar 1,957% dari jumlah penduduk.

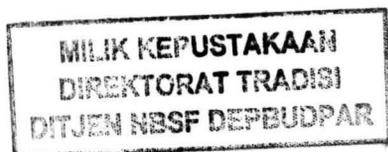
Jika kita perhatikan lagi penduduk Riau dalam sensus penduduk tahun 1971 tersebut, maka penduduk yang berumur 0 – 14 tahun tersebut di daerah pedesaan terdapat sekitar 46,09% dari seluruh penduduk yang tinggal di desa, lebih tinggi dari daerah kota, yang hanya sekitar 45,68% dari jumlah penduduk yang tinggal di kota. Sebaliknya kelompok umur 15 – 64 tahun ternyata daerah kota mempunyai persentasi lebih tinggi, yaitu sebesar 52,96%, sedang daerah pedesaan hanya sekitar 51,24% dari seluruh penduduk yang masing-masing pada daerah kota dan pedesaan.<sup>9)</sup>

Mengenai penduduk yang berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah dapat kita ketahui dalam hasil sensus penduduk tahun 1971 tersebut dalam *Penduduk Riau* dalam tabel 6. Di situ dapat dijumpai bawa penduduk berumur 5 tahun ke atas di daerah kota terdapat sebanyak 179.008 jiwa, dengan yang masih bersekolah dari jumlah itu sebanyak 49.451 jiwa atau sekitar 27,625%. Dari jumlah itu terdapat penduduk laki-laki berumur 5 tahun ke atas 92.809 jiwa, dengan yang masih bersekolah dari golongan itu sebanyak 274.462 jiwa atau sebesar 29,59%. Wanita sebanyak 86.199 jiwa dengan yang masih bersekolah sejumlah 21.989 jiwa atau 25,510%.

Di daerah pedesaan kelompok umur 5 tahun ke atas sebanyak 1.189.406 jiwa, dengan jumlah yang masih bersekolah sebanyak 178.994 jiwa, yaitu sekitar 15.049%. Dari jumlah ini ada laki-laki

---

9) *Ulasan Singkat Sensus Penduduk 1971 Propinsi Riau*, opcit.



berumur 5 tahun ke atas sebanyak 101.843 orang atau sekitar 16,751%. Dan perempuan sebanyak 581.421 orang dengan yang masih bersekolah sebanyak 77.151 jiwa atau 13,269%. Dari catatan sensus yang demikian, tampak jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah lebih banyak di daerah pedesaan, tetapi yang tidak bersekolah juga terdapat dalam jumlah besar di daerah itu. Sebaliknya atas bandingan dengan masing-masing daerah (kota dan pedesaan) penduduk berumur 5 tahun ke atas lebih tinggi persentasinya di kota (27,625%) dari pada di pedesaan yang hanya 15,049%. Ini berarti lebih banyak penduduk berumur 5 tahun ke atas yang dapat bersekolah di bandingkan dengan di daerah pedesaan, dari jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas di daerah tersebut masing-masing.

Penduduk berumur 5 tahun ke atas di daerah kota dan pedesaan ada sebanyak 1.368.414 jiwa. Di antaranya yang masih bersekolah hanya sebanyak 228.445 orang atau sekitar 16,694%. Keadaan tahun 1971 mengenai penduduk berumur 5 tahun ke atas tersebut dalam beberapa kabupaten dan kotamadya memperlihatkan, bahwa di Kabupaten Kepulauan Riau kelompok umur 5 tahun ke atas jenis laki-laki yang masih bersekolah berada dalam persentasi yang terendah, hanya 13,298%. Dari jenis kelamin yang serupa Kotamadya Pekanbaru mempunyai persentasi yang tertinggi, yaitu 30,636%. Kelompok umur 5 tahun ke atas dari jenis wanitanya yang masih bersekolah, yang paling tinggi persentasinya juga Kotamadya Pekanbaru sebesar 27,310%. Sedangkan Indragiri Hilir dengan persentasi 11,820% dari jenis wanita berumur 5 tahun ke atas yang masih bersekolah, merupakan persentasi yang paling rendah di propinsi ini. Penduduk berumur 5 tahun ke atas dengan jumlah terbesar ialah Kabupaten Bengkalis, yaitu lebih dari 300 ribu, Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir dan Kepulauan Riau lebih dari 200 ribu jiwa, sedangkan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kotamadya Pekanbaru mempunyai jumlah di bawah dari 200 ribu jiwa. Sensus penduduk tahun 1971 tersebut mengenai penduduk Riau memperlihatkan pula bahwa penduduk berumur 5 tahun ke atas dari jenis-jenis laki-laki lebih banyak yang bersekolah daripada jenis perempuan dalam kelompok umur yang sama, baik di daerah pedesaan maupun di daerah kota. Hal ini ada hubungan dengan pandangan tradisional dalam masyarakat Melayu Riau, yang umumnya memandang kurang penting bagi anak perempuan

untuk bersekolah. Banyak di antara para orang tua yang amat meremehkan masalah pendidikan anak perempuannya.

Meskipun pandangan semacam ini sudah jauh surut, tapi oleh pukulan dalam bidang ekonomi terhadap petani-petani karet dan kopra yang merupakan bagian terbesar dari mata pencaharian rakyat, yang tetap memberikan kesulitan bagi mereka untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Dalam hal yang sulit itu, tampak bahwa banyak orang tua yang lebih cenderung juga memberi kesempatan lebih dahulu kepada anak laki-laki untuk bersekolah dibandingkan dengan anak perempuan. Penduduk Riau yang tinggal di kota tahun 1971 sebanyak 217.893 jiwa, dan mempunyai angkatan kerja 60.838 jiwa atau sekitar 31,2% dari jumlah penduduk daerah kota tersebut. Sebagian besar di antara penduduk daerah kota bekerja dalam lapangan jasa-jasa kemasyarakatan sosial dan pribadi. Mereka ini ada sejumlah 18.361 orang, atau sekitar 29% dari jumlah angkatan kerja yang ada di kota. Menyusul sesudah itu penduduk yang bekerja dalam lapangan perdagangan rumah makan dan hotel, sebanyak 14.769 jiwa, sekitar 24% dari seluruh angkatan kerja di daerah kota. Tempat ke tiga ialah lapangan pekerjaan berupa kegiatan yang tidak/belum jelas. Penduduk yang bekerja dalam lapangan itu ada sebanyak 7.620 orang, sekitar 12,5%. Penduduk yang bekerja dalam lapangan pekerjaan angkutan, penyimpanan dan komunikasi ada sebanyak 4.433 orang, sekitar 7,5%. Lapangan pekerjaan yang berikutnya ialah lapangan pertambangan dan penggalian, (sebagai tempat ke lima dalam urutan ini) dengan pekerja sebanyak 3.995 jiwa, sekitar 6,5% (lihat tabel II.7.).

Di daerah pedesaan tercatat ada sebanyak 488.956 jiwa angkatan kerja, sekitar 4,6% dari jumlah penduduk yang tinggal di desa sebanyak 1.423.181 jiwa. Dari jumlah itu sekitar 77% yaitu sebanyak 362.301 orang bekerja dalam lapangan pekerjaan pertanian, perburuan, kehutanan dan perikanan. Penduduk yang bekerja dalam lapangan pekerjaan jasa-jasa kemasyarakatan sosial dan pribadi ada sebanyak 30.800 jiwa atau sekitar 6%. Kemudian menyusul tempat ketiga yaitu lapangan pekerjaan berupa kegiatan yang tidak/belum jelas, dengan jumlah 25.015 jiwa, sekitar 5,5%. Penduduk yang bekerja dalam lapangan pekerjaan perdagangan rumah makan dan hotel tercatat sebanyak 24.593 jiwa, sekitar 5,3% dari seluruh angkatan kerja di daerah pedesaan. Dan tempat

ke lima dalam urutan lapangan pekerjaan ini yang besar juga jumlah penduduk yang memasuki ialah lapangan pekerjaan industri dan pengolahan, dengan jumlah pekerja 24.296 orang, sekitar 5%.

Dengan demikian ada perbedaan urutan lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk yang bekerja di daerah pedesaan dan daerah kota. Dari lima macam lapangan pekerjaan yang banyak dimasuki penduduk kota, ternyata berbeda dengan lima macam urutan lapangan pekerjaan yang banyak dimasuki oleh penduduk daerah pedesaan. Tabel di bawah ini memperlihatkan perbandingan itu.

**Tabel II. 7 Perbandingan besar kecilnya jumlah penduduk yang bekerja dalam 5 macam lapangan pekerjaan di daerah kota dan daerah pedesaan dalam propinsi Riau menurut keadaan tahun 1971.**

No.	daerah kota	jumlah pekerja	%	daerah pekerja	Jumlah pekerja	%
1.	jasa-jasa ke-	18.361	29	pertanian	362.301	77
a	masyarakat-			buruhan ke-		
p	an sosial			hutan per-		
	dan pribadi			ikanan		
a.	perdagangan	14.769	24	jasa-jasa ke-	30.800	6
n.	rumah makan			masyarakat-		
g.	dan hotel			an sosial dan		
				pribadi		
n.	kegiatan	7.620	12,5	kegiatan	25.015	5,5
p.	yang tidak/			yang tidak/		
e	belum jelas			belum jelas		
k						
r	angkutan pe-	4.430	7,5	perdagangan	24.593	5,3
j	nyimpanan			rumah makan		
a	dan komuni-			dan hotel		
	kasi					
a.	pertambahan	3.995	6,5	industri	24.296	5
n.	dan penggalan					

Sumber : Kantor Sensus penduduk Riau thn. 1971

Sensus penduduk tahun 1971 mengenai penduduk daerah Riau di samping memperlihatkan jumlah angkatan kerja yang lebih besar di daerah pedesaan, juga menggambarkan bahwa angkatan kerja dari kalangan laki-laki lebih besar jumlahnya daripada kalangan perempuan. Hal ini berlaku baik di daerah kota maupun di daerah pedesaan. Dari 10 macam lapangan pekerjaan yang tidak dimasuki oleh penduduk, yaitu lapangan pekerjaan listrik, gas dan air, dan lapangan pekerjaan keuangan asuransi dan perdagangan benda. Sedangkan di daerah kota 10 macam lapangan pekerjaan itu dimasuki oleh penduduk semuanya.

Dari 549.94 angkatan kerja dalam Propinsi Riau menurut catatan sensus penduduk tahun 1971, ternyata lapangan pekerjaan pertanian, perburuhan, kehutanan dan perikanan dengan pekerja sebanyak 366.091 orang, merupakan lapangan pekerjaan yang paling banyak menampung tenaga kerja di daerah ini. Kemudian menyusul lapangan pekerjaan yang menampung tenaga kerja sebanyak 49.161 orang, yaitu lapangan pekerjaan jasa-jasa kemasyarakatan sosial dan pribadi. Tempat ketiga lapangan pekerjaan perdagangan, rumah makan dan hotel menampung tenaga kerja sebesar 39.362 orang. Urutan ke empat ialah tenaga kerja sebanyak 32.635 orang yang ditampung dalam lapangan pekerjaan berupa kegiatan yang tidak/belum jelas. Tempat ke lima ialah lapangan pekerjaan industri pengolahan dengan penduduk yang bekerja dalam lapangan ini sebanyak 27.179 orang.

Lapangan pekerjaan yang paling sedikit dimasuki penduduk ialah lapangan pekerjaan listrik gas dan air, hanya mempunyai tenaga kerja 334 orang. Sesudah itu menyusul lapangan pekerjaan keuangan asuransi dan perdagangan benda dengan penduduk yang bekerja dalam lapangan ini sebanyak 1081 orang. Tempat ke tiga dengan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 7.579 orang ialah dalam lapangan pekerjaan pada tempat keempat yang termasuk sedikit juga mempunyai tenaga kerja ialah lapangan pekerjaan 12.274 orang. Akhirnya lapangan pekerjaan yang ke lima yang masih terhitung sedikit menampung tenaga kerja ialah lapangan pekerjaan angkutan, penyimpanan dua komunikasi, yang hanya menampung penduduk yang bekerja di situ sebanyak 14.098 orang.

Mengenai pegawai negeri sejumlah 9.880 orang, masing-masing dibayar gajinya oleh KPN Pekanbaru dan KPN Tanjung pinang.

Jumlah pegawai negeri Pusat yang dibayar gajinya melalui KPN Pekanbaru ada sebanyak 7.118 orang, sedangkan melalui KPN Tanjungpinang ada sejumlah 2.762 orang.

Pegawai Negeri Departemen P dan K dengan jumlah sebanyak 2.485 orang merupakan jumlah yang terbesar di daerah ini. Disusul kemudian oleh pegawai Departemen Agama dengan jumlah sebesar 2.211 orang. Sedang tempat ke tiga dengan jumlah sebesar 1.965 orang, ialah pegawai Departemen Keuangan. Gambaran selengkapnya mengenai komposisi pegawai negeri Pusat tersebut di daerah Riau dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel II. 8.** Banyaknya pegawai negeri Pusat di Propinsi Riau per lembaga negara non departemen-departemen, akhir tahun 1976.

No.	Lembaga negara non departemen departemen	KPN Pekanbaru	KPN Tanjungpinang	Jumlah
1.	Kejaksaan Agung	300	79	379
2.	Biro Pusat Statistik	68	20	88
3.	Dalam Negeri	198	43	241
4.	Kehakiman	384	177	561
5.	Penerangan	221	59	280
6.	Keuangan	847	1.118	1.965
7.	Perdagangan	88	25	113
8.	Perhubungan	625	402	1.027
9.	Pertanian	79	16	95
10.	P dan K	2.011	474	2.485
11.	Kesehatan	38	9	47
12.	Agama	1.922	289	3.211
13.	Sosial	130	16	146
14.	Naker Transkop	270	35	242
Jumlah :		7.118	2.762	9.880

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau.

Pegawai Departemen Keuangan lebih banyak di daerah KPN Tanjungpinang, yaitu daerah Kabupaten Kepulauan Riau, dibandingkan dengan yang ada dalam lingkungan KPN Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tenaga Departemen Keuangan itu yang diperlukan untuk tenaga bea dan cukai di daerah kepulauan tersebut. Mengenai jumlah Pegawai negeri daerah (otonom) sayang sekali tidak dapat mengetahui jumlahnya, karena sampai saat ini belum dapat diperoleh datanya oleh Kantor dan Statistik Propinsi Riau.

Data mengenai angkatan kerja seperti telah disinggung terdahulu hanya dapat diketahui untuk tahun 1971 saja, yaitu melalui sensus penduduk tahun tersebut mengenai penduduk Riau. Keadaan angkatan kerja dalam tahun-tahun sesudah itu rupanya belum dapat diketahui dengan seksama, karena catatan mengenai hal itu belum dibuat oleh Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau. Disamping itu Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Riau pun belum dapat membantu suatu catatan yang lengkap mengenai hal itu. Karena itu uraian mengenai angkatan kerja di bawah ini akan bertumpu sepenuhnya hanya kepala catatan sensus tahun 1971 tersebut saja. Angkatan kerja tahun 1971 untuk daerah Riau ialah 549.794 jiwa, terbagi atas laki-laki 409.519 orang dan perempuan 140.275 orang. Perbandingan antara angkatan kerja di daerah kota dengan daerah pedesaan ialah 60.638 jiwa untuk daerah kota dan 488.950 jiwa untuk daerah kota dan 488.956 jiwa untuk daerah pedesaan. Dari angkatan kerja sebanyak itu tercatat yang bekerja sebanyak 483.918 orang, atau sekitar 88,0% sedang yang mencari pekerjaan atau yang menganggur sebanyak 65.876 orang, sekitar 11,98%. Golongan yang mencari pekerjaan terdiri dari yang pernah bekerja sekitar 47.229 orang dan pencari pekerjaan pertama kali sebanyak 18.647 orang. Angkatan kerja sebanyak 549.794 itu merupakan lebih kurang 49,83% dari jumlah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Penduduk yang berumur 10 tahun ke atas seluruhnya dalam daerah Riau ada 1.103.357 orang. Jadi penduduk yang berumur 10 tahun ke atas bukan angkatan kerja ada sebanyak 554.463 orang, atau merupakan sekitar 50,17%.

Sebagaimana keadaan angkatan kerja menurut kabupaten dan kotamadya dalam daerah Riau dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel II. 9. Penduduk berumur 10 tahun ke atas, diperinci menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja dalam kabupaten/Kotamadya di Propinsi Riau dalam tahun 1971.

No.	Kab. Kotamadya	Angkatan Kerja			Bukan angkatan kerja	pekerja terhadap angkatan kerja	Angkatan Kerja terhadap pend. 10 th ke atas	
		Pekerja	mencari pekerjaan					Jumlah
			Jumlah	Untuk pertama kali.				
1.	Kampar	83.355	17.609	5.781	100.964	73.261	82.559	57.950
2.	Indragiri Hilir	76.668	17.807	2.508	94.475	95.157	81.152	49.820
3.	Bengkalis	122.938	8.404	2.933	131.342	153.547	93.601	46.103
4.	Indragiri Hulu	70.193	9.430	1.739	79.623	50.842	88.197	61.030
5.	Pekanbaru	34.434	6.111	3.716	40.545	55.722	84.928	42.117
	Jumlah	483.918	65.876	18.647	549.794	533.563	88.018	49.829

Sumber : Sensus Penduduk 1971 Penduduk 1971 Penduduk Riau

Dari Tabel di atas dapat dilihat pekerja, pencari kerja, bukan angkatan kerja, serta beberapa persentasi lainnya, dalam setiap kabupaten dan kotamadya dalam Propinsi Riau. Dari tabel ini kelihatan bahwa persentasi yang tinggi dari angkatan kerja terhadap penduduk berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu sebesar 61.030. Ini berarti kabupaten tersebut mempunyai partisipasi angkatan kerja yang tertinggi. Tingginya persentasi angkatan kerja terhadap penduduk berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten INHU, besar kemungkinan ada hubungannya dengan mata pencaharian penduduk, yang umumnya menjadi petani karet. Karena pekerjaan sebagai petani karet relatif tidak menuntut kemampuan dan tingkat pendidikan yang tinggi, maka banyak penduduk berumur 10 tahun ke atas dengan mudah dapat bekerja sebagai petani karet. Tetapi kenyataan yang demikian juga telah berakibat lain bagi penduduk umur 10 tahun ke atas di daerah tersebut, telah menyebabkan makin besarnya peluang bagi penduduk berumur 10 tahun ke atas untuk tidak melanjutkan sekolahnya.

Karena anak sekolah yang berumur 10 tahun ke atas itu dengan mudah dapat menjadi petani karet, maka manakala ia mendapatkan kesulitan atau memperoleh pengaruh dari teman-temannya yang sudah memotong atau menyadap karet, dengan mudah saja mereka berhenti melanjutkan sekolahnya. Hal ini akan kelihatan betapa banyaknya anak-anak sekolah di daerah ini, yang kebanyakan bersekolah sampai kelas 4 SD atau paling tinggi kelas 5 SD, kemudian berhenti dan hidup sebagai petani karet.

Pada tahun-tahun sebelum 1960, kecenderungan penduduk untuk menjadi petani karet, sehingga juga banyak menggoda anak-anak sekolah untuk berhenti melanjutkan sekolahnya, disebabkan oleh harga karet yang mahal dewasa itu. Kehidupan petani karet saat itu, lebih-lebih daerah kepulauan Riau yang masih memakai uang dolar Inggris, memang terasa cukup baik. Hal ini banyak menggoda anak sekolah untuk berhenti bersekolah, karena memandang sudah cukup hidup menjadi petani karet saja.

Keadaan dewasa ini, bukan oleh harga karet yang mahal, tetapi karena keadaan ekonomi yang cukup parah di daerah petani karet alam itu. Kesulitan ekonomi yang makin berat oleh karena berbagai masalah mengenai karet alam ini yang belum mendapat perbaikan dari pemerintah, menyebabkan banyak sekali penduduk dari daerah Kabupaten Indragiri Hulu tidak mampu lagi membiayai anak-anaknya, untuk bersekolah lebih dari Sekolah Dasar saja. Karena itu anak-anak yang putus sekolah oleh keadaan ekonomi orang tuanya itu, banyak yang menjadi petani karet, meskipun ini diterima dengan keadaan terpaksa.

Persentasi pekerja terhadap angkatan baru yang tertinggi ialah di Kabupaten Kepulauan Riau dan kabupaten Bengkalis, masing-masing secara berurutan 93,665% dan 93.601%. Dengan demikian daerah kepulauan Riau dan Bengkalis merupakan daerah yang terendah tingkat penganggurannya, hanya sekitar 6,3%. Rendahnya tingkat pengangguran ini, besar kemungkinan karena dua daerah ini secara relatif lebih banyak memberi kemungkinan-kemungkinan akan bermacam mata pencaharian terhadap penduduknya, misalnya dalam bidang perikanan, tentulah masih terbuka kesempatan yang luas bagi penduduk untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Bagi Kabupaten Kepulauan Riau, adanya proyek pulau Batam tambang boksit Bintan dan tambang timah pulau Singkep, serta beberapa percobaan pemboran minyak lepas pantai

dewasa ini tentu juga memberi banyak peluang terhadap lapangan pekerjaan bagi penduduknya.

Persentasi tingkat pengangguran yang tinggi ialah di Kabupaten Indragiri Hilir, sekitar 19,9%, karena hanya mempunyai persentasi pekerja terhadap angkatan kerja sebesar 81,152%. Karena angka-angka perhitungan ini adalah hasil sensus penduduk tahun 1971, maka tingginya tingkat pengangguran di daerah kabupaten ini, mungkin juga dipengaruhi oleh faktor harga kopra yang sangat merosot dalam tahun tersebut. Kita kenal, bahwa penduduk daerah Kabupaten Indragiri Hilir itu sebagian besar berupa petani kopra. Persentase angkatan kerja terhadap penduduk di daerah Propinsi Riau ialah 49,829%. Dengan persentasi pekerja terhadap pekerja sebesar 88,018%, maka tingkat pengangguran di Propinsi ini ialah sebesar sekitar 12%.

Kalau kita perhatikan golongan penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mencari pekerjaan di Propinsi Riau dalam tahun 1971, ternyata yang terbanyak ialah di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 17.807 orang, disusul kemudian oleh Kabupaten Kampar sebanyak 17.609 orang.

Jika kita perhatikan lagi catatan lain lebih lanjut dalam hasil sensus penduduk tahun 1971 mengenai penduduk Riau dalam masalah pengangguran, maka tampak bahwa sebagian besar dari golongan yang mencari pekerjaan itu ialah dari lapangan pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Mereka yang menganggur dalam lapangan pekerjaan di Riau tahun 1971 itu ada sebanyak 29.872 orang, diantaranya dari Kabupaten Indragiri Hilir (yang terbanyak) sejumlah 13.332 orang dan Kabupaten Kampar sebanyak 8.097 orang. Keadaan pengangguran ini lebih seksama dapat dilihat dalam setiap kabupaten dan kotamadya dalam lapangan pekerjaan, diperlihatkan oleh tabel berikut ini :

Tabel II. 10. Penduduk yang mencari pekerjaan menurut kabupaten/Kotamadya dan lapangan pekerjaan dalam Propinsi Riau tahun 1971.

No.	JENIS PEKERJAAN	Kabupaten/Kodya				
		1. Kampar	2. Indragiri Hilir	3. Bengkalis	4. Kep. Riau	5. Indragiri Hilir
1.	Pertanian dll.	8.097	13.332	1.810	2.064	4.379
2.	Peertambangan dan galian.	33	0	159	204	252
3.	Industri pengolahan	158	49	697	189	84
4.	Listrik, gas dan air	0	0	0	0	0
5.	Bangunan	106	0	18	132	126
6.	Perdagangan, rumah makan dan hotel.	954	346	347	65	795
7.	Angkutan penyimpanan dan komunikasi	158	0	104	66	63
8.	Kuangan asuransi dan lain-lain	0	0	12	5	0
9.	Jasa-jasa kemasyarakatan.	867	50	592	864	1.176
10.	Kegiatan yang tidak/belum jelas	1.435	1.522	11.699	956	816
11.	Mencari pekerjaan untuk pertama kali.	5.781	2.508	2.933	1.970	1.739
Jumlah :		17.609	17.807	8.409	6.515	9.430

Seperti digambarkan dalam tabel di atas, mereka yang mencari pekerjaan untuk pertama kali tercatat yang terbanyak ialah di Kabupaten Kampar sebanyak 5.716 orang. Angkatan yang terendah terdapat pada Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 1.739, kemudian disusul oleh Kabupaten Kepulauan Riau sebanyak 1.970 orang.

### C. PERKEMBANGAN PENDUDUK

Jumlah penduduk Daerah Tingkat I Riau tahun 1930, 1961, dan 1976 sebagai berikut :

1. Volstelling 1930 : 493.000 jiwa<sup>10)</sup>
2. Sensus penduduk tahun 1961 : 1.234.964 jiwa<sup>11)</sup>
3. Sensus penduduk tahun 1971 : 1.646.225 jiwa
4. Catatan kantor sensor dan Statistik Riau tahun 1976. : 1.851.468 jiwa

Jika dibandingkan hasil sensus penduduk tahun 1961 dengan sensus penduduk tahun 1971 untuk daerah Propinsi Riau, maka perkembangan penduduk Riau rata-rata setiap tahun naik 2,88%<sup>12)</sup> Perkembangan penduduk dengan kecepatan rata-rata 2,88% ini lebih cepat dibandingkan dengan angka pertumbuhan penduduk Indonesia, yang menurut hasil sensus penduduk tahun 1961 dan 1971, diperkirakan mempunyai perkembangan penduduk dengan kecepatan rata-rata 2,08% setiap tahun. Daerah dengan angka perkembangan penduduk yang tertinggi di daerah Riau ialah Kotamadya Pekanbaru. Rata-rata laju perkembangan penduduknya setiap tahun naik 7,50%<sup>13)</sup> Hal ini diduga ada hubungannya dengan jumlah perpindahan ke ibu kota propinsi ini dari bekas ibu kota yang lama yaitu Tanjungpinang ke yang baru Pekanbaru, yang pelaksanaannya antara tahun 1960 sampai 1971. Dengan proses kepindahan ibu kota tersebut, maka Kotamadya Pekanbaru mendapat penambahan penduduk setiap tahun yang cukup berarti. Dalam masa-masa perpindahan ibu kota propinsi tersebut penambahan penduduk kota ini menanjak pesat, terutama dari tahun 1969 ke tahun 1970. Dalam tahun 1969 penduduk kota Pekanbaru 117.470 jiwa, tapi dalam tahun 1970 sudah menanjak menjadi 132.068 jiwa. Kemudian lonjakan yang kuat lagi sesudah proses perpindahan ibu kota itu terjadi lagi dalam tahun 1972 ke tahun 1973. Dalam tahun 1972 penduduk Kotamadya Pekanbaru berjumlah sebanyak 145.489 jiwa, dan tahun 1973 bertambah menjadi 156.686 jiwa. Pertambahan penduduk yang cepat dalam tahun 1972 ketahun 1973 itu diduga ada hubungannya dengan banyaknya pendatang baru ke Pekanbaru, karena ibu kota yang baru itu memberi daya tarik kepada pencari kerja yang baru, yang menduga bahwa tentulah dalam saat yang demikian masih banyak terbuka lapangan kerja di kota itu. Disamping harapan yang demikian, kota Pekanbaru dibandingkan dengan ibukota yang dahulu Tanjungpinang jauh lebih mudah dicapai dengan beberapa jaringan perhubungan, dari arah Utara Barat, Timur dan Selatan. Kemudian derasnya pertambahan penduduk dalam tahun 1973 itu masih erat pula hubungannya dengan

---

10) Lihat *Indicator Ekonomi*, Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau, Januari-Mei 1972, halaman.

11) *Ibid.* 12) Harto Nurdin mencatat perkembangan pendudukan Riau dalam dasawarsa 1961 - 1971 itu 2,89%

13) Lihat Harto Nurdin *opcit* halaman 1, juga ulasan singkat Penduduk 1971 Propinsi Riau, *opcit*.

pendatang baru berupa buruh kayu balok, sebab iklim perusahaan kayu balok dalam tahun itu cukup baik di daerah Riau. Mereka yang datang sebagai pekerja dalam usaha kayu balok tersebut sebagian besar berasal dari tenaga-tenaga yang relatif rendah kemampuan dan tingkat pendidikannya.

Kabupaten yang paling rendah tingkat perkembangan penduduknya berdasarkan sensus penduduk tahun 1961 dan 1971 ialah kabupaten Indragiri Hulu. Rata-rata pertambahan penduduknya tiap tahun ialah sebanyak 1,25%.<sup>14)</sup> Sesudah itu perkembangan penduduk rata-rata 1,75% setahun dari Kabupaten Kepulauan Riau. Bagaimana tingkat perkembangan penduduk dalam beberapa kabupaten dan kotamadya di Riau dalam dasawarsa 1961 - 1971 tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

1.493.885 jiwa. Rata-rata anak yang dilahirkan hidup di daerah kota ialah 4.080 di daerah pedesaan 4,28. Angka rata-rata untuk anak yang dilahirkan hidup untuk daerah Propinsi Riau ialah 4,35. Rata-rata anak yang dilahirkan hidup di daerah kota dengan angka yang tertinggi ialah untuk umur ibu 45 - 49 tahun, yaitu 6,611. Keadaan itu didaerah pedesaan yang tertinggi ialah pada umur ibu 40-44 tahun sebesar 6,201. Angka rata-rata anak yang dilahirkan hidup untuk daerah pedesaan yang tertinggi terdapat pada umur ibu 40-44 tahun, sebesar 6,22. Jumlah anak yang masih hidup di daerah kota ada 143.402 jiwa, di daerah pedesaan sebanyak 989.589 jiwa, semuanya 1.132.991 jiwa. Jumlah anak yang masih hidup di daerah kota terdapat yang terbanyak pada umur ibu 30-34 tahun, sedangkan di pedesaan 4,28. Angka rata-rata untuk anak yang dilahirkan hidup untuk daerah Propinsi Riau ialah 4,25. Rata-rata anak yang dilahirkan hidup untuk daerah Propinsi Riau ialah 4,25. Rata-rata anak yang dilahirkan hidup di daerah kota dengan angka yang tertinggi ialah untuk umur ibu 45-49 tahun, yaitu 6,611. Keadaan itu di daerah pedesaan yang tertinggi ialah pada umur ibu 40-44 tahun sebesar 6,201. Angka rata-rata anak yang dilahirkan hidup untuk daerah kota dan daerah pedesaan yang tertinggi terdapat pada umur ibu 40 - 44 tahun, sebesar 6,22. Jumlah anak yang masih hidup di daerah kota ada 143.402 jiwa, di daerah pedesaan sebanyak 989.589 jiwa, semuanya 1.132.911 jiwa. Jumlah anak yang masih hidup di daerah kota

---

14) Ulasan singkat Penduduk 1971 Propinsi Riau. *opcit.*

terdapat yang terbanyak pada umur ibu 30-34 tahun, sedangkan di pedesaan terdapat pada umur ibu 35 – 39 tahun. Rata-rata jumlah anak yang masih hidup di kota ada 3,377 di daerah pedesaan 3.207, untuk kota dan pedesaan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup ialah 3,228.

Tabel II. 11 Jumlah penduduk propinsi Riau tahun 1961 – 1971 menurut daerah tingkat II

No.	Daerah tingkat II	Banyaknya penduduk		Rata-rata perkembangan penduduk tiap tahun
		1961 (x 1000)	1971 (x 1000)	
1.	Ktmd. Pekanbaru	71	145	7,50%
2.	Kab. Kampar	209	259	2,15%
3.	Kab. Bengkalis	299	423	3,50%
4.	Kab. Indragiri Hilir	204	286	3,50%
5.	Kab. Indragiri Hulu	173	197	1,25%
6.	Kab. Kep. Riau	279	331	1,75%
Jumlah :		1.235	1.641	2,88%

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau.

Penduduk perempuan pernah kawin menurut sensus penduduk tahun 1971 mengenai penduduk Propinsi Riau ada sejumlah 351.026 jiwa. Terdiri dari yang berada di daerah pedesaan sebanyak 308.560 jiwa. Jumlah perempuan yang pernah kawin yang berumur 10 – 14 tahun di daerah kota ada sebanyak 99 orang sedang di daerah pedesaan menurut sensus tahun 1971 tersebut ada sejumlah 591 orang. Dari perempuan yang berumur 10-14 tahun tersebut, di daerah kota anak yang dilahirkan hidup tidak ada. Sedangkan di daerah pedesaan tercatat ada sebanyak 110 jiwa. Jumlah perempuan yang pernah kawin yang terbanyak di daerah kota ialah pada umur 25-29 tahun, di daerah pedesaan yang terdapat jumlah terbesar dalam umur tersebut. Jumlah anak yang dilahirkan hidup di daerah kota ada tercatat sebanyak 173.272 jiwa, di daerah pedesaan ada 1.320.613 jiwa. Rata-rata anak yang dilahirkan hidup di daerah kota ialah menurut Harto Nurdin<sup>15)</sup> angka kelahiran kasar selama dasawarsa 1961 - 1971

15) Harto Nurdin, opcit.

untuk daerah Propinsi Riau berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1971 yaitu 47,92 dengan angka kematian kasar 20,15 per seribu. Sedangkan angka pertumbuhan alamiah di daerah ini diperkirakan 2,8%.

Angka fertilitas total 1961 – 1971 menurut perkiraan Lee Jay Cho cs (BPS) untuk daerah Riau adalah 6,130 di daerah kota angka itu berupa 5,960 dan di daerah pedesaan 6,200. Harapan hidup waktu lahir untuk laki-laki diperkirakan 49,33 dan perempuan 52,25. Perkiraan angka kematian bayi terhadap laki-laki ialah 126 perseribu dan perempuan 106 perseribu.<sup>16)</sup>

#### D. MIGRASI

Migrasi dipandang sebagai suatu gerak pindah penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud mencari nafkah dan menetap di sana.<sup>17)</sup> Dalam pengertian seperti itu kita dapat membicarakan macam-macam pendatang yang ingin mencari nafkah dan menetap di daerah Riau. Tapi juga penduduk daerah Riau yang pergi ke luar daerahnya untuk mencari nafkah dan menetap di tempat yang baru itu. Betapapun hal itu dengan mudah dapat kita pisah-pisahkan dan dengan mudah pula dapat kita fahami, namun kenyataannya hal ini amatlah sukar sekali diketahui jumlah mereka yang datang dan jumlah mereka yang pergi. Pembicaraan kita hanya mampu mencari perkiraan kasar atas kesan pandangan mata saja, lantaran catatan-catatan mengenai mereka itu belum dapat dijumpai saat ini, karena lembaga yang bersusah mengenai kependudukan masih belum dapat menjangkau bagaimana arus pendatang dan arus yang pergi tersebut di daerah Riau. Satu-satunya kecamatan di Propinsi Riau yang dijumpai mencatat dengan baik jumlah suku bangsa dan jumlah masing-masing suku pendatang kekecamatannya, ialah Kecamatan Bintan Selatan dalam kawasan Kabupaten Kepulauan Riau.

Berdasarkan catatan Kantor Sensus dan Statistik daerah tingkat I Propinsi Riau, maka dalam tahun 1976 di Riau ada 85.136 jiwa Warga Negara Asing (WNA) yang terdiri dari lebih kurang 8 macam bangsa. Seperti telah disinggung dalam pembicaraan di depan, jumlah terbesar dari suku bangsa asing itu ialah di pihak Cina. Dalam tahun 1976 itu suku bangsa Cina yang tergolong

16) Ibid. 17). Aldian Arifin Dalimuntel "Selayang pandang Mengenai *Perkembangan keimigrasian di Indonesia* alumni Akademi Imigrasi, Akademi Imigrasi, Jakarta, 1964.

WNA saja ada sejumlah 75.591 jiwa, sedang yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) tidak dapat diketahui.

Tapi di Kecamatan Bintang Selatan, jumlah bangsa Cina yang sudah menjadi WNI ada kl. 631, sedang masih WNA sejumlah 7.871 jiwa. Jadi jumlah keturunan Cina di Kecamatan tersebut dalam tahun 1976 ada sebanyak 18.502. Dengan penduduk kecamatan itu sebanyak lebih kurang 51.903 jiwa, maka keturunan Cina dalam kecamatan Bintang Selatan hampir 50%. Kota Tanjungpinang dalam wilayah kecamatan Bintang Selatan, yang menjadi kota Kabupaten Kepulauan Riau, dalam tahun 1976 itu mempunyai WNI Cina sebanyak 7.088 jiwa di samping WNA Cina sejumlah 4.228 jiwa. Penduduk kota Tanjungpinang seluruhnya tahun 1976 ialah 20.582 jiwa. Dengan demikian di kota tersebut dalam tahun tersebut keturunan Cina lebih dari 50%.<sup>18)</sup>

Kedaaan lebih lanjut dalam bangsa asing yang tinggal di daerah Riau ialah sebagai berikut :

Cina	=	75.591	jiwa
India	=	90	jiwa
Jepang	=	1	jiwa
Malaysia	=	19	jiwa
Pakistan	=	6	jiwa
Arab	=	35	jiwa
Belanda	=	3	jiwa
Lain-lain	=	93	jiwa
<hr/>			
Jumlah :	=	85.136	jiwa

Selain dari WNA Cina tidak dapat diketahui dengan jelas lapangan pekerjaan apa yang dimasuki oleh suku-suku bangsa asing itu. Hal ini disamping karena kurangnya catatan mengenai mereka, juga disebabkan oleh jumlah mereka yang amat sedikit, sehingga hampir tidak kelihatan dalam interaksi masyarakat. Bangsa Cina terutama bergerak dalam dua lapangan pekerjaan, yaitu lapangan pekerjaan perdagangan dan penangkapan ikan. Cina yang tinggal di kabupaten Kepulauan Riau dan daerah kota lainnya selain dari daerah Bengkalis kebanyakan hidup dalam lapangan perdagangan. Cina di daerah kabupaten Bengkalis terutama daerah Bagan Siapi-api bekerja dalam lapangan penangkapan ikan.

Mengenai jumlah masing-masing suku pendatang dalam arti suku-suku Indonesia lainnya (selain suku Melayu di Riau) yang datang ke propinsi Riau, juga tidak kita dapatkan angka-angka yang mencatat keadaan kegiatan mereka. Karena sukarnya memperoleh gambaran tentang jumlah dan jenis suku pendatang itu untuk daerah Riau, maka ada baiknya kita perhatikan kembali catatan Kantor Kecamatan Bintan Selatan tahun 1976, yang ketbetulan mempunyai catatan yang agak memadai sekedar memberi gambaran sederhana kepada kita. Dalam kecamatan tersebut tercatat ada 7 macam suku pendatang. Empat macam suku pendatang yang besar jumlahnya lebih dari 1.000 jiwa ialah suku Jawa, suku Bawean dan suku Batak.

Jumlah semua suku pendatang itu ternyata jauh melebihi jumlah suku Melayu yang tinggal di Riau, bahkan jumlah suku Melayu yang tinggal di Riau, bahkan jumlah suku Jawa saja sudah hampir sama jumlahnya dengan suku Melayu di bawah ini diberikan gambaran sederhana bagaimana jumlah suku pendatang tersebut dan bandingannya dengan suku Melayu dalam Kecamatan Bintan Selatan tahun 1976.

Suku pendatang	:	Jawa	17.434 jiwa
		Minang	5.219 jiwa
		Bawean	2.628 jiwa
		Batak	1.695 jiwa
		Bugis	892 jiwa
		Flores	641 jiwa
		Buton	637 jiwa
		Suku lain	2.839 jiwa
<hr/>			
Jumlah suku mendatang			31.985 jiwa
Suku Melayu Riau			19.918 jiwa

Meskipun keadaan Propinsi Riau mengenai gambaran suku pendatang ini tidak akan sama sepenuhnya dengan gambaran dalam kecamatan Bintan Selatan itu, terutama tentu akan berbeda dalam jumlah dan komposisinya, namun keadaan dalam kecamatan Bintan Selatan itu sedikit banyak dapat memberi cermin terhadap keadaan suku pendatang di daerah Riau. Hampir dapat dipastikan, bahwa berdasarkan pengamatan pandangan mata, tiga macam suku pendatang yang besar jumlahnya di Propinsi Riau

ialah : suku Jawa, suku Minang dan suku Batak.

Suku Jawa, besar kemungkinan datang dan bekerja dalam lapangan pertanian, buruh, pegawai dan ABRI. Suku Minang datang ke Riau dengan sebagian besar bekerja sebagai pedagang, di samping itu juga menjadi buruh angkutan dan pegawai negeri. Suku Batak banyak datang ke Propinsi Riau dan memasuki pekerjaan terutama lapangan buruh dan pegawai, dan sedikit dalam bidang pengangkutan. Di samping itu besar kemungkinan suku Bugis dan suku Banjar mempunyai jumlah yang lumayan juga di Riau. Kedua suku ini besar kemungkinan agak berimbang jumlahnya. Suku Bugis datang ke Riau dan mempunyai kesenangan dalam lapangan pelayaran, sedangkan suku Banjar yang mendiami sebagian besar Kabupaten Indragiri Hilir – suatu daerah muara sungai dan pesisir Timur Sumatera – kebanyakan hidup sebagai petani padi.

Sebenarnya mengenai suku Bugis di Riau hendaknya diberi sebuah catatan kecil. Isi catatan itu ialah, bahwa sesungguhnya banyak di antara suku Melayu Riau itu sudah berdarah Bugis. ini terjadi semenjak datangnya ke Riau dalam hal ini Kerajaan Riau beberapa bangsawan Bugis sekitar abad ke-17 dan 18, dan kemudian berhasil memegang kekuasaan dalam kerajaan itu sebagai polisi Yang Dipertuan Muda sedangkan raja dari pihak Melayu Riau yang lama disebut Yang Dipertuan Besar atau Sultan. Tetapi mereka yang merupakan keturunan Bugis tersebut yang sekarang dapat dikenal dari gelar *raja* yang mereka pakai tidak lagi dapat dipandang sebagai orang Bugis, karena mereka tidak lagi memperlihatkan dirinya sebagai suku Bugis dengan segala nilai-nilainya, tetapi sudah merupakan suku Melayu Riau itu sendiri. Mereka juga tidak merasa sebagai suku Bugis lagi, sehingga mereka tidak dapat lagi berbahasa Bugis serta mempunyai tradisi seperti suku Bugis, tapi sudah lebur sepenuhnya dalam suku Melayu Riau.

Dalam masalah migrasi ini masih perlu kiranya kita tambahkan laporan dari Kantor Direktorat Transmigrasi Propinsi Riau di Pekanbaru. Dari kantor ini dapat kita ketahui jumlah suku pendatang dari pihak suku Jawa yang datang ke daerah Riau melalui program transmigrasi. Sampai saat ini jumlah transmigrasi itu sudah menjadi 898 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 4.110. Ini adalah catatan untuk tahun 1970. Mereka

terbagi dalam tiga lokasi penempatan, masing-masing ialah :

**Tabel II.12. Jumlah Penempatan Transmigrasi di Daerah Propinsi Riau, Dari Tahun 1962 sampai tahun (Maret) 1976.**

Tahun	L o k a s i	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah jiwa
1962	Siabu, Kewalian Siabu, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar	58	275
1965	s.d.a.	42	212
1968	Simandolak, Kewalian Taratak Air Hitam Kecamatan Kuantan Tengah	200	866
1971	Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir	150	735
1973/	s.d.a.	150	735
1974			
1974/	s.d.a.	150	615
1975			
J u m l a h		848	3.894

Sumber : Kantor Direktorat Transmigrasi Propinsi Riau.

Suku bangsa asli dalam arti suku yang dari dahulu mendiami daerah propinsi ini, ialah suku Melayu, atau disebut juga suku Melayu Riau. Mereka ini di daerah kepulauan Riau sudah banyak bercampur dalam proses perkawinan dengan suku Bugis, sedang yang tinggal di sepanjang sungai-sungai di Riau sungai Kuantan, sungai Kampar dan sungai Siak banyak bercampur melalui proses perkawinan dengan berbagai suku lainnya. Suku Melayu yang tinggal di daerah Kabupaten Indragiri Hulu banyak bercampur dalam per-

kawinan dengan suku Minang, sedang di Kabupaten Indragiri Hilir suku itu banyak bercampur dalam perkawinan dengan suku Banjar dan Bugis.

Pengamatan melalui pandangan mata terhadap tempat-tempat tinggal mereka, memberi kesan kepada kita, bahwa mereka tidak mempunyai gerak pindah yang berarti dari daerah yang ditempatinya dari dahulu. Dengan perkataan lain mereka masih tetap banyak tinggal daerah pedesaan sepanjang tepi sungai atau di pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau maupun kepulauan Natuna di Indonesia bagian Utara. Mereka tampaknya tidak mempunyai gerak pindah berupa urbanisasi yang berarti, jika ada yang pindah ke kota, itu baru mereka yang mempunyai pendidikan antara SD sampai tingkatan selanjutnya. Kebanyakan di antara mereka, malah makin terdesak dari daerah yang lama, manakala daerah itu dicakup oleh daerah kota. Ini tampak misalnya dalam gejala beberapa perkembangan daerah kota daerah Riau. Di Pekanbaru misalnya, orang Siak (Suku Melayu yang dulu mendiami daerah ini) makin menjauh dari daerah perkotaan itu, sehingga tinggal hanya beberapa kepala keluarga yang sudah mampu mempunyai pencaharian di kota itu. Suku Melayu di Pekanbaru didesak oleh berbagai suku pendatang, di antaranya ialah tiga besar suku pendatang : Jawa, Minang dan Batak.

Di daerah kota Tanjungpinang, suku Melayu terdesak oleh Cina, baik Cina WNI maupun Cina WNA. Dari perbandingan yang kita berikan terdahulu mengenai banyaknya Cina di daerah tersebut tampak, betapa kecilnya lagi jumlah suku Melayu di daerah itu. Sebagai contoh saja, marilah kita lihat tabel di bawah ini, di mana dapat dilihat perbandingan suku Melayu dengan suku lainnya.

**Tabel II.13. Jumlah suku Melayu dalam Kabupaten Bintan Selatan dan Kota Tanjungpinang, dalam tahun 1976.**

No.	Suku Bangsa	Kecamatan Bintan Selatan	Kota Tan- jung- pinang
1.	Melayu	19.918	3.111
2.	Suku Indonesia lainnya	31.985	6.121
3.	Cina WNI	10.631	7.088
4.	Cina Asing	7.871	4.228
5.	WNA selain Cina	35	34
J u m l a h		70.440	20.582

Sumber : Laporan terakhir rekapitulasi penduduk Kecamatan Bintan Selatan II/1976 dan Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

Dari catatan di atas kelihatan betapa makin ciutnya jumlah suku Melayu dari daerah Kecamatan dibandingkan dengan daerah kota, dengan contoh kecamatan Bintan Selatan dan kota Tanjungpinang. Sebenarnya tabel di atas jika diambil untuk perbandingan bagaimana suku keluarga suku Melayu di daerah kota dibandingkan dengan daerah pedesaan tidaklah begitu tepat, sebab Kecamatan Bintan Selatan itu sebenarnya masih hampir 75% terdiri dari daerah kota, yaitu Tanjungpinang sendiri. Namun sekedar memberi cermin kepada kita tentu ada juga faedahnya. Masalah terdesaknya suku Melayu di Riau, terutama dirasakan bukan hanya dalam masalah tempat tinggal itu saja, tapi pertama-tama adalah dalam hal lapangan pekerjaan. Daerah Riau yang dulu merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Tengah, dalam hal pendidikan amatlah jauh ketinggalan dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dengan suku Minang dan suku Batak di kedua daerah tersebut yang mendapat kesempatan banyak memperoleh pendidikan. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan suku Jawa.

Karena pendidikan mereka yang sebagian besar masih rendah dibandingkan dengan pendidikan suku pendatang lainnya (terutama Jawa, Minang dan Batak) maka kesempatan memperoleh pekerjaan di kota — yang umumnya mengutamakan mutu pendidikan tenaga kerja selalu amat kecil bagi mereka. Kalaupun dapat, maka sebagian besar suku Melayu yang bekerja di daerah kota, hanya dapat mencapai kedudukan yang rendah dalam lapangan pekerjaan, sebagai akibat dari tingkat pendidikan tadi. Sebagai contoh dapat dilihat pegawai perusahaan minyak Caltex. Perusahaan minyak ini meskipun mengurus bumi daerah Riau, namun anak Melayu Riau yang bekerja dalam perusahaan itu, mungkin tidak mencapai angka 10 orang. Sebagian besar dari pegawainya ialah suku Jawa, Minang, dan Batak.

Karena keterdesakan suku Melayu dalam lapangan pekerjaan yang sebagian disebabkan oleh masih rendahnya tingkat pendidikan mereka pada umumnya, maka kebanyakan dari mereka bekerjalah sebagai petani karet dan petani kopra. Tapi karena rendahnya tingkat pendidikan dan masih kurangnya bimbingan mengenai pertanian yang dapat diberikan kepada mereka, maka dalam bidang pertanian ini pun mereka tergolong kepada petani yang miskin. Karena cara pengolahan, bimbingan, dan berbagai usaha pembaharuan yang masih belum dapat diberikan atau belum dapat mereka capai, tidak jarang hasil tani mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang minimal. Kalau data mengenai pegawai negeri dan buruh perusahaan dapat memperlihatkan klasifikasi suku, maka niscaya akan tampak betapa kecilnya jumlah suku Melayu yang bekerja dalam bidang tersebut, dibandingkan dengan jumlah mereka semuanya di daerah Riau.

Karena suku pendatang, yang umumnya mempunyai tingkat pendidikan lebih baik dari suku Melayu, serta keuletan yang mungkin lebih tajam pula dari pihak pendatang dibandingkan dengan suku Melayu, maka mereka makin lama makin terdesak dalam lapangan pekerjaan ini. Dalam lapangan perdagangan mungkin suku Melayu tidak dapat menjangkau posisi 20% dari jumlah pedagang semuanya di Riau, sebagian besar dari lapangan itu diambil oleh suku Minang dan Cina. Dalam lapangan angkatan bersenjata, suku Melayu juga tidak berarti, lapangan ini boleh dikatakan hampir dimonopoli oleh suku Jawa. Karena

itu barangkali dapat difahami betapa ada semacam kesan kurang senang dari Melayu terhadap beberapa suku pendatang, karena mereka dalam lapangan pekerjaan dan perbaikan taraf hidup kelihatan makin lama makin jauh ketinggalan dari taraf hidup suku pendatang itu. Dengan demikian perasaan yang demikian akan mudah menjadi suatu solidaritas nasional, jika mereka dapat diusahakan mencapai berbagai lapangan pekerjaan, sehingga taraf hidup mereka makin hari dapat makin mendekati taraf hidup suku pendatang itu.

Sehubungan dengan masalah perbedaan taraf hidup dan kesulitan mendapatkan pekerjaan bagi suku Melayu yang sebagian disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah di pihak mereka, maka barangkali ada baiknya memberi perhatian yang khusus terhadap mereka dalam lapangan pendidikan. Di samping itu dalam masalah para transmigran yang didatangkan ke daerah Riau, perlulah memperoleh perhatian yang lebih seksama lagi, agar suku-suku Melayu yang tinggal di sekitar tempat transmigran itu, tidak begitu melihat betapa perbedaan perlakuan Pemerintah yang amat berbeda antara mereka dengan para transmigran. Betapa mereka tidak akan merasa semacam ini hati terhadap para transmigran itu, mereka yang sudah lama tinggal di daerah tersebut dengan potensi ekonomi yang lemah sebagai akibat berbagai kekurangan yang seharusnya mendapat perhatian Pemerintah juga, tapi tahu-tahu didatangkan suku lain ke sana, kemudian diberi biaya dan bimbingan dalam pertanian sehingga dalam waktu yang relatif singkat, taraf hidup suku pendatang atau transmigran tersebut sudah jauh lebih baik dari taraf hidup mereka. Bahkan tidak jarang terjadi di daerah perkampungan transmigrasi di Simandolak (lihat pembicaraan mengenai transmigrasi) misalnya, sudah banyak suku Melayu yang tinggal di sekitar daerah itu, yang mengambil upah atau menjual tenaganya kepada para transmigrasi itu. Dengan biaya dari Pemerintah yang diberikan terus-menerus dengan didampingi bimbingan, maka hidup transmigran itu mudah jauh lebih baik dari penduduk di sekitarnya. Tidaklah mungkin rasanya dalam pembicaraan mengenai potensi penduduk di Riau ini, kita tidak menyinggung masyarakat terasing di daerah ini. Dalam propinsi Riau ada suku (masyarakat) terasing yang terdapat di daerah Kabupaten Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu dan Kabupaten

Kepulauan Riau. Masyarakat terasing ini dapat dilihat lebih jelas dalam tabel di bawah ini.

**Tabel II.14. Bentuknya masyarakat terasing dalam Propinsi Riau dalam tahun 1976.**

No.	Masyarakat Terasing	L o k a s i	Banyaknya (jiwa)
1.	Masyarakat Sakai	Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis	± 4.253
2.	Masyarakat Akik	Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis	± 1.072
3.	Masyarakat Talang Mamak	Kecamatan Sebarida Kabupaten Indragiri Hulu	± 6.065
4.	Masyarakat Bonai	Kecamatan Kunto Darussalam, Kab. Kampar	± 2.939
J u m l a h			± 15.829

Sumber : Data Dasar Daerah Tingkat I Riau.

Terhadap mereka ini sepanjang keterangan yang kita dapatkan dari Kantor Wilayah Departemen Sosial Propinsi Riau, sudah diberikan pembinaan, dan di antaranya sudah ada yang mempunyai Sekolah Dasar. Suatu hal yang tampaknya perlu diperhatikan dalam usaha membina masyarakat terasing tersebut, ialah bagaimana caranya kita mempunyai pendekatan terhadap mereka, sehingga mereka dalam waktu yang relatif singkat, sudah merasakan terintegrasi ke dalam masyarakat kita. Tampaknya suatu pendekatan dalam bidang kebudayaan, dalam hal ini terutama bahasa dan kesenian mereka, besar kemungkinan cukup berarti untuk diperhitungkan, dalam usaha langkah-langkah memajukan mereka. Bagaimana mereka dapat mempunyai suatu

kesan, bahwa pendidikan itu memang perlu dan berguna bagi mereka masa kini dan lebih-lebih untuk masa depan anak-anak mereka, adalah cukup penting diperhatikan, sehingga mereka mempunyai keinginan untuk memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk memasuki Sekolah Dasar yang didirikan Pemerintah di tempat kediaman mereka.

Migrasi bermusim dalam arti perpindahan penduduk dalam musim-musim tertentu ke daerah Propinsi Riau dengan maksud mencari nafkah, tampaknya boleh dikatakan tidak ada di daerah ini. Hal itu mungkin karena tidak ada lapangan pekerjaan di daerah Riau yang memerlukan tenaga pekerja secara musiman. Yang agak mirip dengan masalah ini agaknya ialah kedatangan beberapa pedagang ke tempat-tempat tertentu, yang ada hubungannya dengan gejala membaiknya taraf hidup ekonomi rakyat dalam waktu-waktu tertentu, sehubungan dengan keadaan iklim pertanian mereka. Dalam hal ini dapat ditunjuk misalnya kedatangan pedagang-pedagang sandang dan barang perhiasan ke daerah pulau-pulau tertentu di pulau Midai, Serasan dan Sedanau (daerah kabupaten Kepulauan Riau) sewaktu di daerah ini terjadi panen cengkeh. Tetapi kedatangan mereka jelas bukan sebagai pekerja untuk memetik cengkeh ke tempat itu. Mereka hanya mengharapkan dengan hasil panen cengkeh yang baik serta harga cengkeh yang tinggi, akan menyebabkan sebagian dari kelebihan pendapatan petani cengkeh itu dibelanjakan oleh petaninya kepada kebutuhan lain seperti pakaian, perhiasan, alat pecah-belah dan sebagainya.

Hal yang mirip lagi dengan gejala semacam itu, ialah datangnya beberapa pedagang biasanya dari Propinsi Sumatera Barat, ke beberapa daerah kota di daerah Riau, terutama ke Pekanbaru, dalam masa-masa menjelang hari raya Idulfitri. Maksud mereka ini sebagian besar juga untuk memperdagangkan bahan pakaian, barang perhiasan, pecah-belah dan bahan-bahan kebutuhan untuk hari raya lainnya. Tapi tampaknya yang datang sebagian besar ialah pedagang penjual pakaian, terutama untuk pakaian anak-anak.

## E. PENDIDIKAN

Data menguasai masalah pendidikan dalam Daerah Tingkat I Propinsi Riau, bukanlah hal yang mudah. Hal itu ada hubungannya

dengan keadaan geografi daerah ini; suatu daerah yang terpisah-pisah oleh lautan, sungai-sungai, dan hutan-hutan sehingga sukar untuk mengetahui keadaan pendidikan di sejumlah daerah yang amat sulit dicapai sarana perhubungan. Suatu laporan mengenai pendidikan misalnya keadaan mengenai sebuah sekolah dasar, dari suatu pulau di kepulauan Natuna (di ujung paling utara sekali dari Indonesia di perairan Cina Selatan) kadangkala satu tahun baru sampai ke Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Riau di Pekanbaru. Karena itulah data yang kita temukan dalam uraian ini, hendaklah dipandang sebagai data yang masih belum lengkap, meskipun data ini sudah merupakan hasil yang maksimal untuk saat ini.

Menurut catatan Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau, dari sumber Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Riau, dalam tahun 1976 yang lalu diketahui mengenai sekolah-sekolah di daerah ini sebagai berikut :

Sekolah Dasar ada	1.217 sekolah dengan	7.091 lokal
SLTP ada	152 sekolah dengan	752 lokal
SLTA ada	57 sekolah dengan	352 lokal

Keadaan sekolah-sekolah itu dapat diperinci lagi lebih lanjut seperti ini :

SD Negeri ada	1.015 sekolah
SD Swasta ada	202 sekolah
SLTP Negeri ada	80 sekolah
SLTP Swasta ada	73 sekolah
SLTA Negeri ada	27 sekolah
SLTA Swasta ada	30 sekolah

Murid sekolah dan guru mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas, dalam tahun 1976 dalam Propinsi Riau mempunyai susunan seperti tabel di bawah ini.

**Tabel II.15. Banyaknya murid dan guru pada SD SLTP dan SLTA dalam Propinsi Riau dalam tahun 1976.**

Sekolah	Murid (orang)	Guru (orang)
S D	213.954	7.010
SLTP	31.746	1.800
SLTA	11.497	1.024
J u m l a h	256.197	9.834

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau.

Jika kita bandingkan jumlah murid sekolah tersebut dengan jumlah penduduk daerah Riau dalam tahun yang sama yaitu tercatat sebanyak 1.851.468 jiwa, maka perbandingan penduduk dengan anak sekolah sekitar 7 : 1. Dalam tujuh orang penduduk terdapat satu orang murid sekolah rata-rata. Selanjutnya kondisi pendidikan dasar dalam Daerah Tingkat I Riau dalam tahun ajaran 1976 menurut catatan Pemerintah Daerah Tingkat I Riau dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel II.16. Perbandingan dan keadaan mengenai beberapa aspek pendidikan dasar dalam daerah Riau, menurut catatan tahun 1976.**

No.	U r a i a n	R a s i o
1.	Penduduk tiap SD	1.633
2.	Murid per SD	169
3.	Kepadatan kelas di daerah kota	37
4.	Kepadatan kelas di daerah pedesaan	30
5.	Kepadatan ruang belajar	43
6.	Murid tiap SD	33
7.	Kelas tiap seorang guru	1,2
8.	Ruang belajar tiap SD	4
9.	Guru tiap SD	5

Sumber : Riau, Pemerintah Daerah Tingkat I Riau.

Tentang lembaga pendidikan dalam daerah Propinsi Riau kita jumpai ada empat buah perguruan tinggi di daerah ini, yaitu Universitas Riau, Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Universitas Islam Riau dan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Universitas Riau (Unri) merupakan perguruan tinggi yang terbesar di antara keempat perguruan tinggi tersebut. Universitas ini sekarang mempunyai enam buah fakultas, yaitu Fakultas Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Perikanan, Fakultas Ilmu Pasti dan Alam, Fakultas Keguruan dan Fakultas Ilmu Pendidikan.

Dalam tahun 1977 ini Unri mempunyai mahasiswa sebanyak 1.441 orang, masing-masing dapat diperinci sebagai berikut :

Fakultas Sosial dan Politik	:	145 orang
Fakultas Ekonomi	:	471 orang
Fakultas Perikanan	:	83 orang
Fakultas Ilmu Pasti Alam	:	55 orang
Fakultas Keguruan	:	346 orang
Fakultas Ilmu Pendidikan	:	241 orang

---

Jumlah : 1.841 orang

Jumlah mahasiswa Universitas Riau tampaknya tidak memperlihatkan pertambahan yang menaik dari tahun ke tahun tetapi sering memperlihatkan gejala yang amat berbeda. Sebagai contoh, dari sejarah perkembangannya dapat dilihat, bahwa sampai tahun 1968, jumlah mahasiswanya tidak pernah mencapai jumlah 1.000 orang. Tetapi dalam tahun 1969 – 1970 mendapat pertambahan lebih dua kali lipat dari sebelumnya. Jumlahnya dalam dua tahun itu berturut-turut lebih dari 2.000 orang mahasiswa. Kemudian sesudah tahun 1970 tersebut sampai saat ini, turun lagi, dan hanya mempunyai mahasiswa tiap tahun berjumlah sekitar antara 1.000 sampai 1.500 orang mahasiswa. Dalam tahun yang lalu 1976, mahasiswa Universitas Riau tercatat ada 1.029 orang, terdiri dari 803 laki-laki dan 226 orang perempuan. Keadaan dalam tahun 1976 itu juga tidak jauh berbeda dengan tahun 1977 sekarang. Melalui data yang dapat diamati dapat disimpulkan, bahwa atas dasar jumlah banyak tidaknya mahasiswa tiap fakultas pada Perguruan Tinggi ini, dapat kita adakan tiga golongan

an, yaitu fakultas yang banyak mahasiswanya, fakultas dengan jumlah sedang, dan Fakultas yang kurang jumlah mahasiswanya.

1. Banyak, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Keguruan.
2. Sedang, Fakultas Sosial dan Politik dan Fakultas Ilmu Pendidikan.
3. Kurang, Fakultas Perikanan dan Fakultas Ilmu Pasti Alam.

Perbandingan mahasiswa dari jenis laki-laki dan perempuan memperlihatkan gambaran yang sama dalam setiap fakultas, semua fakultas mempunyai jumlah laki-laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Fakultas Keguruan merupakan fakultas yang terbanyak mempunyai jumlah perempuan dalam fakultas lainnya. Dalam fakultas ini ada mahasiswa dari jenis perempuan hampir 50% dari jumlah seluruh mahasiswa yang ada. Menyusul sesudah itu fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ilmu Pasti Alam, yang jumlah perempuan dalam seluruh mahasiswanya sekitar 30%. Fakultas yang terendah persentasi jumlah perempuan dalam seluruh jumlah mahasiswanya ialah Fakultas Perikanan, hanya sekitar 12,5%. Bagaimana perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam komposisi mahasiswa Universitas Riau dalam tahun 1976 itu, dapat dilihat dalam tabel ini.

**Tabel II.17. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan dalam komposisi mahasiswa Universitas Riau tahun 1976.**

No.	Fakultas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sosial dan Politik	149	20	169
2.	Ekonomi	236	56	292
3.	Ilmu Pasti Alam	46	14	60
4.	Perikanan	42	4	46
5.	Keguruan	181	79	260
6.	Ilmu Pendidikan	149	53	202
J u m l a h		803	226	1.029

Sumber : Statistik Universitas Riau Semester II tahun 1976.

Memperhatikan lulusan Universitas Riau setiap tahun, dapat dikatakan masih sangat sedikit sekali tenaga sarjana muda yang

dapat dihasilkannya. Universitas yang didirikan dalam tahun 1962 ini, baru tahun 1969 menghasilkan lulusan sarjana lengkap. Angka lulusan yang pernah paling tinggi dijumpai dalam tahun 1974, yaitu 99 sarjana muda dengan 20 orang sarjana lengkap. Dalam tahun 1975 angka itu sangat jauh menurun karena hanya diperoleh lulusan sarjana muda 50 orang dan lulusan sarjana lengkap 5 orang. Dalam tahun 1976 lulusan sarjana muda tinggal 44 orang dengan lulusan sarjana lengkap 14 orang.

Komposisi mahasiswa Universitas Riau menurut suku-suku, tampaknya terdiri dari suku Melayu, Minang, Batak dan Jawa. Suku lain kalau pun ada amatlah tidak berarti jumlahnya. Institut Agama Islam Sultan Syarif Qasim (IAIN Susqa) tahun 1976 tercatat mempunyai jumlah mahasiswa sebanyak 372 orang, terdiri dari 232 laki-laki dan 140 perempuan. Institut ini dengan tiga fakultas mempunyai susunan mahasiswa sebagai berikut :

**Tabel II.18. Banyaknya mahasiswa IAIN Susqa tahun 1976.**

No.	Fakultas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Syariah	89	43	132
2.	Tarbiah	90	82	172
3.	Ushuluddin	53	15	68
Jumlah		232	140	372

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau.

Tampak jumlah mahasiswa dari kalangan perempuan dalam perguruan tinggi ini lebih tinggi persentasinya dibandingkan dengan Universitas Riau. Dalam Fakultas Tarbiah, perbandingan laki-laki dan perempuan hampir seimbang. Dengan jumlah mahasiswa yang masih di bawah jumlah 500 orang, maka peranan IAIN Susqa dalam bidang ilmu pengetahuan dan penyediaan tenaga sarjana berpendidikan agama Islam, masih belum begitu dirasakan. Agaknya lapangan pekerjaan yang dirasakan relatif sempit bagi lulusan IAIN dewasa ini, juga telah menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya arus pelajar-pelajar memasuki institut itu.

Ini tampak sebagai ilustrasi, betapa banyaknya tamatan PGA Negeri 6 tahun di daerah Riau, yang berusaha berkisar haluan, memasuki Universitas Riau dalam beberapa fakultas yang dapat menerima mereka. Padahal mereka tentulah lebih banyak diharapkan memasuki IAIN di Pekanbaru.

Universitas Islam Riau (UIR), yang banyak memasukinya ialah mahasiswa yang sudah bekerja, terutama mereka yang bekerja sebagai guru agama, dan pegawai Departemen Agama di daerah Riau.

Mengenai komposisi mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Pekanbaru, sayang tidak dapat kita kemukakan angka-angka yang pasti. Tapi sepanjang perhatian kita, jumlahnya tidak jauh berkisar dari 300 orang. Mereka ini kebanyakan merupakan tugas belajar dari beberapa kantor kecamatan dan kantor bupati atau kotamadya di dalam Propinsi Riau. Penerimaan mahasiswa APDN ini tentu banyak ditentukan oleh permintaan tenaga dalam bidang tersebut di daerah Riau. Dari uraian di atas dapatlah kita lihat bagaimana kegita Perguruan Tinggi yang telah kita lihat sebagai lembaga pendidikan tinggi di daerah Riau. Komposisi ketiga perguruan tinggi itu secara keseluruhan ialah sebagai berikut :

**Tabel II.20. Banyaknya mahasiswa dalam tiga perguruan tinggi dalam daerah Propinsi Riau diperinci menurut jenis kelamin, tahun 1976.**

No.	Perguruan Tinggi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Universitas Riau	803	226	1.029
2.	IAIN Susqa	232	140	372
3.	Universitas Islam Riau	443	102	545
Jumlah		1.478	468	1.946

Mengenai hal tingkat buta huruf di daerah Riau, menurut sensus penduduk tahun 1971 tentang penduduk Riau, terdapat

sebanyak 374.451 orang yang masih buta huruf, atau sekitar 33,93% dari jumlah penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Berdasarkan catatan hasil sensus tahun 1971 tersebut, kelihatan jumlah terbesar penduduk yang buta huruf terdapat di kabupaten Bengkalis, yaitu sebanyak 107.593 orang, atau sekitar 37,767%. Tapi tingkat persentase yang tertinggi di daerah Riau mengenai buta huruf terdapat di daerah Kabupaten Kepulauan Riau, yaitu 40,522% atau sebanyak 92.343 orang. Tingginya persentase tingkat buta huruf dalam dua kabupaten tersebut barangkali juga disebabkan oleh keadaan geografinya. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang daerah-daerahnya banyak terpisah-pisah oleh aliran sungai, selat, hutan dan rintangan alam lainnya, sehingga hubungan ke daerah-daerah pedesaan satu-satunya hanya memakai jalan air. Begitu pula halnya Kabupaten Kepulauan Riau, yang daerahnya terdiri dari sejumlah pulau-pulau sampai kepada kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan, hingga amatlah sukar dihubungi untuk memperoleh kontak-kontak dengan pihak luar. Hal ini menyebabkan banyak sekali menghalangi bagi proses pemberantasan buta huruf.

Keadaan geografi yang relatif terisolir dari daerah-daerah sekitarnya, yang menyebabkan sedikit sekali mendapat kontak-kontak sosial budaya, memberi kesan kepada penduduk di daerah ini, bahwa kepandaian membaca dan menulis tidak ada gunanya bagi mereka.<sup>19)</sup> Karena itu banyak penduduk yang tidak mempergunakan kesempatan dalam pemberantasan buta huruf. Dalam tahun 1975 menurut catatan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Riau, jumlah penduduk buta huruf berumur 13 tahun ke atas ada sebanyak 301.549 orang. (Penduduk Riau tahun itu ialah sebanyak 1.797.875 jiwa). Dibandingkan dengan jumlah buta huruf tahun 1971, jumlah ini menurun sekitar seperujuh atau berkurang sekitar 72.903 orang.

Mengenai anak usia sekolah oleh Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Riau diklasifikasi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok usia sekolah SD umur 7 – 12 tahun, usia sekolah SLTP 13 – 15 tahun dan kelompok usia sekolah SLTA umur 16 – 18 tahun. Secara keseluruhan angka-angka penduduk usia sekolah itu memperlihatkan gejala yang selalu bertambah dalam catatan tiga tahun terakhir ini. Tahun 1975 mereka semuanya ada sejumlah 567.311 orang, tahun 1976 sebanyak 583.207 orang dan

tahun 1977 telah menjadi 600.551 orang. Kelompok usia sekolah untuk tingkat SD merupakan kelompok yang mempunyai jumlah terbesar, kemudian baru disusul oleh kelompok SLTP dan SLTA. Gambaran lebih terperinci tentang usia sekolah itu ialah dalam gambaran tabel di bawah ini.

19). Lihat A. Suryadi, *Pembangunan Masyarakat Desa*, Penerbit Alumni, Bandung, 1975.

**Tabel II.21. Penduduk usia sekolah dalam Propinsi Riau, diperinci menurut tingkat pendidikan dan umur, dalam tahun 1975 – 1977.**

No.	Usia Sekolah	P e n d u d u k		
		1975	1976	1977
1.	SD 7 – 12 tahun	314.368	323.177	332.788
2.	SLTP 12 – 15 tahun	129.729	133.363	137.329
3.	SLTA 16 – 18 tahun	123.214	126.667	130.434
J u m l a h		567.311	583.207	600.551

Sumber : Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Riau.

## F. KEBUDAYAAN.

Mengenai kegiatan seni budaya, banyak kelompok kegiatan seni budaya di daerah pedesaan yang biasanya memang tidak memberi nama kepada kelompok mereka. Kegiatan kelompok seni budaya yang tidak mempunyai nama kelompoknya antara lain teater tradisional randai dan kelompok seni bunyi-bunyian tasar (semacam gamelan di Jawa). Di kabupaten Indragiri Hulu hampir tiap kampung mempunyai kelompok randai dan rarak, bahkan ada kampung atau kenagarian yang mempunyai dua sampai lima

kelompok rarak maupun randai. Wilayah Departemen P dan K tahun 1977 ini hanya dapat mencatat 124 organisasi seni budaya dengan lebih kurang 1.950 orang anggota. Catatan itu hanya meliputi tiga jenis kegiatan seni budaya : musik, teater dan tari. Gambaran dari catatan mereka itu ialah sebagai berikut :

**Tabel II.22. Beberapa organisasi kesenian yang dapat dicatat di Riau, tahun 1977.**

No.	Jenis Kesenian	Banyaknya organisasi	Banyaknya anggota (orang)
1.	Musik	89	1.349
2.	Teater	21	537
3.	Tari	4	64
J u m l a h		124	1.950

Sumber : Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Riau Bidang Kesenian.

Secara keseluruhan kegiatan kesenian terutama di daerah pedesaan, belumlah mempunyai tempat pertunjukan yang tertentu. Tempat-tempat yang mereka ambil biasanya hanya : lapangan, halaman rumah penduduk, rumah penduduk, atau di atas perahu serta jalur (di sungai Kuantan Indragiri Hulu). Kegiatan seni budaya dalam kategori modern misalnya dalam seni musik dan teater, tampaknya belumlah begitu banyak di daerah ini, masih merupakan kegiatan seni budaya dalam kategori tradisional (termasuk yang klasik).

## G. KESEJAHTERAAN DAN KESEHATAN.

Berdasarkan data yang dapat kita peroleh, kesejahteraan dan kesehatan penduduk Propinsi Riau belumlah memadai keadaan-

nya. Hal itu bukan hanya disebabkan oleh masih kurangnya tenaga bidang kesehatan dan sarana seperti rumah sakit dan puskesmas, tapi juga karena tingkat pendidikan penduduk yang relatif masih rendah, hingga masih belum mengetahui dan menghayati apa artinya kesehatan dalam kehidupan mereka. Jika kita perhatikan jumlah sarana untuk kesehatan penduduk dari tahun 1969 – 1974, jelas sekali betapa daerah ini tidak mempunyai kemajuan yang berarti dalam peningkatan jumlah sarana tersebut. Paahal tingkat kebutuhan masyarakat tiap tahun makin jaun meningkat.

**Tabel II.23. Keadaan sarana kesehatan dalam Daerah Tingkat I Riau dalam tahun 1969 – 1974.**

Periode	Rumah Sakit	Balai Pengobatan	BKIA	Puskesmas	Sekolah Kejuruan
1969	14	94	72	—	2
1970	14	94	76	1	3
1971	14	90	69	6	3
1972	114	84	66	17	3
1973	7	76	63	20	3
1974	7	84	49	35	3

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau.

Dari tabel di atas kelihatan jumlah rumah sakit berkurang. Meskipun menurut keterangan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Riau, beberapa rumah sakit dijadikan puskesmas saja, namun ini dalam mutu dan jumlah pelayanan tetap akan memberikan tingkat yang menurun, karena perawatan dan pengobatan jauh lebih baik di rumah sakit dibandingkan dengan puskesmas. Balai pengobatan dan BKIA bukan bertambah dari tahun ke tahun, tapi berkurang, sedang Puskesmas tentulah hanya sebenarnya bertambah sedikit saja. Rumah Sakit yang 7 buah itu dalam 1977 ini tercatat hanya mempunyai tempat tidur sebanyak 456 buah. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Riau tahun 1977 ini yang sudah berjumlah 1,8 juta lebih, tentulah

dapat dibayangkan bagaimana kamar tidur sebanyak itu dapat menampung kebutuhan penduduk. (Dari tahun 1973 sampai saat ini jumlah rumah sakit tersebut belum mendapat tambahan).

Demikianlah keadaan sarana kesehatan sampai tahun 1977 ini meskipun tidak dapat diberikan dengan gambaran yang terperinci, tapi pada pokoknya tidak jauh berbeda dengan keadaan tahun 1974 itu. Bagaimana keadaan sarana kesehatan itu dalam tiap daerah tingkat II, dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel II.24. Banyaknya sarana kesehatan tiap daerah tingkat II dalam Propinsi Riau, keadaan tahun 1975.**

No.	Daerah	Rumah Sakit	Puskesmas	BKIA	Balai Pengobatan	Sekolah Kejuruan
1.	Pekanbaru	1	4	8	1	2
2.	Kampar	1	9	6	17	—
3.	Indragiri Hulu	1	8	2	15	—
4.	Indragiri Hilir	1	9	6	12	—
5.	Bengkalis	2	12	2	20	—
6.	Kepulauan Riau	1	10	6	26	1
Jumlah		7	52	30	91	3

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau.

Walaupun di Kabupaten Kepulauan Riau tampak jumlah sarana kesehatan lebih banyak dari daerah lain, hal itu belumlah dapat diartikan daerah ini mempunyai kemungkinan yang lebih baik atau lebih banyak daerah ini yang terdiri dari beratus-ratus pulau yang terpisah satu sama lain oleh lautan, belumlah akan memadai dengan jumlah sarana yang sebanyak itu. Mengenai tenaga dokter dan paramedis dalam tahun 1974 dan 1975 sebagai dua catatan terakhir yang dapat dicapai, dapat dilihat dalam tabel di bawah.

**Tabel II.25. Banyaknya dokter dan paramedis dalam propinsi Riau tahun 1974 dan 1975.**

No.	Dokter/paramedis	1974	1975
1.	Dokter spesialis	4	4
2.	Dokter Umum	48	62
3.	Dokter Gigi	7	6
4.	B i d a n	110	106
5.	Perawat	66	65

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau.

Meskipun terhadap data di atas belum dimasukkan data ABRI dan rumah sakit swasta, tapi untuk fihak itu hendaklah diingat bahwa jumlahnya amatlah kecil, dan itu pun boleh dikatakan hanya terdapat di Pekanbaru saja. Marilah kita ikuti tabel di bawah ini untuk melihat penyebaran tenaga dokter dan paramedis itu dalam tiap daerah tingkat II Propinsi Riau.

**Tabel II.26. Penyebaran dokter dan paramedis dalam daerah tingkat II Propinsi Riau tahun 1975.**

No.	Daerah Tingkat II	Dokter spesia- lis	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Perawat
1.	Pekanbaru	4	11	2	23	20
2.	Kampar	—	6	1	14	6
3.	Indragiri Hilir	—	5	—	20	8
4.	Indragiri Hulu	—	8	—	8	7
5.	Bengkalis	—	16	1	17	16
6.	Kepulauan Riau	—	3	1	5	15
Jumlah		4	62	6	106	70

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau.

Meskipun ke dalam gambaran tabel di atas belum termasuk data dari ABRI dan swasta, tapi mengingat pelayanan kesehatan ini ditanggulangi oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan, maka gambaran di atas dapat memberikan gambaran yang memadai kepada kita untuk mendapatkan kesan bagaimana keadaan pelayanan kesehatan ini di daerah Riau. Tampak kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir, tidak punya dokter-gigi, dan selain dari Kotamadya Pekanbaru daerah lain tidak punya dokter spesialis. Mengenai pendidikan tenaga medis, di daerah Riau belum ada Fakultas Kedokteran. Bahkan untuk pendidikan bidan saja, sampai tahun 1977 ini masih mengharapkan kebaikan daerah lain, di antaranya Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Marilah kita perhatikan tabel berikut, bagaimana rasio dokter dan paramedis dibandingkan dengan jumlah penduduk tiap daerah tingkat II. Akan tampak betapa tenaga bidang kesehatan ini benar-benar sangat kurang. Rasio terendah untuk dokter terhadap penduduk dalam daerah tingkat II dan Rasio terendah untuk dokter terhadap penduduk dalam daerah tingkat II hanya baru 1 :10 ribu, berarti dalam 10 ribu penduduk hanya ada 1 orang dokter yang akan melayani kebutuhan perawatannya.

**Tabel II.27. Rasio Dokter dan paramedis terhadap penduduk dalam Daerah Tingkat I Riau, keadaan tahun 1975.**

No.	Daerah Tk. II	Rasio dokter spesialis terhadap penduduk	Rasio dokter gigi terhadap penduduk	Rasio bidan terhadap penduduk	Rasio perawat terhadap penduduk
1.	Pekanbaru	1:10.110	1:75.835	1:3.157	1:7.583
2.	Kampar	1:49.696	1:298.177	1:10.735	1:49.696
3.	Indragiri Hulu	1:40.377	1:	1:11.478	1:25.236
4.	Indragiri Hilir	1:38.644	1:—	1: 7.550	1:38.644
5.	Bengkalis	1:30.302	1:484.825	1:13.609	1:69.261
6.	Kep. Riau	1:27.091	1:352.186	1:10.013	1:23.012
7.	Dati I Riau	1:30.473	1:359.575	1: 8.835	1:27.660

Tentang penyakit menular menurut perkiraan kasar, Daerah Riau masih merupakan daerah yang cukup rawan bagi penyakit itu. Meskipun Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Riau, mencoba memberi beberapa angka-angka tentang jumlah korban, namun kita yakin angka-angka itu belumlah memadai, karena masih banyak angka korban yang terdapat di desa-desa yang tentu tidak dapat diberikan catatannya dengan baik. Sungai-sungai yang dipakai sebagai tempat mandi, tempat pembuangan sampah, tempat pembuang kotoran atau WC, dan sekaligus dipakai pula sebagai sumber air minum, dan daerah pedesaan yang penuh dengan rawa-rawa serta dikelilingi hutan, merupakan faktor penting bagi penyebab meluasnya serangan penyakit menular. Menurut Kantor Wilayah Kesehatan Propinsi Riau, dalam tahun 1972 – 1973 dapat dibuat dan diklasifikasikan penyakit di daerah Riau, yaitu penyakit menular dan penyakit rakyat. Dalam pembagian itu dapat pula dilihat beberapa catatan persentase penderita.

Penyakit rakyat		Penyakit menular
1. Saluran pernafasan	11,75%	1. cacar
2. kulit	18,49%	2. kolera
3. Malaria	8,41%	3. demam berdarah
4. perut	5,5%	
5. defisiensi	7,5%	
6. mata	6,1%	
7. tbc	6%	
8. cacing	3,2%	

Dalam tahun 1972 – 1973 itu timbul demam berdarah, yang meliputi tiga tempat :

1. Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Bengkalis, penderita 456 orang, meninggal 3 orang.
2. Kecamatan Dumai Kabupaten Bengkalis penderita 76 orang, meninggal 6 orang.
3. Pekanbaru, penderita 136 orang, meninggal 13 orang.

Kalau kita perhatikan lagi dari kantor tadi catatan mengenai penyakit menular tahun 1976 yang lalu, maka beberapa penyakit yang cukup banyak menyerang ialah : influenza, diartroca, mala-

ria, tbc, patek dan penyakit kelamin. Gambaran secara menyeluruh ialah sebagai berikut :

**Tabel II.28. Banyaknya penderita penyakit menular tiap daerah tingkat II dalam Propinsi Riau tahun 1976.**

No.	Jenis penyakit	Pekanbaru	Kampar	Indragiri Hulu	Indragiri Hilir	Bengkalis	Kep. Riau	Jumlah
1.	Cacar air	20	69	31	41	50	21	23
2.	Influenza	12.190	3.385	2.681	3.961	6.664	8.466	37.341
3.	Diarboca	4.491	1.975	1.363	1.691	2.861	2.082	14.418
4.	Malaria	1.108	133	1.439	471	3.371	3.969	10.490
5.	Filariasi	15	35	—	18	1	—	60
6.	Rabies	39	4	2	35	79	37	119
7.	Patek	10	42	27	398	386	34	898
8.	TBC	508	237	354	691	1.049	700	3.634
9.	Kusta	—	10	7	444	82	—	140
10.	Penyakit kelamin	27	165	3	107	204	197	700

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Riau.

Penderita dan korban (kematian) oleh kolera dalam tahun 1975 yang terbanyak ialah Kabupaten Bengkalis, sedangkan dalam tahun 1976 korban kolera yang terbesar tercatat di Kabupaten Indragiri Hilir. Perincian lebih lanjut tentang serangan kolera tersebut dalam 22 tahun belakangan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel II.29. Banyaknya penduduk yang menderita dan meninggal oleh penyakit kolera dalam tiap daerah tingkat II dalam Propinsi Riau tahun 1973 – 1976.**

No.	Daerah Tk. II	1975		1976	
		Penderita	Meninggal	Penderita	Meninggal
1.	Pekanbaru	9	1	—	—
2.	Kampar	5	1	—	—
3.	Indragiri Hilir	31	11	13	1
4.	Indragiri Hulu	4	1	454	33
5.	Bengkalis	143	29	7	—
6.	Kepulauan Riau	2	—	—	—
Jumlah		194	43	474	34

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Riau.

Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KB) di Riau di luar klinik KB ABRI dan swasta, ada 37 buah. Jumlah akseptor tercatat tahun 1976 sebanyak 2.150 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Pemakai kontrasepsi	1.266 orang, sekitar 58,8%
Pemakai IUD	523 orang, sekitar 24 %
Pemakai kondom	283 orang, sekitar 13 %
yang lain-lain	118 orang, sekitar 4,2 %

Propinsi Riau sampai tahun 1977 ini belum masuk BKKBN. Jumlah akseptor tersebut di atas baru merupakan sekitar 0,68% dari jumlah pasangan usia subur yang ada di daerah ini.

#### **H. AGAMA DAN KEPERCAYAAN**

Mengenai agama yang dianut oleh penduduk Propinsi Riau,

tampak kepada kita, bahwa agama Islam merupakan agama yang paling banyak penganutnya. Dari jumlah penduduk Riau tahun 1975 sebanyak 1.774.459 jiwa, tercatat penganut agama Islam sebanyak 1.615.756 orang. Agama lain yang terdapat juga di daerah ialah : Hindu, Budha, dengan penganut 44.468 orang, Protestan sebanyak 24.771 orang, dan Katolik sebanyak 11.011 orang, sedangkan penganut agama lain yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya ada sebanyak 78.453 orang. Penganut agama Islam boleh dikatakan mayoritas di setiap kabupaten. Penganut Hindu Budha banyak terdapat di kabupaten Bengkalis, sebab penganut agama itu banyak berasal dari keturunan Cina. Juga penganut Hindu Budha di kabupaten Kepulauan Riau hampir sama jumlahnya dengan daerah Bengkalis. Protestan banyak terdapat dianut oleh penduduk kabupaten Bengkalis dan kotamadya Pekanbaru, sedangkan penganut agama Katolik terdapat banyak di daerah Kepulauan Riau. Bagaimana keadaan penganut agama itu masing-masing dengan jumlah rumah ibadahnya, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel II.30. Penganut agama dan rumah ibadah dalam Propinsi Riau, keadaan tahun 1975.**

No.	Daerah Tk. II	Jumlah Penduduk	Islam	Protes-tan	Kato-lik	Hindu Budha	Lain-lain
1.	Pekanbaru	151.650	139.288	9.143	2.290	141	1.788
2.	Kampar	296.447	249.941	295	188	30	1.023
3.	Bengkalis	468.471	381.726	9.141	1.378	40.259	35.967
4.	Indragiri Hulu	199.540	193.288	145	1.365	—	—
5.	Indragiri Hilir	308.312	307.950	334	—	—	28
6.	Kep. Riau	350.009	299.563	5.713	5.790	4.038	34.905
J u m l a h		1.774.459	11.615.756	24.771	11.011	44.468	78.453

Tempat ibadah :

No.	Daerah Tk. II	Mesjid	Mushalla	Gereja	Klenteng	Lain-lain
1.	Pekanbaru	65	107	16	1	1
2.	Kampar	469	853	3	—	—
3.	Bengkalis	495	454	46	38	3
4.	Indragiri Hulu	208	642	6	1	—
5.	Indragiri Hilir	88	333	2	5	—
6.	Kep. Riau.	357	293	41	47	5
Jumlah		1.980	2.682	114	92	5

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Riau.

—oOo—

### B A B III SISTEM SOSIAL BUDAYA

Sumbangan bidang pertanian dalam pendapat regional adalah sebagai berikut, dari sektor pertanian rakyat 49,5% dari perkebunan 19,5%, dari perikanan 15,2%, dari kehutanan 12,0%, dari peternakan 3,8%. Angka-angka tersebut diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Universitas Riau. Komponen pendapatan terbesar adalah berasal dari minyak bumi. Usaha-usaha pertambangan dan penggalian, kegiatan terbesar adalah dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, antara tahun 1969 – 1971 rata-rata telah menyumbangkan, lebih kurang 61,54% dari pendapatan regional.

#### A. PERTANIAN RAKYAT.

##### 1. Pertanian bahan makanan.

Menurut sensus tahun 1971, 77% penduduk Propinsi Riau adalah masyarakat petani. Luas areal pertanian pada tahun 1971 meliputi 339.981,27 ha yang terdiri dari :

No.	Jenis Pertanian	Luas (ha)	Prosentase (%)
1.	S a w a h	116.960,80	34,40
2.	L a d a n g	89.982,50	26,46
3.	Kebun jagung	8.934,76	2,62
4.	Kebun ketela pohon	12.559,63	3,69
5.	Kebun ketela rambat	92.863,25	27,31
6.	Kebun kacang tanah	931,17	0,28
7.	Kebun kacang kedele	93,25	0,02
8.	Kebun kacang hijau	286,57	0,09
9.	Kebun buah-buahan	13.431,25	3,97
10.	Kebun sayur-sayuran	3.956,34	1,16
J u m l a h		339.999,52	100,00

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Riau untuk bahan perencanaan Pembangunan tahun '72.

a. **S a w a h .**

Yang terdapat di Daerah Riau adalah sawah pengairan teknis, sawah pengairan setengah teknis, sawah tadah hujan, sawah pasang surut tanah rendah.

Pusat sawah produksi :

- 1). Kabupaten Bengkalis : — Kuala Sungai Rokan  
— Kecamatan Kutu  
— Daerah Melai/Sungai Cina  
— Sepanjang sungai Siak.
- 2). Kabupaten Kampar : — Kecamatan Rokan IV Koto  
— Daerah antara Danau Binkuang dengan Rantau Berangin.  
— Daerah Batu Bersurat kecamatan XIII Koto Kampar.
- 3). Kabupaten Indragiri Hulu : — Daerah Kutantan
- 4). Kabupaten Indragiri Hilir : — Kecamatan Tempuling  
— Kecamatan S. Retih  
— Sungai Anak Serka  
— Sungai Enok  
— Sungai Alai  
— Sungai Piring  
— Teluk Pinang  
— Kecamatan Tembilahan  
— Sepanjang sungai Indragiri

b. **L a d a n g .**

Ladang adalah areal pertanian dengan sistem berpindah-pindah. Tanah ladang dikerjakan dengan jalan menebang hutari, kemudian ditanami dengan padi. Setelah dua tahun atau tiga tahun, tingkat kesuburannya semakin berkurang untuk padi, selanjutnya ditanami dengan tanaman perdagangan seperti karet,

kopi dan sebagainya. Pusat-pusat ladang produksi terdapat di kabupaten Kampar, kabupaten Bengkalis dan kabupaten Indragiri Hulu.

c. **T e g a l a n .**

Areal tegalan pada umumnya (tersebar di sekitar kampung-kampung), ditanami dengan palawija, tanaman hortikultura dan tanam-tanaman perdagangan seperti : karet, kelapa, kopi dan sagu. Pusat-pusat produksi terdapat di kabupaten-kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Bengkalis.

Dari pertanian yang masih potensiil meliputi luas areal 125.000 ha yang terletak di Pasir Pangaraian kurang lebih 40.000 ha di sekitar Rengat 15.000 ha dan daerah antara Kota Baru dan Teluk Kiambang kurang lebih 70.000 ha.

Penggarapan dan pengolahan tanah-tanah sebagian besar masih secara tradisional : dengan alat-alat yang masih sederhana, tenaga manusia, pengairan alami, tanpa penggunaan pupuk, tanpa seleksi bibit, tanpa pemberantasan hama.

Usaha-usaha ke arah modernisasi/mekanisasi telah mulai dilaksanakan dengan bantuan/bimbingan Dinas Pertanian Rakyat. Produksi pertanian pada tahun 1971 tercatat sebagai berikut :

**Tabel III.1. Produksi pertanian tahun 1971.**

No.	Jenis tanaman	Produksi (ton)
1.	Padi (sawah-ladang)	280.041,29
2.	J a g u n g	5.279,87
3.	Ketela pohon	45.627,24
4.	Ketela rambat	12.619,44
5.	Kacang tanah	548,30
6.	Kacang kedele	21,15
7.	Kacang hijau	94,30
8.	T a l a s	325,70
9.	Sayur-sayuran	11.094,23
10.	Buah-buahan	58.744,45
<b>Jumlah</b>		<b>412.395,45</b>

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) tahun 1973.

2. **Pertanian bukan bahan makanan** yang ada di daerah Riau adalah : Karet, gambir, tembakau dan bunga-bunga/ta-naman hias, jarak, pinang dan randu dan lain-lain.
3. **Perkembangan produksi pertanian.**  
**Perimbangan produksi-konsumsi (1969 – 1971).**  
**Produksi/Konsumsi beras (dalam ribuan ton).**

No.	Uraian	1969	1970	1971
1.	Jumlah penduduk	1.490.181	1.559.310	1.640.225
2.	Konsumsi beras (108 kg/jiwa tahun).	160,9	168,4	177,1
3.	Produksi sawah ladang	128,9	137	145,6
	Kekurangan	32	31,4	31,5

Melihat angka di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan produksi terutama beras belum menggembirakan karena belum dapat melebihi pertambahan jumlah penduduk, tetapi baru mengimbangi. Antara lain hal ini disebabkan karena, belum pupuk minded, pola tradisional, belum mekanisasi, hama tumbuhan walang sangit dan lain-lain.

Untuk menutupi kekurangan bahan pangan ini maka peningkatan bahan makanan non-beras (palawija) dapat membantu kekurangan N.B.C. yang diperlukan. Untuk mengetahui perkembangan produksi pertanian di daerah Riau dapat dilihat pada tabel III.2. dan III.3.

Pada umumnya status petani di daerah Riau adalah petani pemilik-tanah. Petani penyewa dan buruh tani tidak kita dapati. Kecuali untuk tanaman karet di sini kita dapati petani penyadap dengan bagi hasil dengan ketentuan/persetujuan antara kedua belah pihak (pemilik dan penyadap) biasanya satu bagian untuk pemilik dan dua bagian untuk penyadap/penakik.

## B. PERKEBUNAN.

### 1. Jenis perkebunan.

Eksport daerah Riau sangat tergantung dari sektor perkebunan. Agricultural commodity export yang sangat menonjol adalah karet dan kopra. Ekspor Riau adalah sangat tergantung dari kedua jenis commodity tersebut. Jenis usaha perkebunan di daerah Riau dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Usaha perkebunan besar yang meliputi tanaman karet dan kelapa.
- b. Usaha perkebunan rakyat dalam bentuk usaha perorangan/keluarga meliputi tanaman : karet, kelapa, kopi, jambu mente, cengkeh, lada, serai wangi dan lain-lain.

#### Karet.

- 1) Karet merupakan komoditi ekspor yang menghasilkan 40 – 50% dari seluruh ekspor Riau.
- 2) Karet rakyat merupakan sumber utama kehidupan rakyat.
- 3) Kenyataannya prospek karet menunjukkan trend yang terus menurun.
- 4) Kelesuan berproduksi pada petani karet disebabkan :
  - rendahnya harga karet
  - tuanya umur karet.
- 5) Rendahnya harga karet disebabkan banyak hal :
  - rendahnya mutu karet
  - besarnya cost yang dikeluarkan untuk sampainya karet pada industri-industri crumb rubber atau pelabuhan ekspor (sehingga harga karet di pedesaan ditekan oleh tengkulak-tengkulak).

#### Kelapa.

- 1) 50% dari umur kelapa yang ada di daerah Riau lebih dari 30 tahun dan tidak produktif lagi.
- 2) Pertanian/perkebunan kelapa masih menggunakan cara tradisional.
- 3) Peremajaan tanaman, penanaman kembali atau perluasan areal tanaman tidak banyak dilakukan.

- 4) Dalam pemasaran hasil masalah kelancaran transportasi dari kantong-kantong produksi ke daerah pemasaran sangat sulit.
- 5) Rakyat petani kelapa selalu terikat dengan tengkulak-tengkulak dengan menggunakan modal-modal gelap dari Singapura. Hal ini disebabkan karena kurangnya fasilitas kredit yang diberikan pada petani.

Perkebunan untuk tanaman-tanaman cengkeh, jambu mente, serai wangi lada dan sebagainya belum begitu berkembang.

## 2. **Kesebaran perkembangan.**

- a. Karet terdapat di Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Bengkalis.
- b. Kelapa terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu, dan Kabupaten Bengkalis.
- c. Cengkeh, terdapat di Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kepulauan Riau.
- d. Kopi, terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Bengkalis.

## 3. **Perkembangan produksi perkebunan.**

**Tabel III.2. Jenis/luas/produksi tanaman perkebunan rakyat di Propinsi Riau tahun 1970.**

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal Tanaman	Produksi (ton)
1.	Karet	232,155	68.404
2.	Kelapa	128.134	94.421,5
3.	Cengkeh	859,6	19,9
4.	Gambir	418,5	328,5
5.	K o p i	3.379,5	210,25
6.	Jambu mente	119	—
7.	T e b u	82,45	3.490
8.	Pinang	550	10
9.	R a n d u	33	8,8
10.	Serai Wangi	43	—
11.	J a h e	5	—
12.	L a d a	77,75	18,12

Sumber : Universitas Riau — Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau tahun 1973.

Perkembangan dalam produksi perkebunan ini terutama untuk tanaman pokok rakyat agak kurang menggembirakan jika dibandingkan dengan luas areal tanaman, hal ini adalah disebabkan karena beberapa sebab; terutama untuk karet dan kelapa :

- a. Tidak adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi.
- b. Tidak cukup tersedianya bibit unggul.
- c. Tidak adanya peremajaan tanaman yang sudah tua, terutama pada karet rakyat.
- d. Kurangnya penyuluhan mengenai cara-cara mengusahakan sistem perkebunan yang baik.
- e. Tidak adanya policy harga untuk merangsang kegairahan produksi. Peningkatan produksi terutama karet rakyat tergantung pada harga. Jika harga karet merosot biasanya petani karet tidak menyadap karetnya.

### C. PERTAMBANGAN.

Bila ditinjau dari segi pendapatan regional, menurut survai yang dilakukan oleh Universitas Riau, komponen pendapatan terbesar adalah berasal dari minyak bumi. Usaha-usaha pertambangan dan penggalian, di mana kegiatan terbesar adalah eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, selama tahun 1969 – 1971 rata-rata telah menyumbangkan lebih kurang 61,54% dari pendapatan regional.

#### 1. Jenis kesebaran pertambangan.

Jenis pertambangan yang ada di daerah Riau ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Pertambangan yang sudah/sedang dieksploitir.
- b. Pertambangan yang belum dieksploitir, yang sudah/sedang dieksploitir meliputi, minyak bumi, bauxit, timah, emas dan batu granit.

Eksplorasi pertambangan minyak bumi di daerah Riau diusahakan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia dan PT. Stanvac Indonesia dalam bentuk kontrak karya dengan PN. Pertamina.

Ladang minyak (daerah pengboran) PT. Caltex adalah :

- 1) Minas (144 sumur aktif)

- 2) Duri (254 sumur aktif)
- 3) Bekasap dan Sebang (12 sumur aktif)
- 4) Pungut
- 5) Pematang (3 sumur aktif)
- 6) Petani (1 sumur aktif)
- 7) Kota Batak (tidak dieksploitir karena kualitas rendah).

Ladang minyak PT. Stanvac adalah :

- 1) Lirik dan
- 2) Banio

Pertambangan bauxit dilaksanakan oleh PT. Aneka Tambang Bauxit Kijang (PERBAKI) dengan lokasi usaha di Pulau Bintan (Kabupaten Kepulauan Riau). Persediaan deposit seluruhnya meliputi 17 juta ton.

Pertambangan timah yang sudah/sedang diusahakan meliputi :

- 1) Lokasi pertambangan timah di Dapo (Kabupaten Kepulauan Riau) yang diusahakan oleh PN. Timah Singkep.
- 2) Lokasi pertambangan timah di Kabupaten Kampar (Siabu – Kabun – Balung) yang diusahakan oleh 5 kontraktor swasta atas penunjukkan PT. Tambang Timah Bangkinang dan sebagian dikerjakan rakyat secara kecil-kecilan.

Pertambangan emas di daerah Riau terdapat di Logas (Kabupaten Indragiri Hulu) dan diusahakan oleh Tambang Emas Logas.

Sehubungan dengan pertimbangan rentabilitet usaha pertambangan ini tidak dilanjutkan. Secara resmi ditutup pada tahun 1971, tetapi rakyat sekeliling daerah tersebut masih mengusahakan dengan peralatan yang sederhana.

Biji emas di Logas sudah ditambang sejak tahun 1937 oleh Explorasi Maatschappy Bengkalis. Sampai tahun 1940 produksi total emas mencapai 1060 kg (kotor).

Pertambangan batu granit berada di desa Lengkuas kecamatan Bintan Timur kabupaten Kepulauan Riau. Usaha pertambangan ini dikarenakan desakan kebutuhan untuk pembangunan jalan-jalan dan prasarana lainnya. Pertambangan yang belum dieksploitir, banyak terdapat bahan galian/tambang yang dapat dikembangkan, antara lain : Antinomit, batubara, mangaan, molibenit,

monazit, platina, timah putih dan wolfram.

Jenis pertambangan ini terdapat di 5 (lima) kabupaten dalam Propinsi Riau yaitu :

- a) Minyak Bumi terdapat di kotamadya Pekanbaru – Kabupaten Bengkalis – Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar.
- b) Bauxit terdapat di kabupaten Kepulauan Riau dan
- c) Timah terdapat di kabupaten Kepulauan Riau (Dabo) dan di kabupaten Kampar (Siabu – Kabun dan Balung).
- d) Emas terdapat di kabupaten Indragiri Hulu (Logas) dan
- e) Batu granit terdapat di kepulauan Riau Desa Lengkuas – kecamatan Bintan Timur).

**2. Perkembangan produksi pertambangan.**

Produksi minyak tanah selama ini menunjukkan trend yang terus menanjak sehubungan perkembangan teknologi yang dipergunakan serta perluasan daerah operasi.

**Tabel III.3. Volume Produksi minyak bumi serta nilai (sementara) dalam US Dollar yang dihasilkan oleh Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.**

Tahun	Volume produksi		Nilai sementara
	Jumlah (ton)	Perkembangan	
1	2	3	4
1967	12.335.491,11	100%	\$ 143.440.875,17
1968	16.238.961,90	133%	192.285.454,73
1969	22.366.071,—	183%	259.987.129,20
1970	26.772.944,40	217%	313.623.786,40
1971	28.259.209,70	233%	443.691.524,00

Sumber : Universitas Riau, Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) tahun 1973.

Di samping produksi yang telah dicapai dalam rangka mendapatkan cadangan serta sumber yang baru oleh PN. Pertamina telah dilaksanakan exploration off-shore terutama dengan perusahaan-perusahaan :

- a) Continental Oil; dengan lokasi daerah off-shore laut Cina Selatan – Block "B" meliputi luas daerah kurang lebih 10.000 km<sup>2</sup>,
- b) Indonesia Frontier Petroleum Company (IFPC) dengan lokasi off-shore laut Cina Selatan – Block "C" meliputi luas daerah kurang lebih 105.000 km<sup>2</sup>,
- c) Indonesia Gulf Oil Company (IGOC) dengan lokasi off-shore laut Cina Selatan – Block "D" meliputi luas daerah kurang lebih 170.000 km<sup>2</sup>.
- d) Aziende Generale Italiano Petroli (AGIP) dengan lokasi off-shore laut Cina Selatan – Block "A" meliputi luas daerah kurang lebih 100.000 km<sup>2</sup>.

Produksi pertambangan bauxit diwujudkan dalam volume ekspor serta nilai ekspor seperti berikut : 1968 – 1971).

**Tabel III.4. Volume ekspor dan nilai dalam US Dollar dari Bauxit yang dihasilkan Propinsi Riau tahun 1968 – 1971.**

Tahun	Volume Ekspor (M/T)	Nilai Ekspor (\$)	Keterangan
1968	827.000	3.950.000	
1969	976.000	4.658.000	
1970	1.229.000	6.170.000	
1971	1.392.000	6.191.000	

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Riau untuk bahan Perencanaan Pembangunan, tahun 1972.

Pertambangan timah di kepulauan Riau jumlah produksi (volume ekspor) serta nilainya adalah sebagai berikut :

**Tabel III.5. Jumlah produksi (Volume ekspor serta nilai ekspor timah di Kabupaten Kepulauan Riau) tahun 1968 – 1972.**

Tahun	Volume ekspor (M/T)	Nilai ekspor (US. \$)	Keterangan
1968	452	1,4 juta	Tidak ada keterangan
1969	—	—	
1970	1.358	4,8 juta	

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Riau untuk bahan Perencanaan Pembangunan Tahun 1972.

Pertambangan Timah di Kabupaten Kampar baru dimulai eksplorasinya dan sampai sekarang yang dikerjakan oleh kontraktor-kontraktor swasta baru mulai berproduksi.

Perusahaan batu granit berproduksi dengan full-capacity sejak bulan September 1971. Kapasitas produksi 30 – 60 ton/jam. Macam-macam ukuran yang dihasilkan adalah :

0 – 10 mm	30 – 75 mm
10 – 20 mm	30 – 85 mm
20 – 30 mm	

#### D. PERHUTANAN.

##### 1. Jenis hasil-hasil hutan dan lokasi perusahaan hutan.

Luas hutan daerah Tingkat I Riau adalah 5.600.000 ha yang terbagi atas :

a. Hutan suaka alam	:	500.000	ha
b. Hutan lindung	:	1.000.000	ha
c. Hutan Produksi	:	2.300.000	ha
d. Hutan Cadangan	:	2.800.000	ha

Jenis kayu meranti, Suntani, Mersawa, Holim, Keruang, pulai, Kulai, Niang, Balam, Wentangur, Semaram, Cengkawang, Jelutung, Medan Ngatah, Geronggang, Punak, Terentang Kesat dan lain-lain. Sedangkan jenis-jenis kayu yang belum dikenal di pasaran (unknown species) tetapi mempunyai potensi tegakan yang cukup banyak terdiri atas kurang lebih 50 jenis.

Hasil-hasil hutan yang penting adalah :

Wotara damar, bakau peles, getah jelutung, getah merah, nibung, arang, kulit-kulit (ular dan biawak), sarang burung, litin labah dan berjenis-jenis burung.

Lokasi pengusahaan hutan terdapat pada kabupaten-kabupaten : Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu.

## 2. Industri kayu.

Peranan pokok pembangunan di bidang kebutuhan adalah : tercapainya suatu industri bersifat integral, yang mampu memanfaatkan hasil hutan secara maksimal.

Industri-industri kayu yang telah ada di daerah Riau adalah : Industri gergajian/kilang-kilang papan dan industri Plywood.

## 3. Perkembangan produksi.

Usaha eksploitasi hutan baik oleh investasi modal asing maupun swasta nasional meliputi luas hutan 3.982.000 ha yang diusahakan baik asing maupun swasta. Hak pengusahaan hutan merupakan unit-unit eksploitasi yang perlu dikembangkan. Unit-unit tersebut potensiil merupakan modal yang besar artinya bagi perkembangan regional. Sebagai gambaran dapat dilihat produksi kayu dari tahun 1969 – 1974 sebagai berikut :

**Tabel III.6. Produksi Logs (kayu bulat) daerah tingkat I Riau tahun 1969 – 1974.**

No.	T a h u n	P r o d u k s i (m3)
1.	1969	421.135
2.	1970	810.812
3.	1971	1.083.570,75
4.	1972	1.070.344,80
5.	1973	1.706.620,62
6.	1974	1.640.138,02

Perkembangan produksi ini secara intensif, dikarenakan sejak tahun 1968 sejak daerah-daerah konsesi minyak memberikan infrastruktur yang lebih mudah dan terbuka sehingga pengusaha pada persil penebangan sangat menguntungkan dan mudah dalam perluasan. Pada tahun 1967 sebagai awal pertama dikeluarkannya UU No. 1. 1967 tentang penanaman modal asing dengan susulan UU No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan, kegiatan pengusaha eksplorasi hutan semakin meluas. Catatan menunjukkan untuk usaha-usaha panglong dan persil tebangan meliputi 68 buah, sedangkan konsesi yang diajukan 10 buah. Dalam tahun 1969 jumlah panglong mencapai 169 buah dan permohonan 26 buah, menunjukkan peningkatan 100%. Usaha eksplorasi hutan baik sisa investasi modal asing maupun swasta nasional meliputi luas hutan 5.632.030 ha.

## **E. PETERNAKAN.**

### **1. Jenis usaha peternakan dan lokasinya.**

Di daerah Riau pemeliharaan ternak secara besar-besaran belum diusahakan (termasuk ternak besar), walaupun potensi memungkinkan. Ternak yang ada sekarang diusahakan di samping bertani. Jenis-jenis peternakan yang ada antara lain : babi, unggas, ayam, sapi, kerbau, kambing, domba, kuda.

Lokasi peternakan di daerah Riau terdapat pada Kabupaten-kabupaten sebagai berikut :

- a. Sapi : kabupaten-kabupaten Riau (Tombolan – Midai), Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir.
- b. Kerbau : dipelihara di kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Kuda : terdapat di kabupaten Kampar (Pasir Pangaraian).
- d. Kambing/domba : terdapat di kabupaten Kampar, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Bengkalis dan Kepulauan Riau.
- e. Babi : terdapat di kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, kabupaten Bengkalis, Kepulauan Riau dan Kotamadya Pekanbaru.

Ternak kecil dan unggas tersebar di seluruh Riau.

Pusat ternak kecil di Kabupaten Indragiri Hulu dan Bengkalis, se-

dangkan babi dipelihara oleh orang-orang Cina secara intensif di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Riau. Untuk melihat lokasi dan potensi ternak besar dan kecil serta unggas dalam daerah Propinsi Riau adalah sebagai berikut :

**Tabel III.7. Jumlah ternak sapi dalam Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.**

No.	Kabupaten/Kodya	1967	1968	1969	1970	1971
1.	Pekanbaru	26	—	—	—	—
2.	Kampar	80	60	—	—	—
3.	Indragiri Hulu	5000	4402	4500	3000	5500
4.	Indragiri Hilir	—	—	—	—	—
5.	Bengkalis	—	—	—	—	—
6.	Kep. Riau	6400	7000	6500	7000	7700
Prop. Riau		11.500	11.552	11.000	12.000	13.000

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau tahun 1973.

**Tabel III.8. Jumlah ternak dalam Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.**

No.	Kabupaten/Kodya	1967	1968	1969	1970	1971
1.	Pekanbaru	138	500	—	—	—
2.	Kampar	18000	18200	175.00	18000	19800
3.	Indragiri Hulu	8000	8080	7200	8700	8800
4.	Indragiri Hilir	—	—	—	—	—
5.	Bengkalis	290	310	—	—	—
6.	Kep. Riau	100	101	—	—	—
Prop. Riau		26.528	27.200	24.700	26.000	28.000

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) tahun 1973).

**Tabel III.10. Jumlah ternak kambing dalam Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.**

No.	Kabupaten/ Kodya	1967	1968	1969	1970	1971
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pekanbaru	—	—	—	—	—
2.	Kampar	6.400	6.200	6.000	6.500	7.000
3.	Indragiri Hulu	11.900	11.200	11.000	12.000	12.000
4.	Indragiri Hilir	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
5.	Bengkalis	16.750	16.500	16.000	17.000	17.000
6.	Kep. Riau	6.400	5.500	5.500	6.500	6.500
Prop. Riau		42.450	40.500	39.500	43.000	43.500

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Riau untuk bahan Perencanaan Pembangunan tahun 1972.

**Tabel III.10. Jumlah ternak babi dalam propinsi Riau tahun 1967 – 1971.**

No.	Kabupaten/ Kodya	1967	1968	1969	1970	1971
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pekanbaru	876	474	500	500	700
2.	Kampar	88	90	—	—	—
3.	Indragiri Hulu	1.148	760	400	500	600
4.	Indragiri Hilir	1.088	1.110	800	1.000	1.100
5.	Bengkalis	11.259	11.500	11.000	12.500	13.000
6.	Kep. Riau	9.565	9.756	5.800	9.000	10.000
Prop. Riau		24.024	23.690	21.200	23.500	25.400

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Riau untuk bahan Perencanaan Pembangunan tahun 1972.

## 2. Perkembangan produksi.

Kurangnya jumlah ternak yang dipelihara di daerah Riau ini disebabkan tingginya tingkat kematian ternak yang disebabkan penyakit ternak yang belum terbatas. Hal itu semua mempengaruhi jumlah ternak yang tersedia untuk dipotong dan untuk sumber tenaga kerja. Ternak yang mati karena penyakit NCD dan SE rata-rata tiap tahun 15% untuk ternak besar, dan 75% untuk ternak kecil. Kebutuhan/keperluan ternak potong, peliharaan, susu dan telur di daerah ini belum terpenuhi dan untuk itu masih didatangkan dari luar daerah. Jumlah ternak peliharaan dan potong yang didatangkan dari luar daerah ke daerah ini tiap tahun adalah sebagai berikut :

**Tabel III.11. Jumlah pemasukan ternak Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.**

No.	Jenis ternak	1967	1968	1969	1970	1971
1	2	3	4	5	6	7
1.	S a p i	1.655	1.948	1.086	918	561
2.	K e r b a u	1.206	1.644	2.139	3.061	2.345
3.	K a m b i n g	479	3.368	39	—	33
4.	B a b i	4.552	3.390	3.682	2.270	3.574

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Riau tahun 1972.

Mengenai jumlah pemeliharaan ternak dalam Propinsi Riau perkembangannya dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.12. Jumlah ternak dalam Propinsi Riau tahun 1967 – 1971.**

No.	Jenis ternak	1967	1968	1969	1970	1971
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kuda	137	140	110	150	140
2.	Sapi	11.500	11.552	11.600	12.000	13.200
3.	Kerbau	26.500	26.836	24.700	26.000	28.600
4.	Kambing/ domba	42.450	40.500	39.500	43.000	43.500
5.	Babi	23.060	23.690	21.200	23.500	25.400
6.	Unggas	998.994	132.000	150.000	160.000	165.000

Sumber : Dinas Peternakan Propinsi Riau tahun 1972.

**Tabel III.13. Perkembangan ayam ras di daerah Riau.**

No.	Kabupaten/ Kodya	1967	1968	1969	1970	1971
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pekanbaru	—	100	2.000	6.000	10.000
2.	Kampar	—	—	500	1.500	2.000
3.	Indragiri Hulu	—	—	—	500	500
4.	Indragiri Hilir	—	—	—	500	500
5.	Bengkalis	—	—	500	1.000	1.500
6.	Kep. Riau	—	—	—	500	500

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) tahun 1973.

## F. PERIKANAN.

### 1. Perikanan Laut.

Daerah Propinsi Riau dalam perikanan laut Indonesia sudah lama dikenal, karena memang merupakan pusat produksi ikan laut utama yang hasil-hasilnya tersebar secara meluas. Daerah Riau mempunyai daerah perairan yang cukup luas, terdiri dari 176.530 km<sup>2</sup> perairan laut dan 310.087 ha perairan pedalaman.

Menurut sifat dan keadaan laut dapat dibagi dalam :

- a. Perairan pantai sepanjang pesisir timur Sumatera, mulai dari Panipahan (perbatasan Sumatera Utara) sampai Kuala Enok (perbatasan Jambi, adalah dangkal, dasarnya lumpur, banyak dipengaruhi arus sungai. Kadar garam antara 28 sampai 31%. Perairan ini subur dengan zat-zat hara yang dihanyutkan sungai, sehingga potensi hasil ikannya tinggi, terutama jenis ikan pantai seperti : pari, cucut, udang, parang, tenggiri, belanak, senangin gunjing, pias, gulamo dan terubuk.
- b. Perairan di sekitar kepulauan Riau mulai batas Kecamatan Batam sampai Singkep dan Lingga, relatif lebih dalam, kurang lebih 10 – 40 meter. Dasarnya pasir campur lumpur, banyak mengandung batu karang, pengaruh arus sangat kurang dan kadar garamnya 30 – 32%. Potensi perairan ini cukup tinggi, terutama ikan jenis karang seperti teri, tamban, sotong, ikan merah, kurau, ekor kuning, bawal dan senangin. Di samping ini terdapat juga jenis rumput laut, sponge dan siput mutiara.
- c. Perairan bagian selatan Laut Cina Selatan, di sekitar kepulauan Natuna dan Anambas (kecamatan Bunguran, Ranai dan Terempa), perairannya dalam kurang lebih 40 – 100 meter dan banyak mengandung batu-batu karang. Perairan ini dipengaruhi oleh masa air laut Cina Selatan dan kadar garamnya 33%. Di perairan ini hidup jenis ikan laut seperti tuna, di samping terdapat juga sponge, siput lolak (sheell) dan rumput laut.

Daerah yang berbatasan dengan Selat Malaka dan laut Cina Selatan ini diperkirakan mempunyai potensi perairan laut 508.000 ton, dan perairan pedalaman (sungai – danau – rawa dan sebagainya) meliputi 12.000 ton. Namun produksi yang telah digali baru mencapai kurang lebih 30% dari

potensi yang diperkirakan, dengan produksi seluruhnya tercatat dalam tahun 1974 berjumlah 189.696 ton. Dari data yang ada dapat diperkirakan bahwa sekarang ini kira-kira 20 – 25% dari produksi ikan laut Indonesia dihasilkan Propinsi Riau. Ini berarti hasilnya 50% dari seluruh produksi ikan seluruh pulau Jawa Madura.

Tentang karakteristik desa nelayan Riau dicoba meninjau nya dari segi-segi geografi, penduduk, ekonomi, usaha perikanan, keadaan masyarakat nelayan umumnya, dan sarana serta prasarana di desa nelayan. Seluruh desa nelayan di daerah Riau berada di kecamatan yang berbatasan dengan laut pada 4 kabupaten.

Secara geografisnya desa nelayan itu terbagi atas :

- 1) Desa nelayan yang berada di Pulau Sumatera bagian Timur, yang terbesar dari Panipahan di utara ke Kuala Enok di Selatan.
- 2) Desa nelayan yang terbesar antara 3.000 pulau yang berada di perairan laut Cina Selatan – Selat Sumatera dan Selat Karimata.

Dibandingkan dengan desa nelayan yang disebut belakangan, desa nelayan yang berada di daratan Sumatera relatif perhubungannya lebih baik dan mudah. Agaknya tidak berlebihan kalau dinyatakan bahwa dengan penyebaran desa nelayan yang khas Riau di atas tidak mudah mengadakan pembangunan dan pengembangan desa nelayan tersebut. Dan agaknya tidak ada satu Propinsi pun di Indonesia ini ada nelayannya memiliki ciri geografis seperti yang terdapat di daerah tingkat I Riau. Karena karakteristik yang demikian itu tentu memerlukan implementasi konsep dan program pembangunan yang tersendiri pula. Daerah desa nelayan di daerah Riau adalah seperti terlihat pada tabel berikut.

Penduduk di desa nelayan umumnya terdiri dari : pribumi, yakni orang-orang Melayu – Bugis – Banjar dan orang asli (Suku Laut, Talang) dan lain-lain, serta orang-orang non pribumi yang umumnya adalah orang Cina (WNI atau WNA). Di desa pantai tersebut tinggal 23.499 orang nelayan, di antaranya 3.944 orang nelayan golongan ekonomi kuat (non pribumi) dengan jumlah keluarga nelayan seluruhnya sekitar 168.000 orang. Pengusahaan

**Tabel III.14. Letak dan jumlah nelayan di daerah Riau.**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa Nelayan
1.	Kampar	1	4
2.	Indragiri Hilir	7	22
3.	Bengkalis	9	87
4.	Kepulauan Riau	17	147
Jumlah		34	260

Sumber : Mughtar Ahmad, M.Sc, Pembangunan dan Pengembangan Desa Nelayan, 1976 hal. 5.

perikanan di daerah-daerah tersebut terutama bidang perikanan laut didominir oleh nelayan-nelayan non-pribumi yang berjumlah kurang lebih 3,99%.

Sungguhpun jumlah penduduk non-pribumi sedikit, tetapi hampir setiap desa nelayan perekonomiannya (modal alat-alat produksi dan perdagangan) dikuasai oleh golongan kecil ini. Nelayan-nelayan pribumi yang jumlahnya paling sedikit diperkirakan 20.000 orang adalah nelayan-nelayan buruh dan bagi yang dapat dikatakan sebagai nelayan pemilik keadaannya sangat menyedihkan. Mereka umumnya berusaha dengan alat-alat primitif. Keadaan penduduk di beberapa kabupaten yang berbatasan dengan perairan laut di daerah Riau adalah sebagai berikut :

**Tabel III.15. Keadaan penduduk kabupaten yang berbatasan dengan laut.**

No.	Kabupaten	1970			1971		
		WNI	WNA	Jumlah	WNI	WNA	Jumlah
		1	2	3	4	5	6
1.	Kampar	249363	399	249702	258688	502	259190
2.	Indragiri Hilir	262261	4294	266555	280615	4324	284939
3.	Bengkalis	352197	40353	392750	381288	41641	422929
4.	Kep. Riau	236491	35001	321492	295464	35464	330928
Jumlah		1100312	80047	1230499	1216055	81391	1297986

Sumber : Kantor Statistik Riau – Sensus Penduduk tahun 1971

Keadaan penduduk pribumi lemah di bidang ekonomi (modal – alat-alat produksi dan perdagangan), kepengurusan, organisasi maupun status sosialnya, berhadapan dengan nelayan-nelayan non-pribumi sebagai orang-orang yang memiliki modal kuat, sehingga kondisi dan situasi perikanan rakyat yang sebagian besar tercermin dalam semua aspek kehidupan nelayan pribumi merupakan faktor yang cukup rawan bagi mereka (non-pribumi) dalam menguasai sarana-sarana produksi dan pemasaran. Keunggulan mereka dalam menguasai barang-barang modal tersebut dimungkinkan pula oleh karena keadaan geografis daerah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga Singapura dan Malaysia dalam hal mana justru mereka mempunyai hubungan darah dan keturunan yang kuat (terutama turunan Cina).

Tentang pendapatan nelayan yang berada di bawah pengelolaan non-pribumi mungkin digambarkan, bukan saja karena ketiadaan data, tetapi malangnya nelayan itu sendiri tidak mengetahui hutangnya, atau pendapatannya pada satu satuan waktu, dan tidak jelas pula pengeluarannya. Sebab semuanya disediakan, dicatat dan hanya diketahui oleh toke nelayan itu sendiri. Namun demikian untuk mendapat gambaran pendapatan dan pengeluaran rumah tangga nelayan yang mempunyai alat berikut :

**Tabel III.16. Keadaan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga nelayan 1970.**

No.	Daerah Kabupaten	Pendapatan (rupiah)	Pengeluaran (rupiah)
1	2	3	4
1.	Bengkalis/Kampar	26.000	16.413
2.	Indragiri Hilir	13.400	13.029
3.	Kepulauan Riau	12.800	12.669
	Rata-rata	17.400	14.037

Sumber : Survey Ekonomi Perikanan Propinsi Riau – 1970.

Pendapatan umumnya bersumber dari usaha perikanan yang tradisional saja.

Usaha perikanan secara garis besarnya dapat dibagi dalam usaha penangkapan, pemeliharaan/budidaya, pengelolaan dan pemasaran. Umumnya penduduk pribumi menguasai penangkapan/berproduksi, sedangkan pengelolaan dan pemasaran berada dalam tangan non-pribumi. Sungguhpun produksi dikuasai oleh nelayan pribumi belum tentu mereka menguasai alat penangkapannya, terutama kalau alat-alat produksi yang modern seperti perahu bermotor dan alat-alat seperti jaring dan trawl. Jadi dengan demikian non-pribumi selain menguasai seluruh usaha pengelolaan dan pemasaran juga menguasai sebagian besar alat-alat berproduksi maupun modal untuk melaksanakan usaha penangkapan, berarti pada hakekatnya juga menguasai produksi.

Alat-alat untuk penangkapan ikan masih mempergunakan perahu-perahu layar. Perkembangan perahu bermotor lambat sekali. Jumlah perahu bermotor baru kira-kira 23%, sedangkan perahu layar berjumlah kurang lebih 77% dari seluruh armada penangkapan ikan yang ada. Di samping masih sederhana dan kecilnya perahu penangkapan ikan, perahu-perahu tersebut pada umumnya hanya dilengkapi dengan alat-alat penangkapan yang sederhana seperti : pancing, penangkap dan jaring. Keadaan perahu layar dan alat penangkapan ikan di daerah Riau tahun 1970 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.17. Perahu dan alat penangkapan rumah tangga nelayan Riau tahun 1970.**

No.	Kabupaten	Perahu				Kapal Motor	jumlah	Alat Penangkap			Jumlah
		Kel	Sdg.	Bsr.	Bm.			Panc.	Jrg.	Perk.	
1.	Bengk/Kpr.	1261	192	23	88	1105	2669	370	1244	631	2245
2.	Inhil	490	127	10	8	99	734	25	362	219	606
3.	Kep. Riau	5443	270	25	958	83	6788	2216	1895	2165	6276
Jumlah		7191	598	58	1164	1267	10191	2611	3501	3015	9127

Sumber : Survey Ekonomi Perikanan Propinsi Riau - 1970.

Ikan-ikan yang ditangkap di perairan daerah Riau, paling sedikit ada 58 macam/jenis yang komersil, di antaranya ikan-ikan jenis : Tenggiri – Parang – Bawal – Kurau – Kakap – Kembung – Tongkol – dan berjenis-jenis udang.

Pada tahun 1974 hasil penangkapan per unit rata-rata 304 kg/hari, tetapi ini tidak dapat dijadikan patokan, sebab itu tergantung kepada jenis alat penangkapannya. Misalnya trawl dapat mencapai 750 kg/hari sedangkan jaring insang bermotor tempel hanya sekitar 20 kg/hari. Sungguhpun demikian dalam penangkapan dengan jaring ikan yang ditangkap adalah selektif dan umumnya mempunyai nilai ekonomis yang sangat penting, sedangkan dalam penangkapan dengan trawl jenis ikan yang tertangkap bermacam-macam jenisnya, kecuali udang umumnya mempunyai nilai ekonomis rendah, harganya hanya sekitar Rp. 25,-/kg untuk ikan campur. Sedangkan untuk udang biasa yang tertangkap dalam jumlah kecil dengan trawl dapat mencapai Rp. 900,-/kg di perairan penangkapan. Hasil penangkapan rumah tangga nelayan dalam bulanan per-trip penangkapan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.18. Hasil penangkapan dalam bulanan dan rata-rata rumah tangga nelayan per-trip tahun 1970.**

No.	Daerah/Kabupaten	Hasil Bulanan (ton)	Per-Trip. (kg)
1	2	3	4
1.	Bengkalis/Kampar	7.227,34	199
2.	Indragiri Hilir	1.241,76	118
3.	Kepulauan Riau	3.840,05	48
Jumlah		12.309,15	365

Sumber : Survey Ekonomi Perikanan Propinsi Riau – 1970.

Bagi nelayan pekerja (yang terikat pada toke/tengkulak yang biasanya merangkap juga sebagai pengumpul. Sedangkan nelayan pemilik (alat penangkapan miliknya sendiri) menjual sebagian kepada tengkulak, sebagian/dijual sendiri kepada konsumen langsung atau kepada pengumpul.

Dari tengkulak ini kalau dia merangkap pengumpul, ikan dijual kepada pedagang ekspor atau pedagang antar pulau. Dari pedagang antar pulau dijual kepada agen atau pedagang besar di kota (Singapura – Jambi – Palembang – Cirebon dan Jakarta), baru dibeli oleh pedagang menengah yang akan menjualnya ke toko-toko/kedai-kedai ikan atau pedagang eceran mengantarkannya kepada konsumen.

Di daerah Riau berdasarkan survey keadaan penjualan/pemasaran ikan dari nelayan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.19. Pemasaran hasil tangkapan dari rumah tangga nelayan di Riau tahun 1970 (%)**

No.	Daerah/Kab.	Di- ecer sendiri	teng- kulak	Kope- rasi	Pele- lang- an	Pengsh. Peng- awetan	Pedg. Be- sar	Lain2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bengkalis/ Kpr.	4,54	26,54	9,24	5,62	36,96	15,36	1,74
2.	Indragiri Hilir	4,02	93,82	—	—	0,55	1,01	—
3.	Kepulauan Riau	35,66	96,95	5,02	4,76	0,68	9,09	7,84
	Rata-rata	14,74	52,43	4,75	3,46	12,73	8,68	3,19

Di daerah Riau pendidikan nelayan, baik pendidikan umum maupun kejuruan sangat menyedihkan. Ini adalah salah satu penghambatan pembangunan dan pengembangan desa nelayan sekarang

maupun yang akan datang. Dari jumlah 168.000 keluarga nelayan yang berpendidikan SLTP hanya 0,5% sedangkan yang berpendidikan SD hanya 9,5% dan sebagian besar buta huruf atau tidak ada pendidikan formil sebanyak 90%.

Untuk jelasnya keadaan pendidikan rumah tangga nelayan di Daerah Riau adalah sebagai berikut :

**Tabel II.20. Keadaan pendidikan rumah tangga nelayan di Daerah Riau tahun 1970.**

No.	Daerah / Kab.	Tidak Bersekolah	Buta Huruf		Jumlah
			SD	SLTP	
1	2	3	4	5	6
1.	Bengkalis/Kampar	16.880	1.041	45	17.966
2.	Indragiri Hilir	4.335	225	56	4.616
3.	Kepulauan Riau	31.171	4.268	203	25.642
Jumlah		52.386	5.534	304	58.224

Sumber : Survei Ekonomi Perikanan Propinsi Riau – 1970.

Untuk pengurusan dan administrasi pedesaan jarang desa nelayan yang mempunyai tempat khusus untuk itu. Umumnya segala sesuatunya dilakukan di rumah kepala desa. Juga tidak terdapat prasarana pelabuhan khusus untuk perikanan, pasar lelang maupun pasar umum, apalagi cold storage. Bahkan kalau ada yang mendapatkan es, ada yang didatangkan dari Singapura dan Malaysia. Demikian pula diketemukan docking tempat pembuatan kapal yang baik dan lengkap secara sederhana. Tetapi ada desa-desa nelayan yang membuat perahu dan mereka mengerjakan sendiri pembuatannya dan pemeliharaannya di atas pasir di tepi pantai. Di samping itu di desa nelayan belum ada organisasi atau badan yang menghimpun nelayan. Kalaupun ada pimpinan tradisional masyarakat nelayan, sulit

mendapatkan yang benar-benar menjadi pimpinan masyarakat seperti adanya "kapitan" pada masyarakat non-pribumi.

## 2. Perikanan darat.

Daratan Propinsi Riau mempunyai potensi perikanan darat yang cukup besar terutama pada perairan umum. Dalam propinsi Riau terdapat 4 buah sungai besar seperti : Sungai Rokan, sungai Kampar, sungai Indragiri dan sungai Siak yang kaya dengan potensi ikannya.

Di sepanjang sungai tersebut terdapat pula rawa-rawa yang luas, danau-danau dan tasik-tasik yang juga kaya akan potensi ikannya. Di samping itu dalam usaha perikanan darat ini dapat pula surut dan tambak. Di sepanjang aliran sungai Rokan, Siak, Kampar dan Indragiri terdapat berbagai jenis ikan besar antara lain : ikan tapah, balido, patin, kelabau, kalui, tangkaulang serta jenis-jenis ikan kecil lainnya seperti : pawe, kapie, selais, barau, sepaku dan beratus-ratus jenis ikan lainnya. Di danau-danau dan rawa-rawa terdapat pula berbagai jenis ikan yang bisa hidup di danau-danau/rawa-rawa tersebut seperti : ingau, motan, ikan singkat dan berbagai jenis ikan tanah (toman dan jalai). Sedangkan pemeliharaan ikan kolam, tambak dan telaga masih dalam taraf diperkembangkan dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh keadaan pengairan (irigasi).

Luas perikanan tahun 1972 tercatat seluas 268.831 ha, dengan produksi ikan makanan 12.068,9 ton. Sedangkan luas kolam tambak dan telaga tercatat 69,5 ha dengan produksi 57 ton. Dengan demikian luas seluruh perikanan darat Propinsi Riau tahun 1972 - 468.878 ha dengan jumlah produksi 12.133,9 ton dan produksi benih ikan 551.000 ekor.

Bilamana kita bandingkan pertambahan produksi tahun 1969 dengan tahun 1970, hanya dapat mencapai kurang lebih 6,8%. Bilamana hal itu kita hubungkan dengan pertambahan penduduk daerah Propinsi Riau sebesar 2,9% maka pertambahan produksi perikanan darat hanya 3,9%.

Bila dibandingkan jumlah penduduk Riau tahun 1971 sebanyak 1.640.225 jiwa dengan produksi ikan maka baru dapat mencapai angka sekitar 7 kg daging ikan per kapita per tahun. Dengan didasarkan sementara kebutuhan penduduk 25 kg daging ikan per kapita/tahun, maka perikanan darat dewasa ini baru

dapat memenuhi 30% dari kebutuhan. Dengan demikian produksi ikan darat di Propinsi Riau harus ditingkatkan lagi sehingga mencapai 28.871 ton untuk dapat mencukupi kebutuhan akan protein daging ikan dari perikanan darat dan untuk sementara ditetapkan kenaikan produksi ikan darat ini 10 – 15% tiap tahunnya. Untuk dapat memenuhi target pertambahan produksi tersebut perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengadakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemeliharaan dan penangkapan perikanan darat.
- b. Memperluas usaha pemeliharaan ikan kolam, tambak dan telaga.
- c. Pencegahan dan penertiban penangkapan ikan yang bersifat memusnahkan dengan alat-alat peledak, racun dan tuba.
- d. Penertiban musim-musim penangkapan ikan dengan musim-musim induk ikan yang sedang bertelur diadakan pelarangan penangkapan ikan.
- e. Pengembangan pembibitan (rawa-rawa, tambak, telaga, kolam dan waduk) serta menyediakan benih ikan
- f. Penyuluhan mengenai pemeliharaan ikan kolam dan tambak.
- g. Memperbaiki mutu peralatan petani perikanan darat.

Perkembangan produksi perikanan laut maupun perikanan darat masih dapat lagi ditingkatkan, namun hal ini tidak dapat lagi dilakukan secara intensif terutama pada nelayan-nelayan pribumi hal ini dikarenakan :

- a. Kurang sempurnanya prasarana/sarana penangkapan,
- b. Tidak adanya intensifikasi/ekstensifikasi penangkapan/pemeliharaan pada perikanan darat.
- c. Kurangnya penyediaan benih ikan terutama untuk tambak dan kolam.
- d. Tidak adanya penyuluhan mengenai pemeliharaan ikan-ikan kolam dan tambak.

Kemunduran produksi perikanan rakyat ini di samping hal tersebut di atas juga dikarenakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nelayan non-pribumi, yang memiliki alat-alat penangkapan yang serba modern di samping modal yang cukup.

**Tabel III.21. Produksi ikan basah dan kering (dalam ton) tahun 1967 – 1972.**

Tahun	Produksi asal dalam basah	Pemakaian produksi		Keterangan
		Basah	Kering	
1967	153.000	68.050	31.383	
1968	159.000	71.550	29.130	
1969	163.000	74.350	30.250	
1970	170.000	76.837,5	31.304	
1971	178.000	80.212,5	32.690	
1972	180.000	84.600	34.466	

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) tahun 1973.

**Tabel III.22. Kegiatan perdagangan ikan.**

Tahun	Antar pulau (kg)	yang diekspor (kg)	Keterangan
1	2	3	4
1967	22.583.844	9.181.421	X) Angka sementara
1968	29.249.476	8.293.600	XX) Angka diterima lengkap
1969	19.160.031	11.239.600	
1970	18.225.354	3.358.700	
1971	5.490.875 X)	917.474 XX)	

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) – 1973.

## G. PERINDUSTRIAN.

### 1. Jenis industri dan lokasinya.

Di daerah propinsi Riau terdapat berbagai jenis industri yang tersebar di daerah-daerah tingkat II. Data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian Propinsi Riau jenis-jenis industri yang ada meliputi 70% jenis perusahaan. Untuk menentukan besar, sedang dan kecilnya industri dapat dilihat dari jumlah tenaga buruh yang dipakai.

Untuk propinsi Riau ukuran tersebut adalah sebagai berikut. Industri kecil, tenaga kerja antara 5 – 19 orang, industri sedang, tenaga kerja antara 20 – 99 orang, dan industri besar, tenaga kerja lebih dari 100 orang. Di Riau terdapat 12 perusahaan besar, 40 perusahaan sedang dan 690 perusahaan kecil.

Lokasi industri yang ada di Propinsi Riau dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Banyaknya	L o k a s i
1	2	3	4
1.	Kilang padi	98	Kampar Indragiri Hilir Bengkalis
2.	Es lilin	46	Terdapat pada setiap Dati II
3.	Gilingan kopi	8	Pekanbaru Kepulauan Riau Bengkalis
4.	Pabrik Mie	8	Bengkalis Kepulauan Riau
5.	Pengolahan teh	1	Bengkalis
6.	Sabun/Hunkue	2	Bengkalis

1	2	3	4
7.	Kecap/Taoco	3	Bengkalis Kepulauan Riau
8.	Ikan Asin/Bilis	51	Indragiri Hilir Bengkalis Kepulauan Riau
9.	Terasi	18	Bengkalis
10.	Roti/Kue-kue	21	Pekanbaru Kampar Indragiri Hulu Bengkalis dan Kepulauan Riau
11.	Limonade	15	Pekanbaru Kampar Indragiri Hulu Bengkalis Kepulauan Riau
12.	Alkohol	4	Bengkalis Kepulauan Riau
13.	Peti es kotak kayu	—	Bengkalis
14.	Penggergajian & Pengolahan kayu	107	Terdapat pada setiap Dati II
15.	Percetakan	9	Pekanbaru Indragiri Hulu Bengkalis
16.	Barang-barang plastik	2	Pekanbaru
17.	Minyak kelapa	33	Terdapat pada setiap

1	2	3	4
			Dati II
18.	S a b u n	4	Bengkalis Kepulauan Riau
19.	Obat-obatan/Jamu	5	Bengkalis
20.	S a g u	90	Kampar Indragiri Hilir Bengkalis Kepulauan Riau
21.	Pengasapan karet		Pekanbaru Indragiri Hulu Bengkalis Kepulauan Riau
22.	Remilling Karet	6	Pekanbaru Indragiri Hulu Bengkalis
23.	Jubin/Batu Kerawan	2	Pekanbaru
24.	Batu bata	34	Pekanbaru Kampar Indragiri Hulu Bengkalis Kepulauan Riau
25.	Galian bukan logam	4	Kampar Kepulauan Riau
26.	Reparasi/Mengelas Mesin-mesin	23	Indragiri Hilir Bengkalis
27.	Pengolahan pasir bersih	1	Kepulauan Riau

1	2	3	4
28.	Dok/Body kapal	41	Pekanbaru Bengkalis Kepulauan Riau
29.	Alat-alat rumah tangga.	9	Pekanbaru
30.	Pakaian Sulam dan sejenis	1	Kepulauan Riau
31.	Kompeksi/Pakaian	2	Kepulauan Riau
32.	Es batu/balok	22	Pekanbaru Kampar Indragiri Hilir Bengkalis Kepulauan Riau
33.	Crumb Rubber	8	Pekanbaru Kampar Indragiri Hulu
34.	Barang dari besi	18	Pekanbaru Kampar Bengkalis
35.	Dapur gambir	11	Kepulauan Riau

Sumber : Bappeda Dati I Riau. Data Dasar Daerah Tingkat I Riau. tahun 1976.

## 2. Perkembangan Produksi.

Mengenai perkembangan produksi dari industri-industri yang terdapat di Daerah Tingkat I Riau, yang dapat kami kumpulkan adalah data tahun 1969 – 1971 untuk beberapa jenis industri saja.

**Tabel III.23. Perkembangan perusahaan/perindustrian-perusahaan limonade dan produksi di Propinsi Riau.**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah produksi (liter)
1969	31	304.720
1970	32	279.614
1971	33	313.825

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Riau untuk Bahan Perencanaan Pembangunan tahun 1972.

**Tabel III.24. Perkembangan Perusahaan/Produksi ikan asin/teri di Propinsi Riau.**

Tahun	Jumlah Perusahaan (buah)	Jumlah Produksi (ton)
1969	124	83.545
1970	124	103.710
1971	127	109.363

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Riau untuk Bahan Perencanaan Pembangunan tahun 1972.

**Tabel III.25. Perkembangan perusahaan dan produksi batu bata di Propinsi Riau.**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Produksi (buah)
1	2	3
1969	40	7.804.400
1970	44	9.270.920
1971	45	8.788.000

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Riau untuk Bahan Perencanaan Pembangunan tahun 1972.

**Tabel III.26. Perkembangan dan produksi Perusahaan pembuatan kapal kayu di Propinsi Riau.**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Produksi dan reparasi berat (buah)
1969	30	72
1970	31	64
1971	44	76

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) tahun 1973.

**Tabel III.27. Perkembangan Perusahaan/Produksi/Pemakaian Kopra pada Industri minyak kelapa di Propinsi Riau.**

Tahun	Jumlah (buah)	Produksi Kopra (kg)	Produksi (kg)
1	2	3	4
1969	27	8.586.778	5.876.006
1970	39	3.410.551	2.131.247
1971	41	3.490.590	2.049.647

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) tahun 1973.

**Tabel III.28. Perkembangan perusahaan dan jumlah produksi penggergajian kayu di propinsi Riau.**

Tahun	Jumlah Perusahaan (buah)	Jumlah produksi (m3)
1969	55	122.000
1970	57	193.812
1971	58	105.575

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) tahun 1973.

**Tabel III.29. Perkembangan Perusahaan/produksi Industri per-cetakan di Propinsi Riau.**

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Produksi (m3)
1	2	3
1969	13	940.000
1970	13	1.240.000
1971	14	1.470.000

Sumber : Universitas Riau – Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) tahun 1973.

## H. PERHUBUNGAN

### 1. Perhubungan laut.

Daerah Riau yang terdiri dari ribuan pulau besar kecil dengan wilayah daratan yang dilintasi oleh sungai-sungai yang navigable river (limited), menempatkan institusi perhubungan laut ikut memegang peranan dalam perkembangan sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Di daerah Riau sesuai dengan keadan geografis terdiri dari tiga jenis pelabuhan. Pelabuhan samudra, sungai, pelabuhan laut.

Di daerah Riau terdapat kurang lebih 32 buah pelabuhan yaitu :

- 1) Pelabuhan Pekanbaru – dipakai tahun 1913, kapasitas kelas III.
- 2) Pelabuhan Bengkalis – dipakai tahun 1905, kapasitas kelas IV.
- 3) Pelabuhan Selat Panjang – kapasitas kelas IV.
- 4) Pelabuhan Dumai – dipakai tahun 1966, kapasitas kelas I.
- 5) Pelabuhan Bagan Siapi-api – kapasitas kelas III.
- 6) Pelabuhan Rengat – kapasitas kelas IV.
- 7) Pelabuhan Tembilahan – kapasitas kelas IV.
- 8) Pelabuhan Sapat – kapasitas kelas V.
- 9) Pelabuhan Enok – kapasitas kelas V

- 10) Pelabuhan Pulau Kijang – kapasitas kelas V.
- 11) Pelabuhan Kuala Gaung – kapasitas kelas V.
- 12) Pelabuhan Kuala Mandah – kapasitas kelas V.
- 13) Pelabuhan Sungai Guntung – kapasitas kelas V.
- 14) Pelabuhan Tanjung Pinang – kapasitas kelas II.
- 15) Pelabuhan Tanjung Uban – kapasitas kelas IV.
- 16) Pelabuhan Belakang Padang – kapasitas kelas IV.
- 17) Pelabuhan Tanjung Balai Karimun – kapasitas kelas IV.
- 18) Pelabuhan Tanjung Batu – kapasitas kelas V.
- 19) Pelabuhan Moro Sulit – kapasitas kelas V.
- 20) Pelabuhan Senayang – kapasitas kelas V.
- 21) Pelabuhan Daik – kapasitas kelas V.
- 22) Pelabuhan Dabo Singkep – kapasitas kelas IV.
- 23) Pelabuhan Tambelan – kapasitas kelas V.
- 24) Pelabuhan Midai – kapasitas kelas V.
- 25) Pelabuhan Serasan – kapasitas kelas V.
- 26) Pelabuhan Ranai – kapasitas kelas V.
- 27) Pelabuhan Sedanau – kapasitas kelas V.
- 28) Pelabuhan Terempah – kapasitas kelas IV.
- 29) Pelabuhan Letung – kapasitas kelas V.
- 30) Pelabuhan Rejang – kapasitas kelas V.
- 31) Pelabuhan Siak Sri Indrapura – dipakai tahun 1910, kapasitas kelas V.

## 2. Perhubungan Darat.

Jaringan-jaringan jalan raya untuk kendaraan bermotor dalam daerah Riau adalah sebagai berikut :

- a. Jaringan jalan yang menghubungkan Propinsi Riau dengan Propinsi lainnya seperti Sumatera Barat.
- b. Jaringan yang menghubungkan Kabupaten-kabupaten/Kotamadya dalam Propinsi Riau.

Pada dasarnya ada empat macam status jalan, masing-masing ; Jalan Negara, Jalan Propinsi, Jalan Kabupaten/Kotamadya dan Jalan Kecamatan/Desa.

Di samping itu ada jalan yang berstatus khusus yakni jalan-jalan yang dibuat oleh Perusahaan Asing seperti jalan antara Pekanbaru – Dumai (180 km) secara resmi jalan ini telah diserahkan kepada Propinsi Riau (Pemerintah Daerah) namun pe-

meliharaannya tetap dilakukan/diawasi oleh PT. Caltex. Jalan khusus lainnya ialah antara Buatan – Lirik yang dibuat oleh PT. Stanvac Indonesia (141 km). Secara garis besarnya kondisi jalan adalah sebagai berikut :

- a. Jalan Pekanbaru – Rantau Berangin watas dengan Sumatera Barat (95 km) adalah jalan aspal. Dipakai mulai tahun 1905 kapasitas kelas III (3,5 ton tekanan gambar).
- b. Jalan Pekanbaru – Dumai (180 km) adalah jalan aspal minyak mentah, mulai dipakai tahun 1957 kapasitas kelas III.
- c. Jalan Rantau Berangin – Pasir Pangaraian – Sungai Korang, watas Sumatera Utara (155 km), yang baru diaspal 25 km selebihnya masih jalan tanah/batu. Mulai dipakai tahun 1920 kapasitas kelas IV (2 ton tekanan gambar).
- d. Jalan Pekanbaru (Simpang Tiga) – Teluk Kuantan – Rengat – Kuala Cinaku (350 km) jalan batu/tanah, mulai dipakai tahun 1915 (Pekanbaru – Teluk) kapasitas kelas III/a (2,75 ton tekanan gambar).
- e. Jalan Teluk Kuantan – Lubuk Jambi – watas Sumatera barat (40 km), jalan batu/tanah, mulai dipakai tahun 1917 kapasitas kelas IV.
- f. Jalan Duri – Sungai Rangau – Kota Pinang, watas Sumatera Utara (sedang dibuka secara bertahap oleh PT. Caltex). Jalan Duri – Sungai Rangau (30 km) jalan aspal minyak mentah, mulai dipakai tahun 1954 kapasitas kelas III.

Di daerah Propinsi Riau terdapat jenis jalan-jalan dengan panjang masing-masing sebagai berikut :

Jalan Negara	:	100	km
Jalan Propinsi	:	948.300	km
Jalan Kabupaten	:	1.416.462	km
Jalan Kotamadya	:	49.470	km
Jalan Desa	:	Data belum ada.	
<b>J u m l a h</b>	:	<b>2.514.232</b>	<b>km</b>

Dengan perincian kelas-kelasnya :

Jalan kelas III	:	454.300	km
Jalan kelas III/a	:	158	km
Jalan kelas IV	:	436	km
Jalan kelas V	:	1.465.932	km
		<hr/>	
Jumlah	:	2.514.232	km

Dari panjang jalan ini yang berkonstruksi aspal hanyalah 198,330 km, sedangkan lainnya merupakan jalan-jalan biasa dengan penge-  
rasan saja. Jalan-jalan tanah/kerikil sepanjang 2.315,602 km, umumnya jalan-jalan ini menghubungkan antara sentra produksi dengan tempat-tempat processing dan pelabuhan ekspor, seperti Pekanbaru – Rengat dan Dumai.

Penggunaan sepeda dimulai tahun 1900 (Pekanbaru), penggunaan Bus dimulai tahun 1915 (Pekanbaru) dan penggunaan Kereta api dimulai tahun 1942 sampai awal tahun 1946, menghubungkan Pekanbaru – Muara Lembu – Logas dengan panjang kurang lebih 160 km – jalan ini dibuat pada masa pemerintahan Jepang untuk keperluan transport menghubungkan Pekanbaru dengan Sumber (rencana) setelah kemerdekaan jalan ini tidak pernah dirawat dan diusahakan/dipakai lagi sehingga akhirnya hancur begitu saja, sedangkan bekas-bekas lokomotif dan rel kereta api tersebut dijual sebagai besi tua.

### 3. Perhubungan Udara.

Lapangan udara yang digunakan untuk angkutan udara sipil di Daerah Riau baru ada empat buah. Khusus untuk keperluan **pertanian** ada lapangan khusus di Dumai.

Keempat lapangan udara Pekanbaru, yaitu :

- Lapangan udara Simpang Tiga. Terletak kurang lebih 9 km dari kota Pekanbaru, dipakai mulai tahun 1930 dengan kapasitas dapat menampung pesawat-pesawat jenis Fokker 28 dengan panjang landasannya 1.850 m.
- Lapangan udara Jayapura di Rengat. Lapangan udara ini mulai dipakai tahun 1957, kapasitas dapat menampung pesawat jenis Dakota – Fokker 27. Panjang landasan 1.500 m.

- c. Lapangan udara Kijang – Tanjung Pinang. Pelabuhan udara ini mulai dipakai tahun 1943, kapasitas dapat menampung pesawat jenis Fokker – 27. Landasan panjangnya 1.500 m.
- d. Lapangan udara Dabo Singkep, lapangan ini khusus untuk Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI).
- e. Lapangan udara Peranap (Perintis) dipakai tahun 1971 untuk Helly.
- f. Lapangan udara Pinang Kampai (Dumai) khusus digunakan untuk Pertamina, lapangan ini mulai dipakai tahun 1975. Jenis pesawat yang dapat mendarat Fokker 27, sedangkan lapangan udara perintis Sungai Pakning juga khusus untuk keperluan Pertamina, kapasitas untuk pesawat Skyvant.

#### 4. Pos dan Telekomunikasi.

Jumlah dan lokasi : Sampai saat ini Propinsi Riau mempunyai 7 (tujuh) kantor pos dengan 18 buah kantor pos pembantu dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kantor Pos Pekanbaru dengan :
  - 1) Kantor pos pembantu Bangkinang.
  - 2) Kantor pos pembantu Dumai.
  - 3) Kantor pos pembantu Siak Sri Indrapura.
  - 4) Kantor pos pembantu Pasir Pangaraian.
  - 5) Kantor pos pembantu Airport Simpang Tiga.
- b. Kantor pos Selat Panjang.
- c. Kantor Pos Bengkalis.
- d. Kantor pos Rengat dengan :
  - 1) Kantor pos pembantu Baserah.
  - 2) Kantor pos pembantu Taluk Kuantan.
  - 3) Kantor pos pembantu Lubuk Jambi.
  - 4) Kantor pos pembantu Cerenti.
  - 5) Kantor pos pembantu Lirik.
- e. Kantor pos Tembilahan.
- f. Kantor pos Bagan Siapi-api.

- g. Kantor Pos Tanjung Pinang dengan :
- 1) Kantor pos pembantu Perempa.
  - 2) Kantor pos pembantu Tanjung Balai Karimun.
  - 3) Kantor pos pembantu Tanjung Batu.
  - 4) Kantor pos pembantu Tanjung Uban.
  - 5) Kantor pos pembantu Dabo Singkep.
  - 6) Kantor pos pembantu Moro Sulit.
  - 7) Kantor pos pembantu Kijang.

Selain itu terdapat pula rumah-rumah pos seperti di Sungai Apit, Sungai Pakning, Pulau Halang, Duri dan Dumai. Pada rumah-rumah pos ini tidak dilakukan penjualan benda-benda pos, hanya mengurus surat-menyurat saja. Pos-pos keliling terdapat di kepulauan Riau. Pada tanggal 1 Juli 1977 di Pekanbaru telah diresmikan pula Kantor Pos dan Giro Pekanbaru berlantai dua, terletak di jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru.

Telekomunikasi berusaha di bidang, telepon, telegraf, telex Radio, Televisi dan Radio Teleponi. Sistem hubungan yang dipakai pada telepon adalah : Central Batery. Jumlah pemakai pesawat telepon pada saat ini 2.301 dengan perincian sebagai berikut : 808 pemerintah, 129 militer dan 1.364 umum. Dapat dilihat penambahan pesawat telepon dari tahun ke tahun sangat sedikit sekali. Sebab penambahan tersebut berdasarkan atas permintaan langganan. Demikian juga langganan dari instansi pemerintah sebanyak 35,1%, instansi militer 5,6%, dan perusahaan industri/toko-toko dan rumah-rumah rakyat 59% dan jelaslah permintaan terbanyak adalah dari umum.

84,5% dari permintaan langganan se Propinsi Riau dapat terpenuhi, kecuali Tanjung Pinang, Tembilahan, Dumai, disebabkan kurangnya pesawat telepon dan jaringan yang tersedia. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel III.30, 31. Sebaliknya di Bengkalis terjadi pengurangan jumlah pesawat.

Pesawat telegraf terdapat di :

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| a) Kabupaten Kampar         | : Bangkinang, Pasir Pangaraian.      |
| b) Kabupaten Bengkalis      | : Bengkalis, Dumai, Bagan Siapi-api. |
| c) Kabupaten Indragiri Hulu | : Rengat, Air Molek.                 |
| d) Kodya Pekanbaru          | : Kota Pekanbaru.                    |
| e) Kepulauan Riau           | : Tanjung Pinang.                    |

Pesawat telex hanya beberapa daerah saja yang menggunakan seperti :

- a) Kodya Pekanbaru, Caltex.
- b) Tanjung Pinang.

Hubungan dengan telex hanya dilakukan dengan kota-kota yang ada central telex. Kota-kota yang sering dihubungi antara lain : Jakarta, Medan, Padang, Yogyakarta, Surabaya dan Semarang.

Radio cukup memegang peranan penting dalam penyampaianya :

- a. Pemberitaan Umum.
- b. Berita Keluarga, berita kemalangan, berita kelahiran dan berita ucapan selamat, dan lain-lain.
- c. Berita panggilan/pengumuman-pengumuman/pemberitahuan/instruksi.
- d. Radiogram.
- e. Hiburan-hiburan.

Dipandang dari kepentingannya regional kapasitas pemancar yang ada ini telah memadai. Tetapi dipandang dari segi perkembangannya yang mendatang sehubungan dengan strategi studio RRI Pekanbaru ini dalam hubungan Jakarta – Medan dan hubungan ke luar negeri yaitu ke Malaysia dan Singapura, perlu adanya peningkatan kapasitas pemancar menjadi 50 Kw. Di samping studio RRI, di Pekanbaru terdapat station Radio Caltex, Pemda, Jawatan Pelayanan (Dumai), Jawatan Penerangan untuk keperluan-keperluan yang berbeda-beda. Di samping itu masih terdapat satu studio lagi di Tanjung Pinang yang berkekuatan 1 Kw.

Khusus di kota Pekanbaru juga terdapat beberapa studio Amatir. Pembangunan studio televisi di ibukota Propinsi Riau baru dalam taraf penyelesaian. Untuk sementara menanti penyelesaian pembangunan station transmisi, maka untuk merelay siaran-siaran Jakarta dipakai SKSD Palapa. Dengan dapatnya ditangkap siaran-siaran Jakarta secara langsung, maka jumlah pemakaian pesawat televisi semakin meningkat. Namun demikian siaran-siaran yang banyak diambil adalah siaran-siaran dari televisi Singapura dan Malaysia.

**Tabel III.30. Banyaknya pesawat telepon yang terpasang di Propinsi Riau.**

No.	Lokasi	1969		1970		1971		1972	
		lb	cb	lb	cb	lb	cb	lb	cb
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pekanbaru	922	—	324	309	271	985	328	99
2.	Bangkinang	—	—	—	26	—	30	—	33
3.	Rengat	56	—	56	57	—	60	—	—
4.	Taluk Kuantan	29	—	29	—	29	—	29	—
5.	Air Molek	—	15	—	15	—	15	—	13
6.	Tembilahan	—	—	104	—	120	—	126	—
7.	Bengkalis	132	—	108	—	85	—	62	—
8.	Bagan Siapi-api	303	—	311	—	348	—	360	—
9.	Tanjung Pinang	—	—	165	—	173	—	179	—
10.	Dumai	60	—	85	—	92	—	110	—
Jumlah		1.502	15	1.091	850	1.178	1.003	1.258	104
Jumlah lb + cb =		1.517		1.941		2.181		2.301	

Sumber : Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) Universitas Riau 1973.

**Tabel III.31. Jumlah Telepon yang dipakai langganan tahun 1972.**

No.	Lokasi	Pemerintah		Militer		Umum	
		lb	cb	lb	cb	lb	cb
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pekanbaru	121	329	6	45	201	622
2.	Bangkinang	—	9	—	8	—	15
3.	Rengat	34	—	10	—	20	—
4.	Teluk Kuantan	11	—	2	—	16	—
5.	Air Molek	—	7	—	1	—	7
6.	Tembilahan	81	—	12	—	33	—
7.	Bengkalis	45	—	11	—	6	—
8.	Bagan Siapi-api	37	—	10	—	313	—
9.	Tanjung Pinang	102	—	19	—	58	—
10.	Dumai	32	—	5	—	73	—
Jumlah		463	345	75	54	720	644
Jumlah lb + cb =		808		129		1.364	

Sumber : Universitas Riau, hasil penelitian Daerah Propinsi Riau (Bahan Perencanaan Pelita II) 1973.

## 5. Pariwisata.

Sektor pariwisata di Daerah Riau masih dalam keadaan potensi yang belum dikembangkan. Potensi-potensi tersebut dalam bentuk : Kekayaan flora dan fauna, keindahan alam, dan kekayaan alam daerah lainnya.

Kekayaan Propinsi Riau dalam bentuk flora terkenal dan terkandung dalam kekayaan hutan, dengan luas 6,6 juta Ha atau 60% dari luas daratan. Sudah tiba saatnya kalau potensi ini dimanfaatkan sebagai obyek pariwisata.

Fauna di daerah Riau terbagi atas dua bahagian :

- 1) Di daerah Riau Kepulauan terdapat jenis burung (burung laut), ikan, karang, penyu dan lain-lain.
- 2) Di daerah Riau Daratan terdapat berbagai jenis binatang, yang dapat dijadikan objek hunting turis antara lain :
  - Gajah, badak, harimau, mawas, beruang, tenek, sipan, tapir, rusa, babi hutan, buaya, berbagai jenis ular, kera, pelanduk serta berbagai jenis burung.

Demi menjaga jenis binatang dari kepunahan maka pemerintah menetapkan beberapa hutan di Daerah Riau sebagai suaka alam yaitu :

- 1) Hutan di pulau Berkey di Kecamatan Bangko Kabupaten Bengkalis seluas 500 Ha yang berisi burung-burung laut.
- 2) Hutan di Kumantan Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar seluas 12.000 Ha yang berisikan : gajah, kijang, bajing, jeng-jang, kancil, pelanduk dan lain-lain.
- 3) Pulau Burung di Kecamatan Batam Kabupaten Kepulauan Riau seluas 400 Ha yang berisikan penyu dan burung-burung laut.

Kekayaan seni dan budaya Riau ini berupa :

- 1) Hasil-hasil kerajinan rakyat (antara lain tenunan Siak).
- 2) Tari-tarian daerah.
- 3) Nyanyian dan langgam Melayu.
- 4) Peninggalan kuno dan tempat bersejarah antara lain : Istana Sultan Siak di Siak Indrapura, Istana Penyengat di pulau Penyengat dan Candi Muara Takus di XIII Kota Kampar.

Kekayaan keindahan alam di daerah Riau ini berujud :

- 1) Keindahan laut pulau-pulaunya yang banyak terdapat di

Kabupaten Kepulauan Batam.

- 2) Keindahan sungai-sungainya yang dapat dilayari dan sekaligus dapat dijadikan objek pariwisata.
- 3) Keindahan lembah dan celahnya yang terdapat di perbatasan dengan Sumatera Barat yang sangat ideal sekali sebagai tempat peristirahatan. Daerah Riau sudah sangat dikenal sebagai penghasil minyak bumi yang terbesar di seluruh Indonesia.

Orang sudah banyak mengenyam dan menikmati minyak bumi ini, tetapi sudahkah banyak orang yang mengetahui bagaimana proses pengambilan minyak tersebut dari perut bumi. Di dalam hubungannya dengan ini perlu umum dan pariwisatawan diperkenalkan dengan proses pengambilan minyak tersebut. Untuk ini kiranya dapat pula objek-objek ladang serta peralatan pertambangan minyak ini dijadikan objek pariwisata. Objek-objek pariwisata di Propinsi Riau tidak seperti di Propinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang mempunyai tempat-tempat rekreasi yang sangat menarik bagi para turis. Tetapi biar pun demikian ternyata Propinsi Riau merupakan daerah transit bagi turis yang melalui ataupun yang berasal dari Singapura ataupun Malaysia dengan jalan menggunakan fasilitas perhubungan ferry yang ada antara Singapura dengan Tanjung Pinang. Sedangkan keramaian penduduk yang merupakan suatu keramaian adat dari penduduk di daerah Riau yaitu : "PACU JALUR" di mana pada hari-hari besar masyarakat mengadakan pacu sampan yang dibuat dari kayu-kayu hutan yang besar, sehingga satu batang kayu dapat dibuat satu sampan tanpa membelah-belah kayu, hanya membuat lubang tempat duduk pengemudi dan penumpang. Sampan yang demikian dinamakan JALUR dan merupakan suatu usaha gotong royong dari sekelompok penduduk yang akan ikut di dalam pacu jalan tersebut (baik tua, muda, laki-laki, perempuan).

Keramaian tersebut terdapat di daerah Indragiri Hulu.

Perkembangan pariwisata di daerah Riau pada umumnya belum begitu berkembang. Hal ini disebabkan karena belum adanya terlihat perhatian yang khusus terhadap hal tersebut, baik dari Pemerintah pusat apalagi dari pemerintah Daerah. Walaupun ada objek-objek pariwisata di Daerah Riau, namun hal tersebut belum merupakan daya tarik bagi para turis asing. Pusat-

pusat/objek pariwisata terletak sangat jauh dari ibukota Propinsi. Perhubungan sangat sulit, karena jalan-jalan menuju ke Daerah tersebut belum ada (sekarang baru ada jalan-jalan tanah ke Muara Takus dan Taluk Kuantan) yang dalam keadaan musim hujan memerlukan waktu beberapa hari untuk mencapai objek-objek pariwisata tersebut.

Begitu juga untuk Daerah Siak dan Penyengat dengan kapal laut memakan waktu beberapa hari. Sungguhpun demikian arus wisatawan asing yang datang ke Propinsi Riau cukup banyak. Jumlah wisatawan asing yang datang dan berangkat dari Dati I Riau dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel III.32. Jumlah wisatawan asing yang datang/berangkat dari Propinsi Dati I Riau tahun 1969 – 1974.**

No.	Tahun	B a n y a k   W i s a t a w a n			
		Datang		Berangkat	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6
1.	1969	3.239	457	2.151	364
2.	1970	7.030	761	6.592	745
3.	1971	10.388	843	10.662	890
4.	1972	10.968	1.038	11.068	1.120
5.	1973	16.971	1.765	16.936	1.809
6.	1974	23.384	1.789	22.971	1.731

Sumber : Bappeda Dati I Riau. Data dasar Daerah Tingkat I Riau 1976.

Kebangsaan dari wisatawan yang datang ke Propinsi Riau paling banyak berasal dari :

Singapura mencapai rata-rata 4.262 orang/tahun,

Malaysia mencapai rata-rata 2.714 orang/tahun,

Amerika mencapai rata-rata 1.355 orang/tahun,

Inggris mencapai rata-rata 1.201 orang/tahun,  
Australia dan lainnya rata-rata 555 orang/tahun.

**Tabel III.33. Daftar nama Travel Biro yang ada di Propinsi Daerah Tingkat I Riau.**

No.	N a m a	A l a m a t
1	2	3
1.	Tiwi Travel	Jalan Diponegoro 26 Pekanbaru.
2.	CV. Angkasa Travel	Jalan Hasyim Ashari 3 Pekanbaru.
3.	PT. Mitra Kencana	Jalan Jenderal Sudirman 86 Pekanbaru.
4.	Travel & Baggage Transport Agent	Jalan HOS Cokroaminoto 18 Pekanbaru.
5.	CV. Nusa Indah Travel.	Jalan Imam Bonjol 155 Pekanbaru.
6.	Nusantara Air Charter	Jalan HOS Cokroaminoto Pekanbaru.
7.	Fisa Travel	Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.
8.	CV. Perantau Travel	Jalan A. Yani Selat Panjang.
9.	CV. Deli Travel & Co	
10.	PT. Elteha Inter- national.	Jalan Imam Bonjol Pekanbaru.
11.	PT. Elteha Inter- national.	Jalan Jenderal Sudirman Dumai.
12.	CV. Arkad	Jalan Talib No. I Tanjung Pinang.
13.	Elteha	Jalan Bintang 683 Tanjung Pinang.
14.	PT. Transna	Jalan Pasar Ikan 488 Tanjung Pinang.
15.	PT. Desa Air	Jalan Sumatera Tanjung Pinang.

Sumber : Bappeda Dati I Riau. Data dasar Daerah Tingkat I Riau Tahun 1976.

## I. PERDAGANGAN.

### 1. Perdagangan dalam negeri.

Pengadaan dan penyaluran 9 bahan pokok. Pola pengadaan

9 bahan pokok beberapa bahan penting lainnya adalah sebagian besar masih tergantung dari pengadaan yang berasal dari luar daerah baik melayani perdagangan antar pulau maupun perdagangan antar daerah. Pengadaan barang dengan demikian sangat tergantung kepada kelancaran pengangkutan laut dan darat, baik untuk daerah Riau Daratan maupun untuk Riau Kepulauan. Beberapa pola pengadaan barang yang dialami selama beberapa tahun ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk daerah-daerah seperti Bagan Siapi-api, Selat Panjang dan Bengkalis, arus pengadaan barang sebahagian besar berasal dari Medan/Tanjung Balai Asahan dan Jakarta.
- b. Daerah Kabupaten Riau Kepulauan disupply dari Jakarta/Semarang dan sebagian dari Medan untuk kecamatan Kundur/Tanjung Balai Karimun.
- c. Kabupaten Indragiri Hulu dan Hilir mendapat supply dari Jakarta dan Jambi dan sebagian dari Sumatera Barat.

Dari data yang telah dikumpulkan, situasi perkembangan pengadaan dan penyaluran 9 bahan pokok selama tahun 1976 adalah sebagai berikut :

1. Beras, Daerah Propinsi Riau secara keseluruhannya masih minus dalam hal propinsi beras.  
Dari 6 daerah Tingkat II seluruh Riau hanya yang surplus beras adalah : Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 19.772/ton dan Kabupaten Kampar 1.206/ton.
2. Gula pasir.
3. Garam, pengadaan 24.094/ton dan penyaluran 21.943 ton.
4. Bahan dan tekstil pengadaan dan penyaluran batik dan tekstil untuk daerah Riau tidak ada masalah karena jumlah barang-barang tersebut cukup banyak tersedia dengan harga stabil.
5. Sabun cuci, tidak terdapat adanya permasalahan, karena selain dari luar juga terdapat sabun cuci produksi lokal.
- 6) Bahan pokok lainnya tidak terdapat adanya permasalahan di mana pengadaan dan penyalurannya cukup lancar dengan harga yang stabil.

Perkembangan perdagangan antar pulau barang-barang dalam pengawasan (SK. Menteri Perdagangan nomor : 101/SK/

Tabel III.34. Volume Perdagangan antar pulau barang-barang dalam pengawasan di daerah Riau tahun 1975 – 1976.

Pelabuhan	Asal jenis barang	Pelabuhan Tujuan	Realisasi AP (ton)	
			1975	1976
Pekanbaru	Kopi Biji	Bengkalis	20	—
		Tanjungpinang	4,20	—
		Selat Panjang	—	2
Tanjungpinang	Biji Timah	Muntok	287	78
		Kopra	262,50	—
	Kopi Biji	Jakarta	257,90	—
		Semarang	2.275,82	1.500
		Terempa	—	294
	Biji Timah	Dabo	—	909,69
		Singkep	—	—
Tg. B. Karimun	Biji Kopi	Selat Panjang	—	6
	Karet	Pekanbaru	—	752,76
	Biji Timah	Dabo Singkep	2.123,30	397,18
	Karet	Pekanbaru	—	85,50
		Tanjungpinang	—	498,06
Bengkalis	Karet	Pekanbaru	8.451,30	1.144,85
		Siak Sri Indrapura	146	434
		Tanjungpinang	—	484
		Tembilahan	—	14
		Jakarta	15.420	19.182
Tembilahan	Kopra	Padang	709	912
		Semarang	—	3.232,20
		Rengat	—	20,50
	Kopi biji	Selat Panjang	—	6
		Karet	Rengat	412
		Jambi	75	—
Jumlah			3.044,02	39.853,39

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Riau tahun 1976.

VIII/76 tanggal 14 Agustus 1976) untuk daerah Riau hanya meliputi 4 komoditi yaitu : karet, kopra, kopi, dan biji timah, sedangkan dua komoditi lainnya yang diatur/diawasi perdagangan antar pulau adalah minyak kelapa dan cengkeh. Untuk keempat komoditi pertama, volume perdagangan antar pulau tahun 1968 mengalami kenaikan sebesar 30,91% dibandingkan dengan tahun 1975, dengan daerah pemasaran : Jakarta, Semarang, Medan dan Muntok.

**Tabel III.35. Volume perdagangan antar pulau kopra dari daerah Riau menurut pelabuhan dan daerah pemasaran tahun 1976 (ton).**

Bulan	Pelabuhan Pengiriman	Pelabuhan Tujuan			Jumlah
		Jakarta	Semarang	Padang	
1	2	3	4	5	6
Januari	Tembilahan	1.015	—	—	1.015,00
	Tg. Pinang	—	175	—	75,00
	Terempa	—	162,50	—	162,50
Pebruari	Tembilahan	1.230	—	—	1.230,00
	Tg. Pinang	345	200	—	545,00
	Terempa	—	1.102,70	—	1.102,70
Maret	Tembilahan	2.109	—	—	2.109,00
April	Tembilahan	2.410	—	—	2.410,00
Mei	Tembilahan	1.668	—	297	1.965,00
Juni	Tembilahan	1.648	—	175	1.823,00
	Terempa	600	—	—	600,00
Juli	Tembilahan	350	—	—	350,00
Agustus	Tembilahan	2.605	—	80	2.685,00
September	Tembilahan	2.605	—	290	943,00
	Terempa	—	592	—	592,00
Oktober	Tembilahan	1.506,50	—	—	1.506,50
Nopember	Tembilahan	1.418,50	—	70	1.488,50
	Terempa	324	—	—	324,00
Desember	Tembilahan	1.300	—	—	1.300,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.182</b>	<b>2.232,20</b>	<b>912</b>	<b>22.326,20</b>

**Tabel III.36. Volume Perdagangan antar pulau minyak kelapa dari Daerah Riau menurut pelabuhan asal dan Daerah pemasaran tahun 1976 (dalam ton).**

Bulan	Pelabuhan Pengiriman	Pelabuhan Tujuan			Jumlah
		Jakarta	Palembang	Medan	
1	2	3	4	5	6
Januari	Tembilahan	1.256	—	—	1.256
Pebruari	Tembilahan	1.080	—	—	1.080
Maret	Tembilahan	2.031,50	—	—	1.305
April	Tembilahan	2.031,50	—	—	2.031,50
M e i	Tembilahan	2.267,70	845	—	3.112,70
Juni	Tembilahan	1.820,80	1.144,50	—	3.065,70
Juli	Terempa	290	—	—	290
Agustus	Tembilahan	2.612	235,50	—	2.747,50
Septembe	Tembilahan	3.369	365	—	3.734
	Terempa	250	—	—	250
Oktober	Tembilahan	430	430	—	866
	Nopember	Tembilahan	1.770	356,50	—
Desember	Terempa	170	—	—	170
	Tembilahan.	1.230	1.114,20	85	2.429,20
	Terempa	310	—	—	310
Jumlah		20.957	4.938,40	85	25.980,40

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Riau tahun 1976.

Semen, pola pengadaan dan penyaluran semen di daerah Riau selama tahun 1976 masih tetap berpedoman pada SK Mendag. No. 49/KP/II/74 tanggal 6 Pebruari 1974, walaupun pada bulan Juli 1976 telah dikeluarkan SK Mendag No. 170/KP/VII/1976 tanggal 10 Juli 1976, sampai berakhirnya tahun 1976 praktis belum terlaksana sama sekali. Seperti pada tahun-tahun sebelum

nya pengadaan semen di daerah Riau bersumber dari semen dalam negeri, semen impor dan semen antar pulau. Perkembangan jumlah pengadaan semen selama tahun 1976 yang terdiri dari semen dalam negeri (semen Padang), semen import dan semen antar pulau berjumlah 27.989,74 ton dengan perincian sebagai berikut :

**Cerry Over tahun 1975.**

1) Semen Padang .....	=	332,98 ton
2) Semen Impor .....	=	1.630 ton
		<hr/>
Jumlah		1.962,98 ton

**Pemasukan tahun 1976.**

1) Semen Padang .....	=	22.381,36 ton
2) Semen Import .....	=	1.700 ton
3) Semen antar pulau .....	=	1.945,40 ton
		<hr/>
Jumlah		26.026,76 ton
Jumlah pengadaan	=	1.962,98 ton
		26.026,76 ton
		<hr/>
		27.989,74 ton

Khusus untuk semen antar pulau ini banyak berasal dari Sumatera Utara, Jambi dan Jawa, tercatat untuk tahun 1976 sebanyak 1.945,40 ton.

**2. Perdagangan luar negeri.**

Potensi ekspor daerah Riau pada umumnya meliputi dua sektor yakni kegiatan ekspor minyak bumi yang dilakukan oleh PT. CPI, PT. STANVAC dan PT. PERTAMINA dan kegiatan ekspor non-minyak bumi seperti hasil-hasil pertanian, kehutanan, pertambangan dan lain-lainnya. Ekspor minyak bumi pada tahun 1976 berjumlah lebih kurang 333 juta barrel dengan nilai hampir 4 milyar dollar, sedangkan ekspor komoditi non-minyak bumi karena pasaran internasional yang baik dan kebijaksanaan Paket April 1976 dari pemerintah di bidang ekspor mencapai hasil devisa hampir 94 juta dollar Amerika.

Ekspor minyak bumi selama tahun 1976 mencapai 333 juta barrel atau rata-rata 27,75 juta barrel per bulan dengan hasil devisa sebesar US\$ 3.953 juta sedangkan tahun 1975 tercatat 326,5 juta barrel dengan nilai US \$ 4.346 juta. Perkembangan volume dan nilai ekspor tersebut selama tahun 1975 dan 1976 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.37. Angka-angka ekspor bulanan minyak bumi Daerah Riau (berdasarkan E.3. yang diterima).**

Bulan	Tahun 1975		Tahun 1976	
	Barrels	US\$	Barrels	US\$
1	2	3	4	5
Januari	24.719.870	530.602.698,51	39.543.503	487.005.888,00
Pebruari	21.975.457	301.243.911,63	36.387.929	348.751.284,00
Maret	22.766.780	285.286.379,87	38.151.327	349.789.074,00
April	23.215.958	298.431.935,92	17.703.020	214.368.134,41
M e i	19.835.149	248.374.787,40	27.793.012	337.235.437,39
Juni	28.598.851	362.629.236,34	23.618.283	300.016.582,06
Juli	25.354.976	315.186.416,10	24.034.648	309.616.582,06
Agustus	28.167.453	323.657.355,45	25.561.671	335.069.803,94
September	35.812.808	464.321.143,25	22.094.593	281.708.141,34
Oktober	25.995.038	315.373.182,26	21.806.789	278.212.175,60
Nopember	23.870.111	293.322.934,40	28.045.766	354.304.194,27
Desember	28.203.889	608.886.640,80	28.388.079	357.140.655,95
Jumlah	326.536.334	4.346.756.621,93	333.128.620	3.953.217.406,26

Perkembangan ekspor minyak bumi menurut negara tujuan selama tahun 1976, menunjukkan bahwa hampir 45,24% atau 150,7 juta barrels ditujukan ke Jepang, 32,06 atau 106,8 juta barrels ke Amerika Serikat dan Trinidad dengan 48,8 juta barrels atau 14,65%. Gambaran ekspor menurut negara tujuan adalah seperti berikut :

**Tabel III.38. Angka-angka ekspor minyak bumi daerah Riau menurut pelabuhan tujuan tahun 1975 - 1976.**

Negara Tujuan	Tahun 1975		Tahun 1976	
	Barrels	US\$	Barrels	US\$
Jepang	171.665.997	2.425.216.803,62	150.710.395	1.665.320.996,00
Singapura	1.601.981	22.665.315,52	9.624.160	102.510.030,00
USA	100.183.770	1.249.294.168,85	106.895.000	1.355.955.904,00
Trinidad	36.767.301	447.102.146,20	48.897.056	617.875.536,80
Hawaii	13.521.941	163.923.866,40	16.484.439	210.909.719,20
Saudi Arabia	6.865	243.004,64	15.246	257.054,50
Taiwan	365.911	4.881.070,48	—	—
Australia	388.640	4.890.564,00	—	—
Kuwait	951	77.744,16	629	11.427,19
Belanda	2.032.995	28.461.988,06	—	—
Hong-kong	—	—	1.339	17.057,60
Philippina	—	—	500.336	361.680,01
<b>Jumlah</b>	<b>326.536.334</b>	<b>4.340.756.621,93</b>	<b>333.128.620</b>	<b>3.953.217.406,26</b>

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Riau tahun 1977.

Jenis komoditi ekspor minyak bumi dari daerah Riau yang tradisional dan paling menentukan baik karena volume dan menghasilkan devisa yang utama maupun karena secara langsung menyangkut kepentingan sosial ekonomi rakyat banyak ialah karet dan kayu. Komoditi ekspor karet yang terdiri dari jenis konvensional dan crumb rubber dan kayu yang terdiri dari log, kayu gergajian, plywood merupakan lebih kurang 80% dari seluruh ekspor non minyak bumi dalam tahun 1976. Ekspor bauksit dari Pulau Bintan, batu granit, timah dan lain-lain, mengalami kemunduran. Ekspor hasil-hasil laut/perikanan dan hasil-hasil hutan meskipun hanya merupakan kurang lebih 3% dari seluruh ekspor daerah Riau mempunyai prospek pemasaran yang baik, karena di samping jenisnya banyak ia mempunyai sarana penunjang angkutan yang lancar ke Singapura dan Malaysia. Pekanbaru komoditi utama

yaitu kayu dan karet selalu memegang peranan penting dalam ekspor daerah Riau, baik dalam volume maupun nilainya Kecamatan kedua ekspor komoditi ini dapat berakibat kelesuan dalam perekonomian daerah, dalam bentuk menurunnya kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan petani. Perkembangan volume ekspor menurut komoditi sampai dengan bulan Maret 1977 adalah sebagai berikut :

**Tabel III.39. Volume ekspor menurut komoditi (dalam ribuan).**

No.	Tahun	Karet	Bauksit	Kayu	Kopra
1	2	3	4	5	6
1.	1970	52	1.229	631,9	17,87
2.	1971	45,6	1.392	937,9	4,88
3.	1972	43,3	1.165	1.062,9	4,82
4.	1973	41,2	1.322	1.699,3	7,50
5.	1974	43,5	1.261	1.672,5	—
6.	1975	49,2	970	866	10,17
7.	1976 x)	60,6	958	1.273,2	18,90
8.	1977	14,08	346	409	2,05

x) Sampai dengan Maret

Sumber : Bank Indonesia Cabang Pekanbaru — 1977.

Perkembangan nilai ekspor Daerah Riau dalam tahun yang sama adalah sebagai berikut :

**Tabel III.40 Nilai Ekspor menurut komoditi (dalam ribuan US\$).**

Tahun	Karet	Bauksit	Kayu	Kopra	Lain-lain
1	2	3	4	5	6
1970	16.586	6.170	6.488	2.976	1.085
1971	13.080	6.191	10.555	625	1.118
1972	10.994	5.598	11.271	584	1.190
1973	20.336	6.569	27.010	748	3.657
1974	26.356	6.798	36.290	—	3.446
1975	23.781	5.875	21.847	872	9.008
1976	3.856	6.455	34.241	1.606	8.624
1977x)	10.240	2.432	11.899	210	2.608

**Tabel III.41. Nilai Ekspor daerah Riau menurut negara tujuan (dalam ribuan US \$)**

Tahun	Singapura	Jepang	Jerman Barat	Lain-lain
1	2	3	4	5
1970	20.715	9.666	856	2.038
1971	15.804	13.192	131	2.442
1972	14.276	12.238	10	3.113
1973	33.651	18.633	143	5.890
1974	34.122	28.654	357	9.757
1975	32.891	16.989	3.	10.701
1976	43.829	25.823	1.057	18.733
1977x)	11.554	9.105	258	6.104

x) Sampai dengan Maret 1977

Sumber : Bank Indonesia Cabang Pekanbaru 1977.

## B A B IV

### WILAYAH-WILAYAH PEMBANGUNAN DALAM PROPINSI R I A U

#### A. PENDAHULUAN.

Seperti tercantum pada Buku IV Repelita II Wilayah pembangunan dalam daerah Propinsi Riau dibagi sebagai berikut :

1. Daerah Pembangunan I : meliputi daerah di bagian barat dengan pusat pengembangannya Pekanbaru. Daerah ini dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan.
2. Daerah Pembangunan II : meliputi daerah di bagian utara dengan pusat pengembangannya Dumai. Daerah ini dipersiapkan untuk kegiatan perindustrian dan perdagangan.
3. Daerah Pembangunan III : meliputi daerah di bagian selatan dengan pusat pengembangannya Rengat. Daerah ini dipersiapkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
4. Daerah Pembangunan IV : meliputi daerah di bagian timur dengan pusat pengembangannya Tanjung Pinang. Daerah ini dipersiapkan untuk usaha perdagangan dan perindustrian.

Daerah Propinsi Riau terdiri dari lima kabupaten dan satu kotamadya, yang terbagi dalam 67 Kecamatan; yang seluruhnya terdiri dari 724 desa; tersebar pada daerah daratan dan kepulauan seluas 94.562 Km<sup>2</sup> atau 9.456.200 hektar. Dengan areal yang seluas itu, untuk mencapai efisiensi ekonomi dan menumbuhkan pola-pola interpendensi antar daerah : cara pendekatan yang ditempuh adalah melalui pelaksanaan program dan perencanaan ekonomi dari satuan-satuan wilayah yang terdiri dari beberapa kecamatan, dan yang letaknya berdekatan serta memiliki problem-problem stagnasi ekonomi yang sama. Yang dimaksud dengan problem stagnasi ekonomi adalah hambatan-hambatan di bidang pengadaan prasarana ekonomi, penetranan teknologi pengembangan sumber-sumber alam, ataupun kurangnya permodalan dan masalah pembinaan tenaga kerja. Apabila kesemua

hal-hal tersebut dapat diatasi, pastilah akan dapat mendorong perkembangan ekonomi lebih cepat, serta memperbesar basis ekonomi dari wilayah yang bersangkutan.

Cara pendekatan ini merupakan identifikasi wilayah baik segi alami, sosial dan ekonomi; dalam rangka regionalisasi daerah, untuk setiap satuan-satuan wilayah pengembangan pembangunan. Satuan-satuan wilayah pengembangan ini akan merupakan satuan wilayah perencanaan atau "planning unit" untuk pembangunan lokal, ditinjau dalam kaitan tingkat-tingkat pembangunan nasional dan regional. Prinsip regionalisasi ini dalam menetapkan satuan-satuan wilayah pengembangan pembangunan merupakan pengelompokan dari dua atau lebih kecamatan, yang memiliki interdependensi ekonomi dalam pembatasan-pembatasan berikut ini.

- a. Lokasinya saling berdekatan
- b. Dihubungkan oleh satu sistem jaringan prasarana ekonomi yang berintegrasi.
- c. Terdapatnya problema stagnasi ekonomi yang bersamaan.

Masing-masing wilayah pengembangan pembangunan itu berintikan pada satu sentral konsentrasi penduduk yang relatif besar, yang merupakan pusat pemasaran produk, maupun sebagai pusat penyalur sarana-sarana produksi dan barang-barang yang diperlukan oleh penduduk dalam satu wilayah bersangkutan. Dengan demikian, dalam setiap satuan, wilayah pengembangan pembangunan terdapat satu pusat wilayah sebagai "sub regional town" yang dipilih di antara kota-kota kecamatan atau pelabuhan yang ada dalam satuan wilayah pembangunan tersebut. Sedangkan kota-kota kecamatan lainnya merupakan sub pusat wilayah yang disebut "hinterland town".

Dengan tersusunnya satuan-satuan wilayah pengembangan pembangunan, dapat ditetapkan alokasi proyek-proyek pembangunan, dapat ditetapkan berdasarkan sistem regionalisasi ini. Adapun pemilihan lokasi proyek-proyek fisik, ataupun pembangunan fasilitas sosial, seperti sekolah dan rumah sakit, ditetapkan pada lokasi-lokasi yang strategis ditinjau dari gaya pelayanannya kepada masyarakat dalam satuan wilayah pengembangan pembangunan tersebut. Dalam hubungan ini maka pembangunan prasarana ekonomi, mempunyai peranan yang penting dalam

membina dan mengembangkan ikatan-ikatan ekonomi, sosial dan fisik antara sub antara wilayah dengan daerah lingkungannya.

Identifikasi wilayah selanjutnya adalah untuk menetapkan secara lebih terperinci, basis-basis ekonomi, kondisi prasarana ekonomi, potensialitas wilayah, untuk penyusunan program-program pembangunan. Dengan demikian akan dapat tersusun penggolongan wilayah menurut tingkat kesiapannya untuk pembangunan. Perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang relatif minus, sesuai dengan ketentuan dalam Pola Umum Pelita II, dengan demikian akan dapat dilaksanakan dengan pola regionalisasi ini. Beberapa satuan wilayah pengembangan dikelompokkan dalam satu daerah Pembangunan, yang berorientasi pada satu Pusat Utamā sebagai suatu "Regional City". Fungsi pusat utama adalah sebagai koordinator dan terminal dari pemasaran produksi ataupun sebagai pusat penyaluran sarana-sarana produksi dan barang-barang keperluan satuan wilayah yang menjadi bagiannya.

## **B. REGIONALISASI DI PROPINSI RIAU.**

Berdasarkan prinsip-prinsip identifikasi wilayah seperti yang tersebut di atas, daerah propinsi Riau dibagi dalam 4 daerah Pembangunan (DP) dan 17 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang diperinci sebagai berikut :

### **1. Daerah Pembangunan I.**

Pusat utama Daerah Pembangunan I ialah PEKANBARU yang terdiri dari 3 satuan wilayah pengembangan, yaitu :

- a. **Satuan wilayah pengembangan**, dengan wilayah Pekanbaru; meliputi daerah-daerah :
  - 1) Kecamatan Siak Hulu, kecuali desa-desa Benamanenek dan Kesikan dengan sub pusat Pekanbaru.
  - 2) Kecamatan Siak, dengan sub pusat Siak Sri Indrapura.
  - 3) kecamatan Langgam bagian Utara, termasuk desa-desa Langgam, Penarikan, Kuala Terusan, dengan sub pusat Langgam.
  - 4) Kecamatan Pangkalan Kuras bagian Utara, termasuk desa-desa Kesuma, Kemang, Palas, Sorek I dan Sorek II dengan sub pusat Desa Kesuma.

- 5) Kecamatan Punut bagian Utara, termasuk desa-desa Pangkalan Bunut, Delik, Belawan, Teleyep, Kuala Tolam, Petani, Balam Merah, Rangsang, dan Merbau; dengan sub pusat Pangkalan Bunut.
- b. Satuan Wilayah Pengembangan 2, dengan pusat wilayah : Bangkinang. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Bangkinang, dengan sub pusat Bangkinang.
  - 2) Kecamatan Kampar, dengan sub pusat Air Tiris.
  - 3) Kecamatan Kampar Kiri, dengan sub pusat Lipat Kain.
  - 4) Kecamatan XIII Koto Kampar, dengan sub pusat Batu Bersurat.
- c. Satuan Wilayah Pengembangan 3, dengan sub pusat wilayah : Pasir Pangaraian. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Rambah, dengan sub pusat Pasir Pangaraian.
  - 2) Kecamatan Tembusai, dengan sub pusat Dalu-Dalu.
  - 3) Kecamatan Kepanuhan, dengan sub pusat Koto Tengah.
  - 4) Kecamatan Kunto Darussalam, dengan sub pusat Koto Lama.
  - 5) Kecamatan Rokan IV Koto, dengan sub pusat Negari Rokan.
  - 6) Kecamatan Ujung Batu, dengan sub pusat Tandun.
  - 7) Desa-desa Senamanenek dan Kesikan, Kecamatan Siak Hulu.

## 2. Daerah Pembangunan II

Pusat utama Daerah Pembangunan II adalah Dumai. Terdiri dari 4 satuan wilayah pengembangan, yaitu :

- a. Satuan Wilayah Pengembangan 4, dengan pusat wilayah Bagan Siapi-api. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Bangko, dengan sub pusat Bagan Siapi-api.
  - 2) Kecamatan Kubu, dengan sub pusat Teluk Merbau.
  - 3) Kecamatan Tanah Putih, dengan sub pusat Sidinginan.

- b. Satuan Wilayah Pengembangan 5, dengan pusat wilayah :  
Dumai. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Dumai, dengan sub pusat Dumai.
  - 2) Kecamatan Rupert, dengan sub pusat Batu Panjang.
  - 3) Kecamatan Mandau, dengan sub pusat Duri.
  - 4) Bagian Barat dari Kecamatan Bukit Satu.
- c. Satuan Wilayah Pengembangan 6, dengan pusat wilayah :  
Bengkalis. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Bengkalis, dengan sub pusat Bengkalis.
  - 2) Kecamatan Bukit Batu, dengan sub pusat Sungai Pakning
  - 3) Kecamatan Sungai Apit, dengan sub pusat Sungai Apit.
  - 4) Kecamatan Merbau, dengan sub pusat Teluk Belitung.
- d. Satuan Wilayah Pengembangan 7, dengan pusat wilayah :  
Selat Panjang. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Tebing Tinggi, dengan sub pusat Selat Panjang.
  - 2) Kecamatan Kuala Kampar, dengan sub pusat Teluk Dalam.
  - 3) Bagian Selatan dari Kecamatan Sungai Apit.

### 3. Daerah Perkembangan IV

Pusat Utama Daerah Pembangunan IV adalah Tanjung Pinang. Terdiri dari 6 satuan wilayah pengembangan, yaitu :

- a. Satuan Wilayah Pengembangan 8, dengan pusat wilayah :  
Tanjung Batu. Meliputi :
- 1) Kecamatan Kundur, dengan sub pusat Tanjung Batu.
  - 2) Kecamatan Karimun, dengan sub pusat Tanjung Balai.
  - 3) Kecamatan Moro, dengan sub pusat Moro Sulit.
- b. Satuan wilayah Pengembangan 9, dengan pusat wilayah :  
Tanjung Pinang, Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Bintan Selatan, dengan sub pusat Tan-

jung Pinang.

- 2) Kecamatan Bintang Timur, dengan sub pusat Kijang.
  - 3) Kecamatan Bintang Utara, dengan sub pusat Tanjung Uban
  - 4) Kecamatan Batam, dengan sub pusat Belalang Padang.
- c. Satuan Wilayah Pengembangan 10, dengan pusat wilayah Terempa. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Siantan, dengan sub pusat Terempa.
  - 2) Kecamatan Jemaja, dengan sub pusat Letung.
- d. Satuan Wilayah Pengembangan 11, dengan pusat wilayah : Sedanau. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Bunguran Barat, dengan sub pusat Sedanau.
  - 2) Kecamatan Bunguran Timur, dengan sub pusat Ranai.
  - 3) Kecamatan Midai, dengan sub pusat Moro Silit.
- e. Satuan Wilayah Pengembangan 12, dengan pusat wilayah Tambelan. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Tambelan dengan sub pusat Tambelan.
- f. Satuan Wilayah Pengembangan 13, dengan sentra wilayah : Dabo. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Singkep, dengan sub pusat Dabo.
  - 2) Kecamatan Lingga, dengan sub pusat Daik.
  - 3) Kecamatan Senayang, dengan sub pusat Senayang.

#### 4. Daerah Pembangunan III

Pusat utama daerah Pengembangan III adalah Rengat. Terdiri dari 4 satuan wilayah pengembangan, yaitu :

- a. Satuan Wilayah Pengembangan 14, dengan pusat wilayah Tembilahan. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Tembilahan, dengan sub pusat Tembilahan.
  - 2) Kecamatan Tempuling, dengan sub pusat Sungai Salak.
  - 3) Kecamatan Kuala Indragiri, dengan sub pusat Sapat.
  - 4) Kecamatan Gaung Anak Serka, dengan sub pusat Teluk

- Pinang.
- 5) Kecamatan Mandah, dengan sub pusat Khairiah Mandah.
  - 6) Kecamatan Kateman, dengan sub pusat Sungai Guntung.
- b. Satuan Wilayah Pengembangan 15, dengan sentra wilayah : Pulau Kijang. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Ratih, dengan sub pusat Pulau Kijang.
  - 2) Kecamatan Enok, dengan sub pusat Enok.
- c. Satuan Wilayah Pengembangan 16, dengan pusat wilayah : Rengat. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Rengat, dengan sub pusat Rengat.
  - 2) Kecamatan Pasir Penyu, dengan sub pusat Air Molek.
  - 3) Kecamatan Siberida, dengan sub pusat Pangkalan Kasai.
  - 4) Kecamatan Peranap, dengan sub pusat Peranap.
  - 5) Bagian Selatan dari Kecamatan Langgam.
  - 6) Bagian Selatan dari Kecamatan Pangkalan Kuras.
  - 7) Bagian Selatan dari Kecamatan Bunut.
- d. Satuan Wilayah Pengembangan 17, dengan pusat wilayah : Teluk Kuantan. Meliputi daerah-daerah :
- 1) Kecamatan Kuantan Tengah, dengan sub pusat Teluk Kuantan.
  - 2) Kecamatan Kuantan Hilir, dengan sub pusat Baserah.
  - 3) Kecamatan Kuantan Mudik, dengan sub pusat Lubuk Jambi.
  - 4) Kecamatan Cerenti, dengan sub pusat Cerenti.
  - 5) Kecamatan Singingi, dengan sub pusat Muara Lembu.

## C. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN I.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan I terletak di sekitar Pekanbaru, terdiri dari daerah kecamatan Siak Hulu, Langgam, Pangkalan Kuras dan Bunut. Jumlah penduduk per kecamatan dalam wilayah ini berkisar antara 6.500 dan 28.500 jiwa. Sedangkan laju

rata-rata tahunan pertambahan penduduk adalah antara 0,5 dan 2,1%. Kepadatan penduduknya jarang sekali yaitu rata-rata kurang dari 9 jiwa per km<sup>2</sup>. SWP-1 terdiri dari 50 desa/kepenghuluan. Tabel IV.1. mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayahnya.

**Tabel IV.1. Jumlah dan laju rata-rata tahunan Pertambahan Penduduk, serta luas wilayah Satuan Wilayah Pengembangan-1.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa*)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pndd.%**)	Luas Wilayah Ha
1.	Siak Hulu	28.408	1,0	415.087
2.	S i a k	15.564	2,1	280.855
3.	Langgam	6.529	0,5	360.917
4.	Pangkalan			
	Kuras	8.969	2,0	172.475
5.	B u n u t	9.044	1,0	348.621
	J u m l a h	68.514		1.523.955

\*) Berdasarkan sensus tahun 1971

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. Basis Ekonomi.

Basis Ekonomi SWP ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Perkebunan : karet
- 2) Pertanian : padi, ubi kayu.
- 3) Hortikultura : buah-buahan.
- 4) Kehutanan.
- 5) Perikanan pedalaman.
- 6) Kerajinan rakyat : tenunan Siak.
- 7) Industri pertanian : remilling dan crumb rubber, penggergajian kayu, perusahaan sagu.

- 8) Jasa angkutan darat, sungai dan laut.
- 9) Peternakan.

### 3. **Kondisi pasaran ekonomi.**

#### 1) **Pola Perhubungan.**

Dibandingkan dengan satuan wilayah pengembangan yang lain. SWP ini memiliki jaringan perhubungan yang relatif paling lengkap. Jaringan jalan darat menghubungkan SWP ini dengan pusat wilayah dari SWP-5, yaitu Dumai dan pusat wilayah dari SWP-2 yaitu Bangkinang. Sedangkan jalan dari Buatan ke Lirik, yang membelah SWP ini di bagian tengah, juga menghubungkan angkutan sungai dari sungai Siak dan sungai Kampar. Bagian-bagian dari sungai Siak dan Sungai Kampar yang dapat dilayari terdapat dalam SWP ini, yang menghubungkan pusat-pusat wilayah SWP-6 dan 7, yaitu Bengkalis dan Selat Panjang.

Perhubungan ke daerah-daerah Sekijang. Senamanenek, Pantai Cermin, Bencah Kulubi, dan Kasikan dilakukan melalui sungai Siak, sungai Tapung Kanan dan sungai Tapung Kiri. Di daerah hulu sungai Siak ini hubungan melewati jalan air hanyalah dapat dilakukan waktu musim penghujan, sebab sebelum musim kemarau, permukaan sungai-sungai itu surut. Dengan terdapatnya jalan yang dibuat oleh PT. C.P.I. dari Km 59,6 ke jurusan Kota Garo, Kota Batak dan Petapahan, maka selama kering, dapat dipergunakan jalan ini. Dalam SWP ini terdapat dua kantor pos Pekanbaru dan kantor pos Pembantu di Siak Sri Indrapura. Pelabuhan-pelabuhan yang terdapat dalam SWP ini adalah Pekanbaru (Pelabuhan Umum), Buatan (pelabuhan minyak), Perawang dan Mandau (pelabuhan kayu). Pelabuhan udara terdapat di Simpang Tiga.

#### 2) **Pengairan.**

Dalam SWP ini tidak terdapat pengairan teknis. Sawah-sawah yang ada merupakan sawah tadah hujan.

### 4. **Arah Pengembangan.**

a) Tanah-tanah yang relatif subur dalam SWP ini umumnya terdapat sepanjang aliran sungai-sungai, yaitu pada formasi

tanggul. Pengembangan pertanian semusim (padi dan palawija) hanya mungkin pada daerah-daerah ini. Untuk ini diperlukan sistem drainase sederhana dengan penggalian parit-parit. Usaha-usaha jenis ini telah berhasil dilaksanakan antara lain di Langkai, Sungai Mempura, Merempan, dan Rantau Panjang di Kecamatan Siak.

b) K e h u t a n a n .

Sebagian besar daerah SWP ini terdiri dari hutan rawa gambut yang memiliki jenis-jenis kayu berharga. Areal hutan ini tidak potensil untuk pengembangan pertanian bahan pangan. Di beberapa areal yang letaknya tinggi, terdapat hutan-hutan belukar. Areal-areal ini umumnya adalah bekas perladangan yang ditinggalkan. Daerah-daerah ini perlu dibina tata guna hutannya.

c) P e r k e b u n a n .

Dalam SWP ini terdapat areal-areal pertanaman karet yang cukup luas dan relatif subur. Selain perkebunan rakyat, terdapat pula perkebunan-perkebunan besar. Umumnya perkebunan ini memerlukan rehabilitasi dan peremajaan.

d) I n d u s t r i P e n g o l a h a n K a y u .

SWP ini merupakan lokasi yang strategis untuk pembangunan industri pengolahan kayu, sehubungan dengan terdapatnya jalan-jalan air alami ('natural waterways') yang dapat dimanfaatkan. Kuala Mandau merupakan "transport breaking point" atau "junction" untuk hasil-hasil hutan dari daerah hutan Perawang. Sebanga, Tapung Kanan, Siak; sehingga mungkin dapat dipertimbangkan untuk pemilihan lokasi industri pengolahan kayu.

e) I n d u s t r i "C r u m b R u b b e r"

Di daerah Siak pada waktu ini telah terdapat beberapa industri "remilling karet". Beberapa lokasi akan ditingkatkan untuk pengolahan "crumb rubber".

f) P a r i w i s a t a .

Perlu dirintis kemungkinan pengembangan obyek-obyek pariwisata, baik pada lokasi-lokasi peninggalan sejarah, misalnya Istana Sultan Siak maupun pada hutan cagar alam dan suaka marga-

satwa Kerumutan yang terdapat dalam SWP ini.

g) Dalam rangka meletakkan landasan untuk pembinaan pusat-pusat penduduk/perkotaan yang baik perlu dilakukan perencanaan dasar untuk kota-kota Siak Sri Indrapura dan Buatan.

h) Pelabuhan Kayu.

Dalam SWP ini terdapat pelabuhan kayu di Perawang dan Kuala Mandau untuk kelancaran perdagangan kayu, pelabuhan-pelabuhan ini perlu ditingkatkan fasilitasnya.

i) Pelabuhan Minyak.

Di Buatan terdapat pelabuhan minyak yang digunakan untuk mengangkut minyak mentah dari ladang-ladang minyak PT. Stanvac Indonesia di Lirik – Benio. Dalam rangka pengolahan lingkungan perlu diperhatikan usaha-usaha untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan terjadinya pencemaran alam.

## **D. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 2.**

### **1. Wilayah dan Penduduk.**

Satuan Wilayah Pengembangan 2, terdiri dari daerah kecamatan Bangkinang, Kampar, Kampar Kiri dan XIII Koto Kampar. Jumlah penduduk per kecamatan dalam satuan wilayah ini berkisar antara 14.000 dan 56.500 jiwa; termasuk kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk yang relatif besar dalam daerah Propinsi Riau. Laju pertumbuhan penduduk agak pesat sampai agak terlambat, yaitu berkisar antara 4,2 dan 0,4% per tahun. Kepadatan penduduknya antara 8 dan 64 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Bangkinang dan Kampar merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang relatif rapat di Propinsi Riau. SWP 2 terdiri dari 27 desa/kepenghuluan. Tabel IV.2 mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertumbuhan penduduk, serta luas wilayahnya.

**Tabel IV.2. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah Satuan Wilayah Pengembangan-pengembangan.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa*)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pndd.%**)	Luas Wilayah Ha
1.	Bangkinang	34.857	4,2	54.739
2.	K a m p a r	56.405	3,2	100.353
3.	Kampar Kiri	18.331	1,1	196.141
4.	XIII Koto Kampar	14.169	0,4	175.290
Jumlah		123.762		526.523

\*) Berdasarkan Sensus Penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961–1971.

## 2. Basis Ekonomi.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Pertanian : persawahan tehnis setengah tehnis dan tadah hujan, serta penanaman palawija;
- 2) Perikanan pedalaman;
- 3) Perkebunan karet;
- 4) Kehutanan;
- 5) Hortikultura : sayuran dan buah-buahan;
- 6) Peternakan : kerbau dan kambing;
- 7) Perdagangan;
- 8) Industri pertanian : remilling dan crumb rubber;
- 9) Kerajinan rakyat : anyaman rotan dan bambu;

### 3. **Kondisi Prasarana Ekonomi.**

#### 1) **Pola Perhubungan.**

SWP ini memiliki sistem jaringan jalan yang relatif paling lengkap dan dalam kondisi terbaik pada waktu ini di Propinsi Riau. Jalan negara Pekanbaru – Rantau Berangin – Padang melewati SWP ini. Jalan ini merupakan jalan dengan intersitas lalu-lintas terbesar di seluruh daerah Propinsi Riau, dan merupakan jalan darat utama yang menghubungkan propinsi Riau dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Selain daripada itu jalan Propinsi Riau, Pekanbaru – Teluk Kuantan – Rengat, melewati pula SWP ini, dan merupakan jalan penghubung antara Daerah Pembangunan I dan Daerah Pembangunan III. Perhubungan air tidak memegang peranan penting dengan SWP ini. Fasilitas pos, telepon dan telegraf terdapat di Bangkinang.

#### 2) **Pengairan.**

Dibandingkan dengan satuan wilayah pengembangan yang lain. SWP-2 merupakan daerah asal persawahan terluas di Propinsi Riau, di samping daerah kecamatan Ratih. Selama Pelita I telah dilaksanakan pembangunan proyek-proyek irigasi Petapahan dan Uwai; serta telah dilaksanakan survey untuk proyek-proyek irigasi Poro, Tanang, Tanduk Ranan, Singkuang, dan Batang Bangkinang.

#### 3) **Fasilitas Tenaga Listrik.**

Fasilitas Tenaga Listrik terdapat di Bangkinang dengan kapasitas terpasang sebesar 1000 kilowatt.

### 4. **Arah Pengembangan.**

a) Pusat produksi padi dengan kondisi tanahnya yang dilaksanakannya pembangunan proyek-proyek irigasi dalam jumlah besar, maka SWP ini akan dikembangkan sebagai pusat produksi padi.

#### b) **Perkebunan.**

Program pekerjaan dan intensifikasi pertanaman cengkeh dan kopi.

c) Kehutanan. Pengukuhan hutan, rehabilitasi dan reboisasi tanah kritis.

d) Perikanan. Tumpang sari dengan padi di persawahan.

e). Hortikultura.

Pengembangan peternakan dalam rangka "mixed farming". SWP ini memiliki lokasi yang menguntungkan untuk pengembangan peternakan, karena dekat dengan pusat utama Pekanbaru.

f) Industri kerajinan rakyat anyaman rotan.

g) Pembangunan huller padi.

h) Rekreasi dan Pariwisata.

Di Muara Mahat, penyelenggaraan tempat rekreasi di lereng Bukit Barisan. Dari Muara Mahat sekitar 30 km ditemukan Candi Muara Takus, merupakan kompleks yang besar.

## **E. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 3.**

### **1. Wilayah dan Penduduk.**

Satuan Wilayah Pengembangan 3 meliputi kecamatan Rambah, Rokan IV Koto, Tembusai, Tandun, Kepenuhan, dan Kunto Darussalam, kecamatan Rambah merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 30.000 jiwa. Sedangkan kecamatan-kecamatan lain dalam satuan wilayah ini kesemanya berpenduduk kurang dari 10.000 jiwa. Yang terpesat laju pertumbuhan penduduknya adalah kecamatan Tembusai, yaitu 2,9% per tahun. Yang lain-lainnya berkisar antara 0,4 dan 1,9%. Kepadatan penduduk berkisar antara 29 jiwa/km<sup>2</sup> (Rambah) dan 5 jiwa/km<sup>2</sup> (Kunto Darussalam). Tabel IV.3. mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertumbuhan penduduk serta wilayahnya SWP-3 terdiri dari 28 desa.

**Tabel IV.3. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah satuan wilayah pengembangan-3.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pndd. **)	Luas Wilayah Ha
1.	Rambah	29.581	1,8	102.960
2.	Rokan IV Koto	9.441	0,4	111.431
3.	Tambusai	8.049	2,9	162.909
4.	Tandun	6.299	1,2	101.657
5.	Kepenuhan	6.400	1,4	91.882
6.	Kunto Darussalam	5.261	1,9	117.947
<b>Jumlah</b>		<b>65.021</b>		<b>688.786</b>

\*) Berdasarkan sensus tahun 1971.

\*\*) Angka rata-rata selama Dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. Basis Ekonomi.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Perkebunan karet.
- 2) Pertanian : sawah tadah hujan.
- 3) Perladangan : sayur-sayuran.
- 4) Kehutanan.
- 5) Industri kerajinan rakyat : anyaman tikar dan rotan.

## 3. Kondisi Pasaran Ekonomi.

- 1) Pola perhubungan

SWP ini memiliki jaringan jalan yang cukup, akan tetapi kondisinya masih belum baik. Baru sebagian kecil dari jalan ini diper-

keras dengan aspal. Jalan Rantau Berangin – Pasir Pangaraian – Dalu-Dalu – Sungai Koreng, pada waktu ini merupakan jalan ternak, karena sebagian kebutuhan ternak kerbau untuk konsumsi daging di Pekanbaru didatangkan dari Padang Sidempuan dan Sipirok, Tapanuli melewati jalan ini. Dalam SWP ini terdapat jaringan-jaringan anak-anak sungai yang relatif rapat, yaitu B. Kumu, S. Mahato, S. Air Hitam, B. Lubuk dan S. Rokan Kiri; yang merupakan anak-anak sungai Rokan. Akan tetapi peranan jalan air untuk daerah ini kurang berarti, berhubung airnya dangkal dan deras arusnya. Fasilitas perhubungan udara tidak terdapat di dalam SWP ini. Terdapat sebuah kantor pos pembantu di Pasir Pangaraian. Demikian pula sebuah Kantor Telegrap. Akan tetapi tidak terdapat fasilitas telepon.

## 2) Pengairan.

Kebanyakan pertanahan di daerah ini merupakan sawah tadah hujan. Dalam Pelita I telah mulai dilaksanakan proyek irigasi Sungai Palis. Demikian pula telah dilaksanakan survey untuk proyek irigasi Batang Lubu dan Menaming, areal-areal potensi untuk pengembangan irigasi terdapat di Tabawan, Sungai Sawan, Perak, Tangun, Pawon dan Kaiti.

## 3) Fasilitas Tenaga Listrik.

Di dalam SWP ini tidak terdapat fasilitas tenaga listrik.

## 4. Arah pengembangan.

### a) Pertanian.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki potensi yang luas untuk pengembangan pertanian irigasi (irigated agriculture).

### b) Kehutanan.

Oleh karena sebagian besar wilayah SWP ini terletak pada evaluasi yang relatif tinggi, maka dalam rangka pengolahan daerah aliran sungai ('watershed management') Rokan perlu dilaksanakan penetapan pencadangan hutan (forest reservation), klasifikasi tata guna tanah hutan (forest land use classification), dan post harvest treatment pada areal-areal bekas tebangan dalam

rangka HPH.

c) Konservasi Tanah.

Bentuk wilayah yang berbukit-bukit, serta permukaan tanah yang berlereng, memerlukan dilaksanakannya tindakan-tindakan konservasi tanah dalam SWP ini.

d) Prasarana perhubungan.

Penataran jaringan jalan yang terdapat dalam SWP ini akan mempunyai arti ekonomis yang penting, tidak saja untuk daerah ini sendiri, tetapi berarti pula memperlancar arus barang dari daerah perbatasan Sumatera Utara.

c) Peternakan.

Sesuai dengan kelas-kelas kemampuan tanahnya, terdapat areal-areal dalam SWP ini yang sesuai untuk pengembangan peternakan.

## F. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 4.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan wilayah pengembangan 4 terdiri dari daerah kecamatan Bangko, Kubu dan Tanah Putih. Jumlah penduduk per kecamatan berkisar antara 20.000 dan 68.000 jiwa, terhitung relatif besar untuk daerah Propinsi Riau. Laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk termasuk sedang sampai jarang, berkisar antara 1,7 dan 4,6%. Kepadatan penduduknya sedang sampai jarang, berkisar antara 27 jiwa/km<sup>2</sup> (Tanah Putih). Tabel IV.7 mengemukakan jumlah laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayahnya. SWP-4 terdiri dari 56 desa.

**Tabel IV.4. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah, satuan wilayah pengembangan 4.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pndd.%**)	Luas Wilayah Ha
1.	Bangko	67.810	1,7	252.835
2.	Kubu	29.734	4,6	302.359
3.	Tanah Putih	19.550	3,0	332.965

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 - 1971.

## 2. **Basis Ekonomi.**

Satuan wilayah Pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Perikanan.
- 2) Industri pengolahan ikan dan hasil-hasil perikanan.
- 3) Penggajian kayu.
- 4) Pertanian : padi dan palawija.
- 5) Kehutanan.
- 6) Perkebunan karet, kelapa.

## 3. **Kondisi Prasarana Ekonomi.**

- 1) Pola Perhubungan.

Dalam rangka usaha pertambangan minyak bumi, oleh PT. CPI telah dibangun sistem jaringan yang menghubungkan SWP ini dengan jalan Dumai – Pekanbaru. Dari Dumai (Sentra Utama II) atau Pekanbaru (Sentra Utama I), SWP ini dapat dicapai mulai dari jalan Duri – Sungai Rangau atau Duri Rantau Rais – Ujung Tanjung. Selain itu terdapat jalan kabupaten dari sungai Panjang ke Bagan Siapi-api dan dari Kubu Hulu ke Teluk Merbau.

Akan tetapi volume lalu lintas barang terbesar dari dan ke arah diangkut melalui jalan laut. Dari Bagan Siapi-api sebagai pusat Wilayah SWP ini terdapat perhubungan tetap pemasaran ikan asin dan hasil-hasil perikanan lainnya dengan pelabuhan Pasar Ikan dan pelabuhan-pelabuhan lain di Pantai utara Jawa. Demikian pula terdapat hubungan tetap dengan Tanjung Balai Asahan. Dalam SWP ini terdapat tiga pelabuhan, yaitu Bagan Siapi-api, Sinaboi, dan Panipahan. Dari SWP ini tidak terdapat hubungan udara. Sebuah Kantor Pos terdapat di Bagan Siapi-api. Bagan Siapi-api memiliki pusat telepon dengan jumlah pesawat kedua banyaknya sesudah Pekanbaru. Demikian pula terdapat fasilitas telegrap.

- 2) Pengairan.

Tidak terdapat proyek irigasi dalam SWP. Sawah-sawah yang ada umumnya merupakan persawahan tadah hujan.

### 3) Fasilitas Tenaga Listrik.

Di Bagan Siapi-api terdapat fasilitas tenaga listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 354,8 kilowatt.

## 4. Arah Pengembangan.

### a) Perikanan.

Bagan Siapi-api sekitarnya merupakan pusat produksi perikanan. Peluang-peluang untuk pengembangan terdapat di bidang perbaikan pengadaan sarana-sarana produksi dan pemasaran.

b) Industri perikanan diperlukan perbaikan/pengembangan teknologi di bidang pengolahan hasil-hasil perikanan.

### c) Kehutanan.

Daerah ini merupakan pusat pemasaran hasil hutan dari aliran sungai Rokan.

### d) Prasarana perhubungan.

Perlu meningkatkan kondisi jalan-jalan kabupaten yang terdapat dalam SWP ini untuk dikaitkan dengan jaringan jalan Ujung Tanjung – Rantau Bais – Duri – Dumai. Dalam jangka panjang diharapkan akan dapat dibangun jalan melewati daerah ini menuju kota Pinang di Propinsi Sumatera Utara.

### e) Fasilitas pelabuhan.

Diperlukan pengerukan lumpur untuk pengamanan pelabuhan Bagan Siapi-api.

## G. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 5.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan 5 terdiri dari daerah kecamatan Dumai, Mandau, dan Rupert. Jumlah penduduk per kecamatan dalam satuan wilayah ini berkisar antara 17.500 atau 40.000 jiwa. Laju rata-rata tahunan pertambahan penduduknya berkisar antara 3,1 dan 9,9%. Kecamatan Mandau merupakan kecamatan

yang mengalami pertumbuhan penduduk paling pesat di Propinsi Riau, yaitu rata-rata 9,9% per tahun. Selama dasawarsa 1961 – 1971 laju rata-rata pertumbuhan penduduk di kecamatan Dumai adalah 4,5% per tahun. Dengan pembangunan pelabuhan Samudera, kilang minyak dan "dockyard", serta sebagai basis operasi Pertanian Unit VI; demikian pula dengan adanya rencana untuk memindahkan ibukota kabupaten Bengkalis ke Dumai, diperkirakan di masa datang laju pertumbuhan penduduk di Dumai akan lebih dari 4,5% per tahun. Kepadatan penduduknya berkisar antara 6 jiwa/km<sup>2</sup> (Mandau) dan 21 jiwa/km<sup>2</sup> (Dumai). Tabel IV.5 mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pemerintahan penduduk, serta wilayahnya, SWP-5 terdiri 46 desa.

**Tabel IV.5. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertumbuhan penduduk, serta luas wilayahnya, satuan wilayah pengembangan 5.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertumbuhan Pnnd%**)	Luas Wilayah Ha
1.	D u m a i	36.448	4,5	172.738
2.	M a n d a u	39.810	9,9	698.547
3.	R u p a t	17.672	3,1	152.485
Jumlah		93.930		1.023.770

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. Basis Ekonomi.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Perdagangan.
- 2) Jasa angkutan laut.

- 3) Industri minyak bumi : kilang minyak Putri Tujuh.
- 4) Perikanan (Basilam Baru, Tanjung Medang).
- 5) Hortikultura : sayuran dan buah-buahan.
- 6) Pertambangan minyak bumi.
- 7) Konstruksi (bangunan).
- 8) Perkebunan karet (Teluk Makmur, Guntung).

### 3. Kondisi Pasaran Ekonomi.

#### 1) Pola Perhubungan.

Jalan propinsi antara Pekanbaru – Dumai, yang melewati SWP ini, sepanjang 100 Km merupakan jalan dengan volume intensitas lalu lintas kedua sesudah jalan negara Pekanbaru – Padang. Jalan ini pun merupakan jalan penghubung antara daerah Pembangunan I dan daerah Pembangunan II; dan bersama dengan jalan negara Pekanbaru – Padang merupakan jalan penghubung antara pantai barat dan timur Sumatera Bagian Tengah. Dari jalan raya ini terdapat jalan simpang Duri – Ujung Tanjung yang menghubungkan SWP 4 dengan SWP 5. Dari Minas terdapat jalan menuju Perawang, di tepi Sungai Siak.

Dari Dumai ke arah timur terdapat jalan melalui Tanjung Palas, Teluk Makmur dan Guntung sampai ke Belitung. Akan tetapi jalan ini tidak dapat dilalui kendaraan. Demikian pula ke arah barat laut terdapat jalan ke Pangkalan Kasai sampai ke Basilam Baru (Pangkalan Pasir) tetapi terputus di dua tempat, yaitu antara Sungai Masjid sampai Bangsal Aceh dan antara Lubuk Gaung sampai Tanjung Penyembal. Dari Tanjung Penyembal terdapat lagi jalan yang baik ke Basilam Baru, lewat sungai Sembilan.

Di pulau Rupat, jalan antara Datu Panjang dan Teluk Lecah, tidak merupakan jalur yang bersambung, dan hanya dapat dilalui waktu musim kemarau. Dari Tanjung Medang terdapat jalan sampai Tanjung Punak lewat Teluk Rhu. Pelabuhan Dumai adalah pelabuhan samudera, yang pada waktu ini dan menurut rencana akan terus dibangun agar dapat menjalankan fungsi sebaik-baiknya sebagai pelabuhan samudera. Pada waktu ini merupakan pelabuhan minyak terbesar di Indonesia. Produksi minyak mentah dari ladang-ladang minyak PT. CPI, yang merupakan

lebih 80% dari seluruh produksi minyak mentah di seluruh Indonesia, diekspor lewat pelabuhan ini.

Dengan dibangunnya "dockyard" Pertamina di Pangkalan Sesai, diharapkan Dumai akan memegang peranan penting dalam penyediaan fasilitas perhubungan laut di daerah ini. Pembangunan sebuah lapangan terbang sedang dilaksanakan oleh PN. Pertamina di sebelah selatan Dumai. Pada waktu ini di Dumai baru terdapat sebuah Kantor Pos Pembantu, fasilitas telepon dan telegraf, terdapat pula di Dumai.

## 2) Pengairan.

Dalam SWP ini tidak terdapat pengairan teknis. Persawahan yang terdapat di Sungai Cingam dan Teluk Lecah, adalah persawahan tadah hujan.

## 3) Fasilitas tenaga listrik.

Di Dumai terdapat tenaga listrik dengan kapasitas terpasang sebesar 375 kilowatt. Selain itu terdapat pula fasilitas pembangkit tenaga untuk industri di kilang minyak Pertamina Putri Tujuh, untuk daerah perumahan di Bukit Datuk, dan untuk penerangan dan operasi pertambangan minyak serta perumahan PT CPI di Bukit Jin.

## 4. Arah Pengembangan.

a) Pembangunan Dumai sebagai kota pelabuhan, kota industri dan kota perdagangan.

1) Lokasi dalam pelabuhan samudera Dumai sangat menguntungkan, karena tidak ada masalah siltasi. Sehingga merupakan pelabuhan alam tehnik sepanjang pantai timur Sumatera.

2) Pada waktu ini telah ada tujuh dan sedang dibangun proyek "dockyard" di Pangkalan Sesai.

3) Dumai waktu ini merupakan pelabuhan minyak terbesar di Indonesia.

Prioritas utama ialah peningkatan mutu jalan antara Pekanbaru - Dumai, ditinjau dalam lingkup pembangunan regional. Sedangkan prioritas kedua adalah pembuatan jalan tembus dari Dumai ke kota Pinang, yang akan menghubungkan Propinsi Riau

dengan Propinsi Sjmatera Utara. Dalam lingkup sub-regional, perlu dibangun jalan antara Dumai – Basilam Baru dan Dumai – Pelitung. Pembangunan jalur-jalur jalan ini akan mencegah urbanisasi penduduk dari wilayah-wilayah ini ke dalam kota Dumai. Demikian pula akan melancarkan arus pemasaran hasil-hasil pertanian dari daerah-daerah ini dan dari daerah-daerah di pulau Rupa yang berhadapan.

b) Perikanan.

Dalam rangka membina pola interdependensi intra satuan wilayah pengembangan, maka daerah Tanjung Medang di Pulau Rupa akan diperkembangkan sebagai sentra perikanan untuk SWP ini.

c) Kehutanan.

Pembinaan tata guna hutan perlu dilaksanakan di daerah Mandau dalam rangka reklamasi dan konservasi daerah-daerah eksploitasi minyak bumi.

d) Perkebunan.

Peremajaan, intensifikasi pemeliharaan dan ekstensifikasi pertanaman karet.

e) Dalam rangka meletakkan landasan untuk membangun pusat-pusat penduduk/perkotaan yang baik perlu dilakukan perencanaan dasar untuk kota-kota Duri, Batu Panjang, Tanjung Medang.

## H. SATUAN WILAYAH PERKEMBANGAN 6.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan 6 terdiri dari daerah kecamatan Bengkalis, Bukit Batu, Sungai Apit dan Merbau. Jumlah penduduk per kecamatan dalam daerah ini relatif besar, yaitu antara 16.500 dan 57.000 jiwa sedangkan laju rata-rata pertumbuhan penduduknya berkisar antara 1,6 dan 2,8% per tahun. Kepadatan penduduknya berkisar antara 61 jiwa/km<sup>2</sup>. SWP 6 terdiri dari 64 desa/kepenghuluan. Tabel V.6 mengemukakan jumlah dan

rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayahnya.

**Tabel IV.6. Jumlah dan laju rata-rata tahun pertambahan penduduk serta luas wilayah. satuan wilayah pengembangan 4.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pndd**)	Luas Wilayah Ha
1.	Bengkalis	57.154	2,2	93.840
2.	Bukit Batu	22.070	1,6	187.021
3.	Sei Apit	16.565	2,1	220.254
4.	Merbau	25.720	1,9	134.891
Jumlah		121.509		636.006

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. **Basis Ekonomi.**

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Pertanian : padi dan palawija.
- 2) Hortikultura : sayuran dan buah-buahan.
- 3) Perkebunan : karet dan kelapa
- 4) Industri pertanian : remilling dan crumb rubber, pengergajian kayu, perusahaan sagu, perusahaan minyak kelapa, pabrik es.
- 5) Perikanan.
- 6) Kehutanan : panglong, arang dan kayu balok.
- 7) Jasa angkutan sungai dan laut.
- 8) Industri kilang minyak Pertamina di Sei Pakning .
- 9) Perdagangan
- 10) Pengolahan hasil perikanan.

### 3. Kondisi Prasarana Ekonomi.

#### 1) Pola Perhubungan.

Peranan jalan darat dalam SWP ini kurang berarti. Hubungan antara pusat-pusat pengembangan terutama adalah melalui jalan air. Jalur jalan yang agak panjang terdapat antara Sungai Pakning dan Sepaha, akan tetapi tidak merupakan jalan yang bersambung, karena melintasi Sungai Bukit Batu yang cukup besar. Di beberapa tempat jalur ini telah dipindahkan lebih kurang 500 meter ke arah darat, karena jalur jalan yang lama terendam waktu air pasang. Keadaan yang sama dijumpai pada jalur jalan antara Bengkalis dan Maksum.

Volume lalu lintas kapal motor (pongpong) relatif besar di daerah ini. Bengkalis, di samping Selat Panjang, merupakan persinggahan tetap kapal-kapal pelayaran pantai yang menghubungkan Belawan dengan Jambi dan pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa, seperti Cirebon, Tegal, Semarang dan Surabaya.

Di sungai Selari, dekat Sungai Pakning sedang dibangun lapangan terbang untuk keperluan Pertamina. Fasilitas perhubungan udara ini diadakan sehubungan dengan terdapatnya kilang minyak Pertamina di Sungai Pakning.

Di Bengkalis terdapat sebuah Kantor Pos. Fasilitas telepon dan telegraf terdapat pula di Bengkalis.

#### 2) Pengairan.

Dalam SWP ini tidak terdapat pengairan teknis. Sawah-sawah yang merupakan sawah tadah hujan.

#### 3) Fasilitas tenaga listrik.

Fasilitas tenaga listrik dalam SWP ini terdapat di Bengkalis dengan jumlah kapasitas terpasang pada tahun 1972 sebesar 200 kilowatt.

### 4. Arah Pengembangan.

#### a) Persawahan.

Walaupun tidak merupakan areal-areal yang sangat luas, di beberapa dalam SWP ini, antara lain di Buruk Bakul, Bukit

Batu, Temiang, Parit I Api-Api, terdapat sawah-sawah tadah hujan yang dengan penyempurnaan sistem pengairan dan drainase dapat ditingkatkan potensi produksinya.

b) Palawija dan sayuran.

Penanaman palawija dan sayuran dataran rendah dapat diperluas pada tanah-tanah pematang sepanjang aliran sungai dan sepanjang pantai. Untuk ini cukup dilakukan sistem drainase sederhana dengan penggalian parit-parit.

c) Perkebunan.

Dalam SWP ini terdapat areal-areal pertanaman karet yang cukup luas dan relatif subur. Selain itu terdapat areal-areal pertanaman kelapa yang potensiil.

d) Perikanan.

Perairan SWP ini memiliki potensi perikanan yang dapat ditingkatkan pengembangannya, baik perikanan laut, maupun perikanan pedalaman. Di hulu sungai Siak Kecil terdapat banyak Tasik, di antaranya Tasik Air Hitam, Tasik Besingin, Tasik Katialu, dan Tasik Serai. Selain itu di bagian selatan terdapat beberapa tasik yang besar-besar, seperti Tasik Belat, Tasik Besar Serkap, Tasik Pulau Besar, dan lain-lain.

f) Dalam rangka meletakkan landasan untuk pembinaan pusat-pusat penduduk/perkotaan yang baik, perlu dilakukan perencanaan dasar untuk kota-kota Bengkalis, Sungai Pakning, Teluk Belitung, Sungai Apit, dilaksanakan beberapa 'pilot projects' pemugaran perumahan dan lingkungan desa, sebagai proyek-proyek percobaan.

## I. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 7.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan wilayah pengembangan 7 meliputi daerah kecamatan Tebing Tinggi dan Kuala Kampar. Jumlah penduduknya masing-masing adalah 75.237 dan 16.958 jiwa pada tahun 1971. Laju rata-rata pertumbuhan penduduknya berkisar antara 2,8% per

tahun. Kepadatan penduduknya adalah antara 32 jiwa per km<sup>2</sup> (Tebing Tinggi) dan 5 jiwa per km<sup>2</sup> (Kuala Kampar). SWP 7 terdiri dari 39 desa/kepenghuluan. Tabel IV.7 mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayahnya.

**Tabel IV.7. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah. Satuan Wilayah Pengembangan 7.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pndd.**)	Luas Wilayah Ha
1.	Tebing Tinggi	75.237	2,8	235.893
2.	Kuala Kampar	16.958	3,5	370.777
Jumlah		92.195		606.670

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. Basis Ekonomi.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Pertanian : padi dan palawija.
- 2) Hortikultura : sayuran dan buah-buahan.
- 3) Perkebunan : karet dan kelapa..
- 4) Perikanan.
- 5) Kehutanan : panglong arang dan kayu balak.
- 6) Jasa angkutan sungai dan laut.
- 7) Usaha pembuatan perahu dan kapal kayu (Selat Panjang).

- 8) Industri pertanian : remilling dan crumb rubber, penggergajian kayu, perusahaan sagu, pabrik minyak kelapa.
- 9) Perdagangan.

### 3. Kondisi Prasarana Ekonomi.

#### 1) Pola Perhubungan.

Sistem perhubungan utama dalam SWP ini adalah melalui jalan air. Selat Panjang adalah pelabuhan yang merupakan tempat persinggahan tetap pelayaran pantai antara Belawan dan pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa (Pasar Ikan, Cirebon, Tegal, Semarang).

#### 2) Pengairan.

Dalam SWP ini tidak terdapat irigasi teknis.

#### 3) Fasilitas tenaga listrik.

Fasilitas tenaga listrik tidak tersedia dalam SWP ini.

### 4. Arah Pengembangan.

- a) Peningkatan Industri pembuatan perahu dan kapal kayu.
- b) Perikanan dan pengolahan hasil perikanan.
- c) Kehutanan dan industri pengolahan hasil kehutanan.
- d) Peningkatan fasilitas pelayaran dan pengamanan pelayaran.

## J. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 8.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan 8 meliputi daerah Kunder, Karimun, dan Moro. Jumlah penduduk per kecamatan dalam satuan wilayah ini berkisar antara 14.000 dan 41.000 jiwa. Laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk berkisar antara 2,9 dan 0,7%. Kepadatan penduduknya berkisar antara 160 jiwa/km<sup>2</sup> (Karimun) dan 53 jiwa/km<sup>2</sup> (Moro). Kecamatan Karimun merupakan kecamatan dengan penduduk terpadat di

Propinsi Riau. Tabel IV.8 mengemukakan penduduk, serta luas wilayahnya. SWP 8 terdiri dari 26 desa.

**Tabel IV.8. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayahnya. Satuan Wilayah Pengembangan 8.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pndd.%**)	Luas Wilayah Ha
1.	K u n d u r	40.821	1,2	35.839
2.	Karimun	35.403	2,9	22.155
3.	M o r o	13.928	0,7	64.059
Jumlah		90.152		64.059

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\* ) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. Basis Ekonomi.

Satuan Wilayah pengembangan ini meliputi basis ekonomi di bidang :

- 1) Perdagangan
- 2) Perkebunan kelapa dan karet.
- 3) Perikanan.
- 4) Pertanian padi dan palawija.
- 5) Peternakan babi.
- 6) Industri pertanian, pabrik minyak kelapa, perusahaan sagu, penggergajian kayu.

## 3. Kondisi Prasarana Ekonomi.

Pola Perhubungan.

Sistem perhubungan utama dalam SWP ini adalah melalui jalan air. Di pulau-pulau Karimun dan Kundur, terdapat jalan

darat untuk perhubungan dalam pulau-pulau tersebut.

Dalam SWP ini terdapat tiga pelabuhan, yaitu Tanjung Batu, Moro, dan Tanjung Balai Karimun ('check point' Bea Cukai). Fasilitas perhubungan udara tidak terdapat dalam SWP ini. Terdapat tiga buah Kantor Pos Pembantu, masing-masing di Moro, Tanjung Batu dan Tanjung Balai Karimun. Fasilitas Telepon dan Telegrap tidak terdapat dalam SWP ini.

#### 4. Arah Pengembangan.

##### a) Perkebunan.

Peremajaan, intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman karet, kelapa, kelapa sawit, cengkeh.

##### b) Industri pertanian.

Faktor yang menguntungkan untuk pembangunan industri di daerah ini adalah penduduk yang relatif padat.

### K. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 9.

#### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan 9 meliputi kecamatan Bintan Selatan, Bintan Timur, Bintan Utara dan Batam. Jumlah penduduk per kecamatan dalam satuan wilayah ini berkisar antara 15.000 dan 65.000 jiwa, kecamatan Bintan Timur memiliki laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk yang relatif pesat, yaitu 7,6%. Sedangkan kecamatan yang lain berkisar antara sedang (1,5%) sampai agak lambat (0,8%). Kepadatan penduduknya berkisar antara 106 jiwa/km<sup>2</sup> (Bintan Selatan) dan 46 jiwa/km<sup>2</sup> (Bintan Timur). Tabel IV.9 mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayahnya. SWP 9 terdiri dari 47 desa.

**Tabel IV.9. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah. Satuan Wilayah Pengembangan 9.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pndd%**)	Luas Wilayah Ha
1.	Bintan Selatan	64.147	1,5	63.200
2.	Bintan Timur	23.802	7,6	52.130
3.	Bintan Utara	14.695	1,0	50.175
4.	B a t a m	23.434	0,8	61.253
Jumlah		126.078		226.766

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. Basis Ekonomi.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Perdagangan.
- 2) Pertambangan bauksit.
- 3) Perikanan.
- 4) Industri.
- 5) Perkebunan karet dan kelapa.
- 6) Hortikultura : sayuran dan buah-buahan.
- 7) Penutup.
- 8) Jasa angkutan laut.

## 3. Kondisi Prasarana Ekonomi.

- 1) Pola Perhubungan.

Jaringan jalan yang terpenting dalam SWP ini terdapat di Pulau Bintan, yaitu yang menghubungkan Tanjung Pinang de-

ngan Kijang dan dengan Tanjung Uban serta Berakit.

Perhubungan laut merupakan sarana terpenting di daerah ini. Terdapat tiga pelabuhan, yaitu di Tanjung Pinang, Tanjung Uban dan Belakang Padang. Tanjung Pinang merupakan pelabuhan persinggahan tetap untuk route pelayaran Belawan – Tanjung Pinang. Tabel IV.10 mengemukakan daftar jarak antara Tanjung Pinang, sebagai sentra Utama IV dengan sentra-sentra wilayah terpenting dalam daerah Pembangunan V, serta dengan sentra Utama I, II dan III.

**Tabel IV.10. Jarak antara Tanjung Pinang dengan pusat-pusat wilayah dalam DP-IV dan dengan pusat Utama I, II dan III.**

No.	A n t a r a	Jarak (kilo- meter)
1.	Tanjung Pinang – Ranaai	572
2.	Tanjung Pinang – Serasan	530
3.	Tanjung Pinang – Terempa	315
4.	Tanjung Pinang – Tambelan	340
5.	Tanjung Pinang – Pekanbaru	330
6.	Tanjung Pinang – Dumai	340
7.	Tanjung Pinang – Tembilahan	195
8.	Tanjung Pinang – Dobo Singkep	—

Terdapat tiga lapangan terbang dalam DP yaitu pelabuhan udara Kijang di Pulau Bintan, pangkalan udara Ranai di Pulau Natuna Besar, dan lapangan terbang Dobo di Singkep.

Dalam SWP ini terdapat sebuah Kantor Pos, yaitu di Tanjung Pinang, dan dua Kantor Pos Pembantu, masing-masing di Tanjung Uban dan Kijang.

Fasilitas Telepon terdapat di Tanjung Pinang. Demikian pula fasilitas telegrap.

## 2) Fasilitas Tenaga Listrik

Fasilitas tenaga listrik terdapat di Tanjung Pinang. Pembangunan tenaga listrik di sini memiliki volume kapasitas terpasang kedua besarnya setelah Pekanbaru, yaitu 1.074 kilowatt.

## 4. Arah Pengembangan.

### a) Proyek Industrial Area Pulau Batam.

Proyek ini merupakan proyek pusat yang pelaksanaannya dikuasakan kepada PN. Pertamina. Direncanakan menjadi lokasi pembangunan industri kilang minyak ('oil refineries'), industri petrokimia, dan industri-industri lain, serta penyediaan jasa-jasa ('service') untuk kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi. Direncanakan pula sebagai pusat peternakan sapi daging ('cattle fattening area').

### b) Perkebunan.

SWP ini memiliki perkebunan-perkebunan yang relatif subur. Perlu dilaksanakan rehabilitasi dan peremajaan.

### c) Perikanan.

SWP ini merupakan daerah produksi terbesar di Propinsi Riau. Dari 6.700 buah perahu perikanan bermotor di seluruh Indonesia, sepertiganya beroperasi di daerah Kepulauan Riau, perlu menyediakan prasarana dan fasilitas yang dapat meningkatkan perkembangan perikanan, pengolahan dan pemasaran yang lebih baik dari hasil perikanan, pengadaan sarana pengolahan ikan (es, garam) dan sarana pengangkutan (dermaga, perahu-perahu motor, layar) serta sarana penangkapan ikan (jaring).

### d) Pertambangan bauksit

### e) Industri pecahan batu granit.

### f) Pembangunan pelabuhan Tanjung Pinang.

### g) Pengembangan industri.

### h) Hortikultura.

Penanaman sayuran dan buah-buahan untuk prospek konsumsi yang meningkat.

i) Pembangunan pusat-pusat pemukiman penduduk, pemugaran perumahan dan lingkungan di kota-kota Tanjung Pinang, Kijang, Tanjung Uban, Belakang Padang.

j) Rekreasi dan Pariwisata.

Penyelenggaraan obyek-obyek pariwisata di pulau yang terbesar dalam SWP ini.

k) Peternakan sapi dan ayam

l) Penelitian kemungkinan pemanfaatan bahan industri seperti kaolin dan kapur untuk industri keramik.

## L. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 10.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan 10 meliputi seluruh wilayah kepulauan Anambas, terdiri dari kecamatan-kecamatan Siantan dan Jemaja. Jumlah penduduk per kecamatan berkisar antara 6.000 dan 20.000 jiwa. Laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk berkisar antara 09,% dan 1,6%. Kepadatan penduduknya berkisar antara 21 dan 22 jiwa per jiwa/km<sup>2</sup>. Tabel IV.11 mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayahnya. SWP 11 terdiri dari 15 desa.

**Tabel IV.11. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah. Satuan Wilayah Pengembangan 10.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pnnd%**)	Luas Wilayah Ha
1.	Siantan	19.929	1,6	26.727
2.	Jemaja	5.628	0,9	26.065
Jumlah		25.540		52.782

\*) Berdasarkan Sensus Penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. **Basis Ekonomi.**

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Perikanan dan industri pengawetan ikan.
- 2) Perkebunan kelapa, karet dan cengkeh.
- 3) Pertanian padi dan palawija.
- 4) Peternakan sapi.

## 3. **Kondisi Prasarana Ekonomi.**

- 1) Pola Perhubungan.

Hubungan antara pulau dalam SWP ini adalah dengan sarana perhubungan laut. Demikian pula untuk perhubungan dengan pusat Utama IV, Tanjung Pinang, dan dengan pusat-pusat wilayah yang lain. Jarak Tarempa, Tanjung Pinang adalah 315 km.

Fasilitas perhubungan udara terdapat dalam SWP ini. Di Terempa terdapat sebuah Kantor Pos Pembantu. Akan tetapi fasilitas telegraf dan telepon tidak tersedia.

- 2) Pengairan.

Dalam Pelita I telah dilakukan survey untuk proyek irigasi di Letung.

- 3) Fasilitas Tenaga Listrik.

Fasilitas tenaga listrik tidak terdapat di daerah ini.

## 4. **Arah Pengembangan.**

- a) Pelayaran

Untuk pusat Utama Tanjung Pinang, perlu diselaraskan hubungan pelayaran yang tetap.

- b) Perikanan.
- c) Perkebunan.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanaman kelapa, karet dan cengkeh.

- d) Peternakan.

## M. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 11.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan 11 meliputi seluruh wilayah kepulauan Natuna, terdiri dari kecamatan-kecamatan Bunguran Barat, Bunguran Timur, Serasan dan Midai. Jumlah penduduk per kecamatan dalam satuan wilayah ini berkisar antara 4.000 dan 10.000 jiwa. Laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk berkisar antara 1,7 dan 2,1%. Adapun kepadatan penduduknya berkisar antara 100 jiwa/km<sup>2</sup> (Midai) dan 9 jiwa/km<sup>2</sup> (Bunguran Timur). Tabel IV.12 mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayahnya. SWP 11 terdiri dari 16 desa.

Tabel IV.12. Jumlah dan laju rata-rata tahunan Pertambahan penduduk serta luas wilayahnya. Satuan Wilayah Pengembangan 11.

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pndd%**)	Luas Wilayah Ha
1.	Bunguran Barat	10.270	1,7	93.834
2.	Bunguran Timur	8.599	1,7	98.395
3.	Serasan	5.024	2,1	23.459
4.	Midai	3.918	1,7	3.910
Jumlah		27.811		219.597

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. **Basis Ekonomi.**

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Perkebunan karet, kelapa dan cengkeh.
- 2) Pertanian padi dan palawija.
- 3) Perikanan dan industri pengawetan ikan.
- 4) Peternakan sapi.
- 5) Industri kerajinan rakyat, barang-barang anyaman.

## 3. **Kondisi Prasarana Ekonomi.**

- 1) Pola perhubungan.

Di Bunguran atau Pulau Natuna Besar terdapat jalan darat yang menghubungkan pantai Timur dengan pantai Barat maupun dengan pantai Selatan. Jalan-jalan tersebut menghubungkan Mangadah dengan Ranai dan antara Tanjung Karang dengan Pian Padang. Akan tetapi sarana perhubungan utama antara sub pusat dalam SWP ini adalah melalui laut. Jarak antara Ranai dengan Midai adalah 79 mil (statute mile) atau 115 km.

Terdapat sebuah lapangan udara di Ranai. Fasilitas perhubungan udara ini adalah milik TNI-AU, terletak di pulau Natuna Besar

- 2) Pengairan.

Dalam SWP ini tidak terdapat irigasi teknis.

- 3) Fasilitas Tenaga Listrik.

Dalam SWP ini tidak tersedia fasilitas tenaga listrik.

## 4. **Arah Pembangunan.**

- a) Perkebunan.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanaman cengkeh kelapa dan karet.

- b) Perikanan.
- c) Pembangunan dermaga di Ranai, Sedanau, Midai dan Serasan.

- d) Perbaikan jalan Mangadah – Ranai.
- e) Peternakan.

Pengolahan peternakan yang lebih baik di pulau Midai, Natuna Besar dan Natuna Selatan.

## N. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 12.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan 12 meliputi daerah kecamatan Tambelan. Oleh karena lokasinya tersendiri, maka satuan wilayah ini hanya terdiri dari satu kecamatan. Tabel IV.13 mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas satuan wilayah pengembangan ini. SWP 12 terdiri dari 6 desa.

**Tabel IV.13. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah, satuan wilayah pengembangan 12.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pnd.%**)	Luas Wilayah Ha
1.	Tambelan	4.032	0,5	16.942
Jumlah		4.032		16.942

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. **Basis Ekonomi.**

Wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Perikanan.
- 2) Peternakan sapi.
- 3) Perkebunan karet, cengkeh dan kelapa.
- 4) Pertanian padi dan palawija.
- 5) Pembuatan kapal kayu.

## 3. **Kondisi Prasarana Ekonomi.**

- 1) Pola Perhubungan.

Satu-satunya sarana perhubungan dalam SWP ini adalah melalui jalan laut. Jarak antara Tambelan dan Tanjung Pinang adalah 210 mil (Statute mile) atau 340 km.

Tidak terdapat fasilitas perhubungan udara di daerah ini. Demikian pula tidak tersedia fasilitas pos, telegraf dan telepon.

- 2) Pengairan.

Dalam SWP ini tidak terdapat irigasi teknis.

- 3) Fasilitas tenaga listrik.

Fasilitas tenaga listrik tidak tersedia di daerah ini.

## 4. **Arah Pengembangan.**

- a) Pelayaran.

Untuk membina hubungan ekonomi dan sosial antara SWP ini dengan pusat utama Tanjung Pinang, demikian pula pusat-pusat wilayah yang lain dalam daerah pengembangan IV, perlu diselenggarakan hubungan pelayaran yang tetap. Untuk ini perlu dibangun dermaga-dermaga dan sarana-sarana pengamanan pelayaran.

- b) Pos dan Telekomunikasi.

Untuk mengatasi isolasi karena lokasi SWP ini yang menyendiri, perlu ditingkatkan fasilitas pos dan telekomunikasi.

c) Perkebunan.

Intensifikasi pemeliharaan pertanaman kelapa, karet dan cengkeh.

## O. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 13.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan 13 meliputi seluruh kepulauan Lingga, terdiri dari daerah kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.

Jumlah penduduk tiap kecamatan satuan ini berkisar antara 11.000 dan 29.000 jiwa. Kecamatan Senayang merupakan satu-satunya daerah dalam Propinsi Riau yang selang dasawarsa 1961 – 1971 mengalami pengurangan jumlah penduduk, yaitu minus 0,4% per tahun. Laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk kedua kecamatan yang lain berkisar antara 0,7 dan 1,7%. Kepadatan penduduknya berkisar antara 35 jiwa/km<sup>2</sup> (Singkep) dan 20 jiwa/km<sup>2</sup> (Lingga). Tabel IV.14 mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayahnya. SWP 13 terdiri dari 37 desa.

**Tabel IV.14. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah, satuan wilayah pengembangan 13.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pnd. %**)	Luas Wilayah Ha
1.	Singkep	28.631	1,7	80.802
2.	Lingga	18.027	0,7	89.273
3.	Senayang	10.865	0,4	39.824
Jumlah		57.523		209.824

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. **Basis Ekonomi.**

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Perikanan.
- 2) Pertambangan timah.
- 3) Perdagangan.
- 4) Perkebunan kelapa, karet dan cengkeh.
- 5) Industri pengolahan hasil hutan, penggergajian kayu.

## 3. **Kondisi Prasarana Ekonomi.**

- 1) Pola Perhubungan.

Pada pulau-pulau Lingga dan Singkep, terdapat jalan-jalan yang menghubungkan tempat-tempat di pantai utara dengan pantai selatan, tetapi sistem perhubungan utama dalam SWP ini adalah melalui laut. Di Dobo Singkep terdapat sebuah lapangan terbang. Fasilitas perhubungan udara ini berada di bawah pengawasan pelabuhan udara Kijang. Sebuah Kantor Pos Pembantu terdapat di Dobo. Akan tetapi fasilitas telepon dan telegraf tidak tersedia.

- 2) Pengairan.

Dalam SWP ini tidak terdapat irigasi teknis.

- 3) Fasilitas tenaga listrik.

Fasilitas tenaga listrik tidak terdapat dalam SWP ini.

- 4) Perkebunan.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanaman karet, kelapa dan cengkeh.

## **P. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 14.**

### **1. Wilayah dan Penduduk.**

Satuan Wilayah Pengembangan 14 terdiri dari daerah kecamatan Tembilahan, Gaung Anak Serka, Kuala Indragiri, Mandah, Tempuling dan Keteman. Jumlah penduduk per kecamatan

dalam daerah ini berkisar antara 15.000 dan 50.000 jiwa. Sedangkan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduknya termasuk menengah sampai sedang, yaitu antara 1,2% dan 3,5%. Kepadatan penduduknya agak padat sampai jarang, yaitu berkisar antara 107 jiwa/km<sup>2</sup> (Tembilahan) sampai 5 jiwa/km<sup>2</sup> (Kateman). Tabel IV.15 mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayahnya. SWP ini terdiri dari 44 desa.

**Tabel IV.15. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah, satuan wilayah pengembangan 14.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pnd. %**)	Luas Wilayah Ha
1.	Tembilahan	40.592	3,0	37.799
2.	Gaung Anak Serka	49.537	2,2	268.474
3.	Kuala Indragiri	28.041	2,9	72.335
4.	Mendah	19.898	1,2	147.924
5.	Tempuling	17.650	2,8	105.568
6.	Ketaman	11.011	3,5	211.131
Jumlah		166.729		843.231

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. Basis Ekonomi.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Pertanian : persawahan pasang surut, palawija.
- 2) Perkebunan kelapa dan industri pengolahan kelapa (kopra), minyak kelapa, perusahaan sagu, penggergajian kayu, pabrik es.

- 3) Perikanan.
- 4) Hortikultura : nenas.
- 5) Perdagangan kelapa bulat, kopra, dan minyak kelapa.
- 6) Perdagangan umum.
- 7) Jasa pengangkutan sungai dan laut.
- 8) Kerajinan rakyat kain tenun.

### 3. Kondisi Prasarana Ekonomi.

#### 1) Pola Perhubungan.

Dalam SWP ini peranan jalan darat kurang berarti. Perhubungan antara sub pusat wilayah lebih banyak menggunakan jalan air. Jalan ada hanya menghubungkan Sungai Luar dan Sungai Salak melewati Tembilahan. Akan tetapi jalur ini pun tidak dapat dilalui kendaraan.

SWP ini memiliki 5 buah pelabuhan, masing-masing di Tembilahan, Sapat, Perigi Raja, Kuala Mendah dan Sungai Guntung. Pelabuhan Tembilahan terutama merupakan pelabuhan untuk ekspor kopra, yang merupakan hasil utama daerah ini. Melalui Sungai Indragiri dapat pula dilakukan pelayaran ke Rengat. Tetapi kelancaran lalu lintas Tembilahan – Rengat agak terhambat pada musim kemarau karena mendangkalnya sungai tersebut. Apabila dapat diteruskan pembangunan jalan dari sungai Salak ke Kuala Cinaku, di samping penyempurnaan jalan yang sudah ada antara Rengat – Kuala Cinaku dan antara Tembilahan – Sungai Salak, arus barang antara SWP 14 dan SWP 46 diharapkan akan menjadi lebih lancar.

Di SWP ini tidak terdapat lapangan terbang. Hubungan udara ke Pekanbaru dilakukan lewat lapangan terbang Jepara di SWP 16. Kantor Pos di Tembilahan melayani hubungan pos untuk SWP 14. Fasilitas telepon terdapat di Tembilahan. Akan tetapi tidak terdapat fasilitas telegraf.

#### 2) Pengairan.

Terdapat proyek P4S (Proyek Pembukaan Persawahan Pasang Surut) di Teluk Kiambang. Dalam rangka perluasan pelaksanaan proyek ini, telah dilakukan penggalian kanal dari Teluk Kiambang ke Sungai Gergaji, dekat Kotabaru, Ratih. Dengan penyempurnaan penggalian kanal ini, maka akan tercipta jalan pintas yang menghubungkan SWP 14 dengan SWP 15.

3) Fasilitas tenaga listrik.

Di Tembilahan terdapat fasilitas tenaga listrik, dengan kapasitas terpasang 200 kilowatt.

4. Arah Pengembangan.

a) Persawahan.

Pengembangan persawahan pasang surut merupakan salah satu proyek pembangunan utama SWP ini. Telah dirintis pelaksanaannya pada Pelita I.

b) Tanaman kelapa.

Program-program peremajaan dan ekstensifikasi pertanaman kelapa sedang dan akan dilaksanakan dalam SWP ini, yang merupakan salah satu di antara areal-areal utama menghasilkan kopra di Indonesia.

c) Pembangunan Prasarana.

Untuk meningkatkan hubungan dengan pusat-pusat wilayah yang lain, perlu dibangun jalan antara Sungai Salak ke Kuala Cinaku, serta peningkatan jalan dari Tembilahan ke Sungai Salak, oleh karena kelancaran angkutan sungai tergantung pada keadaan musim.

d) Fasilitas angkutan sungai/laut.

Diperlukan pembangunan dermaga-dermaga di setiap sub pusat.

e) Dalam rangka meletakkan landasan untuk pembangunan pusat-pusat penduduk/pemukiman yang baik, perlu dilakukan perencanaan dasar untuk kota-kota Tembilahan, Sungai Salak, Teluk Pinang, Khairah Mandah, Kuala Mandah dan Sungai Guntung.

f) Industri pengolahan kelapa dan hasil-hasil kulitnya.

SWP ini merupakan daerah penghasil kelapa terbesar di propinsi Riau, perlu dirintis pembangunan industri minyak dan industri-industri yang dapat memanfaatkan hasil-hasil kulitnya.

g) Perikanan.

Pengembangan tambak-tambak di daerah pasang surut.

h) Hortikultura.

Pembinaan produksi dan pemasaran.

i) Kemungkinan pelaksanaan rencana kanalisasi Seberida Tembilahan.

j) Peningkatan industri perkapalan.

## Q. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 15.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan 15 meliputi wilayah kecamatan Ratih dan Enok. Jumlah penduduk per kecamatan dalam satuan wilayah ini adalah antara 41.000 dan 78.000 jiwa. Laju rata-rata tahunan penambahan penduduk adalah antara 2,4 dan 5,6%. Kepadatan penduduk antara 48 dan 27 jiwa/km. Tabel IV.16 mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertumbuhan penduduk, serta luas wilayahnya. SWP 15 terdiri dari 37 desa.

**Tabel IV.16. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertumbuhan penduduk, serta luas wilayah. Satuan Wilayah Pengembangan 15.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertumbuhan Pnd. %**)	Luas Wilayah Ha
1.	Ratih	77.906	5,6	162.267
2.	Enok	41.380	2,4	155.099
Jumlah		119.286		317.366

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. Basis Ekonomi.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Pertanian : persawahan pasang surut dan tadah hujan, serta palawija.
- 2) Hortikultura : sayuran dan buah-buahan (nenas).
- 3) Perladangan : palawija dan sayuran.
- 4) Perkebunan kelapa.
- 5) Perikanan.
- 6) Industri pembuatan kapal kayu.
- 7) Kerajinan rakyat : gedogan.
- 8) Industri pabrik minyak kelapa dan pabrik es.

## 3. Kondisi Prasarana Ekonomi.

- 1) Pola Perhubungan.

Sistem perhubungan melalui jalan darat tidak memegang peranan penting dalam SWP ini, karena perhubungan antara tempat kebanyakan dilakukan melalui jalan air.

Terdapat dua pelabuhan dalam SWP ini, yaitu di Pulau Kijang dan Kuala Enok. Dengan selesainya penggalian kanal antara Teluk Kiambang dan Sungai Gergaji (dekat Kotabaru, Reteh), akan terdapat jalan pintas yang pendek antara SWP 14 dengan SWP 15.

Dalam SWP ini tidak terdapat fasilitas perhubungan udara. Demikian pula tidak terdapat fasilitas pos, telepon, maupun telegraf.

- 2) Pengairan.

Sistem irigasi dan drainase untuk persawahan padi di daerah ini adalah dengan sistem persawahan pasang surut. SWP ini merupakan daerah dengan areal persawahan pasang surut terluas di daerah Propinsi Riau.

- 3) Fasilitas tenaga listrik.

Di SWP ini tidak terdapat fasilitas tenaga listrik.

## 4. Arah Pengembangan.

a) Pengembangan persawahan Pasang Surut.

Perkembangan diarahkan pada jenis tanah gleihumas, yang terletak sepanjang sungai Reteh pada jarak lateral sampai 500 – 1.500 meter.

b) Palawija.

Jenis-jenis yang dapat ditanam antara lain ubi kayu, ubi jalar, talas.

c) Hortikultura.

Sayuran : bawang merah, cabai merah, kacang panjang, dan sebagainya. Buah-buahan : pisang, durian, rambutan dan sebagainya.

d) Tanaman Industri.

Kelapa, karet, lada, dan kelapa sawit memiliki kemungkinan-kemungkinan untuk dikembangkan dalam SWP ini.

e) Dalam rangka meletakkan landasan untuk pembangunan pusat-pusat penduduk/perkotaan yang baik, perlu dilakukan perencanaan dasar untuk kota-kota Enok, Pulau Kijang, Kuala Enok dan Kotabaru.

f) Peternakan Itik.

## R. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 16.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan 16 meliputi daerah Kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Siberida dan Peranap, serta bagian selatan dari kecamatan-kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, dan Bunut. Jumlah penduduk per kecamatan dalam satuan wilayah ini berkisar antara 10.000 dan 42.000 jiwa. Laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk antara 1,3% dan 0,1%; Kepadatan penduduk berkisar antara 28 jiwa/km<sup>2</sup> (Pasir Penyu) dan 3 jiwa per km<sup>2</sup> (Siberida). Tabel IV.17 mengemukakan jumlah dan laju tahunan rata-rata pertambahan penduduk serta luas wilayahnya. SWP 16 terdiri dari 113 desa.

**Tabel IV.17. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayah, satuan wilayah pengembangan 16.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pnd. %**)	Luas Wilayah Ha
1.	Pasir Penyu	41.551	0,8	148.594
2.	Rengat	33.559	1,3	213.105
3.	Seberida	9.539	1,0	288.029
4.	Peranap	11.460	0,1	170.098
Jumlah		96.109		819.826

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

## 2. Basis Ekonomi.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Pertambangan minyak bumi (PTSI)
- 2) Perdagangan.
- 3) Pertanian : padi dan palawija.
- 4) Perkebunan karet.
- 5) Kehutanan.
- 6) Perikanan pedalaman.
- 7) Industri pertanian : pabrik minyak kelapa, remilling dan crumb rubber, penggergajian kayu.

## 3. Kondisi Prasarana Ekonomi.

- 1) Pola perhubungan.

SWP ini dilalui jalan raya dari Teluk Kuantan ke Kuala

Cinaku. Selain itu terdapat jalan dari Air Molek ke Buatan, yang menghubungkan Sungai Indragiri dengan Sungai Kampar dan Sungai Siak. Dari Pekan Heran terdapat jalan ke Pangkalan Kasai, Seberida. Antara Rengat dan Tembilahan dapat ditempuh dengan jalan air melalui Sungai Indragiri. Akan tetapi untuk angkutan dalam volume besar, hanya dapat lancar dilakukan pada musim hujan, berhubung permukaan air sungai ini umumnya berkurang di musim kemarau.

Dalam SWP ini terdapat dua lapangan udara, yaitu Jepura dan Pranap. Pelabuhan udara Jepura merupakan bagian dari jaringan perhubungan udara antara Pekanbaru dan Jambi. Sedangkan lapangan terbang Peranap adalah milik perusahaan kayu yang berusaha di wilayah ini.

Terdapat Kantor Pos di Rengat dan sebuah Kantor Pos Pembantu di Lirik. Sedangkan fasilitas telepon dan telegraf keduanya terdapat di Rengat dan Air Molek.

## 2) Pengairan.

Tidak terdapat irigasi teknis dalam SWP ini. Di beberapa tempat terdapat areal-areal potensial untuk pengembangan proyek-proyek irigasi dan reklamasi sederhana, yaitu di Sungai Baung Sekip, dan daerah-daerah antara Rengat – Pasir Ringgit.

## 3) Fasilitas tenaga listrik.

Fasilitas tenaga listrik di Rengat dengan kapasitas terpasang sebesar 352 kilowatt. Selain itu terdapat pula perangkitan tenaga (power plant) di Lirik, untuk keperluan operasi pertambangan minyak bumi dan penerangan emplasemen.

## 4. Arah Pengembangan.

### a) Pertanian.

Pengembangan irigasi dan reklamasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

### b) Perkebunan.

Dalam SWP ini terdapat banyak areal perkebunan. Perlu program rehabilitasi peremajaan dan introduksi jenis-jenis unggul.

c) Prasarana perhubungan.

Peningkatan kondisi dan ekstensifikasi jaringan jalan ke arah selatan Pangkalan Kasai untuk menghubungkan SWP ini dengan SWP 15.

d) Pembuatan pelabuhan di Kuala Cinaku untuk mengatasi masalah kedangkalan sungai antara Rengat dan Kuala Cinaku. Dalam rangka meletakkan landasan untuk pembangunan pusat-pusat pemukiman penduduk yang baik perlu dilakukan perencanaan dasar untuk kota-kota Rengat, Air Molek, Pangkalan Kasai dan Pranap.

## S. SATUAN WILAYAH PENGEMBANGAN 17.

### 1. Wilayah dan Penduduk.

Satuan Wilayah Pengembangan 17 terdiri dari wilayah Kecamatan Kuantan Tengah, Kuantan Hilir, Kuantan Mudik, Cirenti dan Singingi. Jumlah penduduk per kecamatan dalam satuan wilayah ini antara 21.000 dan 5.500 jiwa. Laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk adalah antara 1,6% dan 0,6. Kepadatan penduduk berkisar antara 58 jiwa/km<sup>2</sup> (Kuantan Tengah) dan 2 jiwa/km<sup>2</sup> (Singingi). Tabel IV.18 mengemukakan jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk, serta luas wilayahnya. SWP 17 terdiri dari 39 desa.

### 2. Basis Ekonomi.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki basis ekonomi di bidang :

- 1) Pertanian : persawahan setengah teknis dan tadah hujan, serta palawija.
- 2) Perkebunan karet.
- 3) Kehutanan.
- 4) Hortikultura : sayuran dan buah-buahan.
- 5) Perladangan.
- 6) Peternakan kerbau dan sapi.
- 7) Industri pembakaran kapur.

**Tabel IV.18. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayah, satuan wilayah pengembangan 17.**

No. Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertumbuhan Pnd.(%**)	Luas Wilayah Ha
1. Kuantan Tengah	31.166	1,3	54.110
2. Kuantan Hilir	24.826	0,6	78.872
3. Kuantan Mudik	23.355	1,6	193.557
5. Cerenti	16.195	1,3	90.601
Jumlah	101.044		765.603

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

### 3. Kondisi Pasarana Ekonomi.

#### 1) Pola perhubungan.

SWP ini memiliki jaringan jalan yang relatif baik. Jalan raya Pekanbaru – Simpang Tiga – Teluk Kuantan – Rengat merupakan jalan dengan volume intensitas lalu lintas ketiga sesudah jalan negara Pekanbaru – Padang dan jalan Propinsi Pekanbaru – Dumai. Jalan ini dan jalan air selanjutnya melalui sungai Indragiri sampai ke Tembilahan merupakan jalan penghubung antara pusat-pusat utama DP-I dan DP-III. Selalu terdapat pula jalan simpang dari Teluk Kuantan ke daerah Sumatera Barat. Perhubungan sungai kurang berarti di daerah ini kecuali secara terbatas pada waktu musim hujan. Demikian pula tidak terdapat fasilitas perhubungan udara.

**Tabel IV.18. Jumlah dan laju rata-rata tahunan pertambahan penduduk serta luas wilayah, satuan wilayah pengembangan 17.**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk jiwa *)	Laju rata-rata tahunan pertambahan Pnd.%**)	Luas Wilayah Ha
1.	Kuantan Tengah	31.166	1,3	54.110
2.	Kuantan Hilir	24.826	0,6	78.872
3.	Kuantan Mudik	23.355	1,6	193.557
5.	Cerenti	16.195	1,3	90.601
Jumlah		101.044		765.603

\*) Berdasarkan sensus penduduk 1971.

\*\*\*) Angka rata-rata selama dasawarsa 1961 – 1971.

### 3. Kondisi Prasarana Ekonomi.

#### 1) Pola perhubungan.

SWP ini memiliki jaringan jalan yang relatif baik. Jalan raya Pekanbaru – Simpang Tiga – Teluk Kuantan – Rengat merupakan jalan dengan volume intensitas lalu lintas ketiga sesudah jalan negara Pekanbaru – Padang dan jalan Propinsi Pekanbaru – Dumai. Jalan ini dan jalan air selanjutnya melalui sungai Indragiri sampai ke Tembilahan merupakan jalan penghubung antara pusat-pusat utama DP-I dan DP-III. Selalu terdapat pula jalan simpang dari Teluk Kuantan ke daerah Sumatera Barat. Perhubungan sungai kurang berarti di daerah ini kecuali secara terbatas pada waktu musim hujan. Demikian pula tidak terdapat fasilitas perhubungan udara.

Dalam SWP ini terdapat empat Kantor Pos Pembantu masing-masing di Teluk Kuantan, Lubuk Jambi, Baserah dan Cerenti. Fasilitas telepon terdapat di Teluk Kuantan, akan tetapi SWP ini tidak memiliki fasilitas telegrap.

2) Pengairan.

Dalam Pelita I terdapat proyek-proyek irigasi di Simendolak dan Rawang Udang. Areal-areal potensial untuk pengembangan irigasi terdapat di Sungai Sawi, Simendolak (perluasan, Rawang Udang, Sinambak, dan Petapanan Toar).

3) Fasilitas Tenaga Listrik.

Di Teluk Kuantan terdapat fasilitas tenaga listrik sebesar 150 kilowatt kapasitas terpasang.

4. Arah Pengembangan.

a) Pertanian.

Pengembangan proyek-proyek irigasi untuk meningkatkan potensi produksi dari areal persawahan yang sudah ada, maupun ekstensifikasi areal persawahan baru.

b) Kehutanan.

Penetapan tata batas dalam rangka pengukuhan hutan untuk pengelolaan daerah aliran sungai Indragiri bagian hulu, termasuk konversi sebagian hutan alam menjadi hutan industri dan tanah-tanah perkebunan.

c) Perkebunan.

Peremajaan dan intensifikasi pengelolaan perkebunan-perkebunan karet. Diversifikasi perkebunan dengan tanaman cengkeh, kopi, cassia vera dan sebagainya.

d) Prasarana perhubungan.

Peningkatan kondisi jaringan yang terdapat dalam SWP ini.

e). Industri Kehutanan.

Peningkatan pengolahan kayu.

f) Penelitian kemungkinan pengembangan keramik di Muara Lembu.

h) Rekreasi dan Pariwisata.

Pengembangan obyek pariwisata di daerah Teluk Kuantan. Di daerah ini terdapat upacara rakyat yang khas yaitu jalur dan penurunan serta perlombaan perahu yang diadakan setiap tahun.

## T. PEMBANGUNAN PRASARANA EKONOMI.

### 1. Pola Perhubungan.

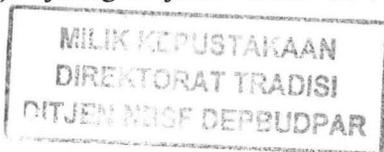
Perencanaan tata guna tanah untuk pembangunan pola perhubungan meliputi tiga sistem jaringan perhubungan sesuai bentuk wilayah propinsi Riau, sebagai berikut :

- a. Sistem jaringan perhubungan darat untuk daerah Riau Daratan di atas ketinggian 15 meter dari permukaan laut.
- b. Sistem jaringan perhubungan sungai/pantai pada daerah-daerah di bawah ketinggian 15 meter dan
- c. Sistem jaringan perhubungan laut yang menghubungkan pulau dalam daerah kepulauan Riau. Dengan adanya tiga sistem jaringan perhubungan yang berbeda tersebut, maka untuk dapat memenuhi fungsi sebaik-baiknya sebagai prasarana ekonomi, baik dalam lingkungan tiap-tiap daerah pembangunan, maupun meliputi seluruh daerah propinsi Riau, sebagai kesatuan administratif, arah pengembangan daripada pola perhubungan ditujukan untuk menciptakan struktur pola perhubungan yang berintegrasi. Dengan demikian akan dapat dicegah hambatan-hambatan dalam kelancaran arus barang dan jasa, yang disebabkan oleh tidak tersambungnyajaringan-jaringan transportasi.

### Sistem Jaringan Perhubungan Darat.

Penyusunan sistem jaringan perhubungan darat dilaksanakan sesuai tingkat hirarki dari 'asterial system' jaringan prasarana perhubungan yang dikategorikan sebagai :

- 1) jaringan jalan antar propinsi.
- 2) jaringan jalan antar DP (Daerah Pembangunan) dan



- antar SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) dan
- 3) jaringan jalan intra SWP.

### **Antar Propinsi.**

Dengan dikembangkannya pembagian wilayah ekonomi di seluruh Indonesia atas satuan-satuan Wilayah Pembangunan Regional di tingkat sub nasional, maka peranan jalan-jalan antar propinsi akan bertambah penting untuk membina pola-pola interdependensi ekonomi inter dan intra regional.

Pada waktu ini telah terdapat tiga jalur jalan penghubung antar propinsi, yaitu :

- a) jalan negara Pekanbaru – Padang, yang menghubungkan Propinsi Riau dengan Sumatera Barat, dan saat ini merupakan pula satu-satunya jalan darat terbaik yang menghubungkan kedua Propinsi itu.
- b) jalan Lubuk – Jambi – Parit Rentang – Takung Mudik (per-tigaan), yang menghubungkan Propinsi Riau dengan bagian selatan Propinsi Sumatera Barat, atau dengan Propinsi Jambi lewat Sungai Dareh dan
- c) jalan Rantau Berangin – Pasir Pangaraian, yang menghubungkan Propinsi Riau dengan Sumatera Utara lewat Muara Katongan, atau melalui Dalu-Dalu, lewat Sungai Korang atau lewat Mahati. Dua jalan yang tersebut terakhir, pada waktu ini masih berada dalam kondisi tidak diperkeras.

Selain daripada itu pada waktu ini telah terdapat jalan dari Duri ke Sungai Rantau dan ke Ujung Tanjung. Dengan dilanjutkannya pembangunan jalan ini sampai ke kota Pinang di daerah Sumatera Utara, maka akan terbentuk jalan pintas yang pendek antara daerah perkebunan di bagian selatan Propinsi Sumatera Utara dengan pelabuhan samudera Dumai. Dari Dumai, pada waktu ini sedang dibangun jalan raya ke Bukit Datuk, terus ke Sungai Mesjid. Dengan dilanjutkannya jalan ini menyambung dengan jalan Rantau Bais – Ujung Tanjung, maka terdapat "tracee" jalan yang lebih pendek, karean tanpa melewati Duri. Pembangunan ditinjau dalam hubungan dengan pembinaan urat nadi perhubungan dalam daerah 'hinterland' pelabuhan Dumai. Dengan penyempurnaan jalan Propinsi Pekanbaru – Dumai, yang bersama dengan jalan negara Pekanbaru – Padang, merupa-

kan jalan penghubung antara pantai Barat dengan pantai Timur Sumatera bagian Tengah, maka ongkos transport barang-barang eksport untuk pelabuhan tujuan Singapura, Malaka, dan Tokyo atau untuk re-ekspor melewati (rencana) pelabuhan bebas Pulau Batam, ke pelabuhan-pelabuhan tujuan Eropah, Australia dan Amerika, akan lebih murah lewat Dumai daripada melwati pelabuhan Teluk Bayur.

Dengan demikian terdapat tiga jalur yang perlu ditingkatkan/dalam rangka mengembangkan kerjasama antar berbagai daerah/propinsi, yaitu :

- 1) Jalan Lubuk Jambi – perbatasan Sumatera Barat.
- 2) Jalan Rantau Berangin – Pasir Pangaraian – perbatasan Sumatera Utara/Sumatera Barat; dan
- 3) Jalan Pekanbaru – Dumai, dengan jalan simpang Duri – Sungai Rantau – perbatasan Sumatera Utara.

#### **Antara Daerah Pembangunan dan Antara Satuan Wilayah Pengembangan.**

Sistem jaringan jalan yang telah ada pada waktu ini (perhatikan peta-peta 17.16 sampai dengan 17,21), telah cukup memadai untuk membina hubungan antar – DP (Daerah Pembangunan) dan antar – SWP (Satuan Wilayah Pembangunan). Jaringan jalan tersebut telah pula merupakan sistem yang komplementer terhadap jaringan angkutan sungai melewati sungai-sungai Siak, Kampar dan Indragiri. Dengan telah dibangunnya pula jalan Duri – Sungai Rantau dan Duri – Ujung Tanjung, maka telah terhubung pula lintas kombinasi sistem hubungan darat dan sungai yang telah ada dengan jaringan perhubungan sungai dan pantai Sungai Rokan, Bagan Siapi-api – Labuhan Bilik – Tanjung Balai, Asahan. Arah pengembangan yang penting untuk dilaksanakan adalah penyempurnaan atau peningkatan kondisi daripada sebagian besar jaringan jalan tersebut, yang pada waktu ini masih merupakan jalan yang tidak diperkeras atau yang diperkeras dengan minyak mentah. Jalan-jalan yang dimaksud adalah :

- a) Jalan Propinsi Dumai – Pekanbaru.
- b) Jalan Propinsi Simpang Tiga – Teluk Kuantan – Rengat.
- c) Jalan Propinsi Rantau Berangin – Pasir Pangaraian.
- d) Jalan Propinsi Air Molek – Buatan.

- e) Jalan Duri – Sungai Rangau atau Duri – Ujung Tanjung.
- f) Jalan Dumai – Bukit Datuk – Sungai Mesjid – Ujung Tanjung.

### **Intra Satuan Wilayah Pengembangan.**

Pembangunan jaringan jalan intra – SWP diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut :

- a) membina hubungan antara sub pusat wilayah dengan pusat wilayah.
- b) membina hubungan antara sub sentra wilayah; dan
- c) mengatasi masalah kesulitan pemasaran hasil-hasil pertanian dari daerah produksi ke daerah konsumsi, dan di lain pihak memperlancar penyaluran sarana-sarana produksi (bibit unggul, pupuk obat-obatan pemberantasan hama/penyakit tanaman) serta barang-barang keperluan lainnya).

Jalan-jalan intra – SWP yang perlu dibangun atau ditingkatkan kondisinya adalah :

- a) antara Kota Lama – Ujung Batu.
- b) antara Kota Tengah – Rambah.
- c) antara Sidingin – Tanah Putih.
- d) antara Rengat – Pangkalan Kasai – Seberida – Keriteng – Kemuning Muda.
- e) antara Sungai Luar – Tembilahan, Sungai Salak – Teluk Kiambang – Kuala Cinaku .
- f) antara Sungai Pakning – Bukit Batu – Sepahat.
- g) antara Dumai – Teluk Makmur – Pelintang.
- h) antara Dumai – Bangsal Aceh – Lubuk Gaung – Tanjung Penyambal – Sungai Sembilan – Basilan Baru – (Pangkalan Pasir).
- i) antara Batu Panjang – Teluk Lecah.
- j) antara Tanjung Medang – Tanjung Punak.
- k) antara Bengkalis – Maksum.
- l) antara Bengkalis – Kelemantan – Sekodi.
- m) antara Bengkalis – Teluk Pambang.
- n) antara Pekanbaru – Perawang – Buatan.
- o) antara Kubu Hulu – Teluk Merbau.
- p) antara Rantau Binuang – Sungai/Murai – Kota Tengah. dan
- q) antara Sungai Murai – Kota Lama.

Sebagian dari jalan-jalan tersebut di atas terletak sepanjang pantai atau aliran sungai. Pembangunan jalan darat sepanjang jalur-jalur tersebut, akan mempunyai arti ekonomi penting karena kelancaran perhubungan lewat jalan air (sungai dan laut), sangat dipengaruhi oleh keadaan musim dan pasang surut laut, sedangkan pantainya yang terdiri dari tanah liat, menyulitkan pendaratan pada waktu air surut. Selain daripada itu, penyebaran tanah-tanah yang relatif subur di daerah ini, sebagai daerah-daerah produksi pertanian, umumnya terletak sepanjang sungai dan garis pantai.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian tentang pendekatan pembangunan regional terdahulu, pembangunan prasarana perhubungan memegang peranan penting dalam membina dan mengembangkan ikatan-ikatan ekonomi, sosial dan fisik antara sub-pusat dengan pusat wilayah dan dengan lingkungannya. Tersedianya prasarana perhubungan intra SWP yang baik, akan memperbesar efektivitas dan memperluas daya pelayanan daripada fasilitas-fasilitas sosial dan ekonomi yang dialokasikan pembangunannya dalam SWP yang bersangkutan.

#### **Sistem Jaringan Perhubungan Sungai dan Pantai.**

Pada daerah-daerah di bawah ketinggian 15 meter, pengangkutan atau transportasi air merupakan prasarana perhubungan yang utama. Terdapat empat buah sungai besar yang mempunyai arti navigasi, yaitu : Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan sungai Indragiri. Selain itu terdapat pula sungai-sungai kecil dan anak-anak sungai yang mempunyai arti hanya untuk perhubungan lokal. Tabel IV.19 mengemukakan kapasitas pelabuhan yang terdapat dalam sistem jaringan perhubungan sungai dan pantai di daerah Propinsi Riau.

**Tabel IV.19. Kapasitas Pelabuhan sungai dan pantai, Propinsi Riau.**

No.	Nama Pelabuhan	Kapasitas Pelabuhan
1.	Teluk Merbau	Pelabuhan untuk kapal yang dalam luasnya sangat terbatas (kapal-kapal

1	2	3
		kecil, motor tempel, dan sebagainya).
2.	Pematang Cempedak Sungai Rangau	Pelabuhan untuk kapal yang dalam luasnya sangat terbatas.
3.	R e n g a t	Pelabuhan untuk kapal yang dalam luasnya sangat terbatas.
4.	Bagan Siapi-api	Pelabuhan untuk kapal yang dalam luasnya maksimum 3 meter.
5.	Bengkalis	Pelabuhan untuk kapal yang dalam luasnya maksimum 3 meter.
6.	Tembilahan	Pelabuhan untuk kapal yang dalam luasnya maksimum 3 meter.
7.	Pekanbaru	Pelabuhan untuk kapal yang dalam luasnya maksimum 5 meter.
8.	D u m a i	Pelabuhan untuk kapal segala ukuran.
9.	Buatan	Pelabuhan untuk kapal segala ukuran.
10.	Selat Panjang	Pelabuhan untuk kapal segala ukuran.

Sungai Siak, termasuk anak sungainya, yaitu sungai Tapung Kanan sangat baik untuk navigasi, berhubung sungainya cukup dalam, tetapi sungai Tapung Kiri kurang baik untuk pelayaran, karena sungainya dangkal dan sempit. Ditinjau dari kedalaman airnya, yaitu antara 5 – 9 meter sampai di Pelabuhan Pekanbaru.

Sungai Siak dapat dilayari dengan kapal sampai ukuran berat 1.500 ton. Akan tetapi oleh karena lebar sungainya yang terbatas untuk memungkinkan kapal berputar, maka panjang maksimum kapal yang dapat berlayar lewat alur pelayaran ini adalah 65 meter, yaitu kapal-kapal dengan ukuran berat rata-rata 1.000 ton. Akan tetapi untuk keselamatan pelayaran, maka berat tonase kapal yang diperkenankan masuk pelabuhan Pekanbaru dibatasi sampai 750 ton. Adapun jarak dari ambang sampai ke Pekanbaru adalah lebih kurang 170 km. Dari Pekanbaru ke Kuala Tapung, sejauh 30 km dapat dilayari kapal dengan ukuran 500 ton. Dari Kuala Tapung ke hulu Sungai Tapung Kanan sampai Kota Batak, dapat dilayari dengan kapal ukuran 50 ton.

Dari Teluk Rimba atau Kuala Mandau, yaitu pertemuan antara sungai Mandau – sungai Siak ke arah hulu sungai Mandau sejauh 30 km kedalaman sungainya berkisar antara 8 – 16 meter, akan tetapi lebarnya hanya antara 30 – 40 meter. Sungai ini dapat dilayari dengan kapal sampai ukuran 500 ton, sebaiknya yang memiliki kedalaman lunas sampai dalam, misalnya 6 meter, tetapi dengan ukuran yang tidak terlalu panjang.

Sungai Indragiri mempunyai ukuran yang cukup lebar, akan tetapi tidak begitu dalam, terutama mulai dari Kuala Cinaku, ke arah hulu. Sungai ini terutama baik untuk pelayaran waktu musim penghujan, karena sungainya banjir dan dalam, waktu itu. Dari Tembilihan sampai ke Kuala Cinaku, sepanjang jarak 71 km dapat dilayari dengan kapal-kapal ukuran 1.000 ton waktu air penuh. Dari Kuala Cinaku sampai Tanjung Putus, Rengat, sepanjang 40 km hanya dapat dilayari dengan kapal-kapal ukuran 500 – 600 ton. Jarak dari ambang sampai Tanjung Putus adalah lebih kurang 177 km. Dari Rengat ke arah hulu masih dapat dilayari kapal, tetapi hanya pada musim penghujan. Berhubung terdapat tempat-tempat yang dangkal, di antaranya di Tanjung Putus, Kampung Tambak, Pulau Gajah, Rengat, Kampung Patalongan, Patanah, Peranap dan Cerenti maka perlu dilakukan pengerukan-pengerukan.

Dalam rangka integrasi antara sistem jaringan perhubungan darat yang telah ada, maka perlu dibangun terminal atau dermaga-dermaga yang memadai untuk maksud itu, yaitu pada setiap titik pertemuan antara kedua sistem tersebut.

Lokasi-lokasi tersebut adalah :

- a) Pekanbaru, untuk menghubungkan sistem perhubungan dari Daerah Pembangunan (DP) DP-1 dengan alur pelayaran Pekanbaru Siak – Sungai Apit – Selat Panjang atau Sungai Pakning – Bengkalis.
- b) Buatan, untuk menghubungkan sistem perhubungan darat dari SWP-1 dan SWP-16 dengan alur pelayaran tersebut di atas.
- c) Sungai Rengau, atau Ujung Tanjung, untuk menghubungkan SWP-4 dan 5 dengan alur pelayaran ke Bagan Siapi-api.
- d) Teratak Buluh, untuk menghubungkan sistem perhubungan darat di DP-1 dengan SWP-7.
- e) Rengat, untuk menghubungkan sistem jaringan jalan Teluk Kuantan – Rengat dengan alur pelayaran Sungai Indragiri.

Sistem jaringan perhubungan laut, fungsi utama pembinaan sistem jaringan perhubungan laut adalah untuk mengembangkan dan menenun ikatan-ikatan ekonomi dan sosial antar daerah dalam DP-III. Pelaksanaan fisik tahap pertama adalah pembangunan dermaga-dermaga untuk masing-masing sub-pusat wilayah. Tabel IV.20 mengemukakan nama-nama sub sentra wilayah dalam daerah pembangunan III.

**Tabel IV.20. Nama-nama sub pusat Wilayah Daerah Pembangunan III.**

No.	K e c a m a t a n	Sub Pusat Wilayah
1.	Bintan Selatan	Tanjung Pinang
2.	Bintan Utara	Tanjung Uban
3.	Bintan Timur	K i j a n g
4.	K u n d u r	Tanjung Batu
5.	K a r i m u n	Tanjung Balai
6.	Kuala Kampar	Teluk Dalam
7.	M o r o	Moro Sulit
8.	Singkep	D o b o
9.	Lingga	D a i k
10.	Senayang	Senayang

1	2	3
11.	Bunguran Barat	Sedanau
12.	Bunguran Timur	Ranai
13.	Midai	Midai
14.	Serasan	Serasan
15.	Siantan	Terempa
16.	Jenaja	Letung
17.	Tambelan	Tambelan
18.	Batam	Belakang Padang

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu diselenggarakan jadwal pelayaran tetap (semacam 'regular service') yang menghubungkan sub-sentra wilayah tersebut secara teratur.

Sesuai dengan tujuan kedua daripada Pelita II, yaitu untuk meletakkan landasan yang kuat untuk tahap-tahap pembangunan berikutnya; khususnya dalam rangka pembangunan sistem prasarana perhubungan ini, hendaknya pertimbangan biaya dan keuntungan (benefit cost ratio) pada masa ini saja, akan tetapi hendaknya pertimbangan pula pelanggaran pelayaran dengan jadwal teratur antar pulau dalam daerah kepulauan Riau, misalnya, mungkin tidak akan menguntungkan pada saat ini ditinjau secara ekonomis. Akan tetapi terdapatnya semacam 'regular liner service' tersebut akan mendorong pertumbuhan tingkat produksi yang ekonomis dari hasil bumi pulau-pulau tersebut, yang waktu ini tidak atau kurang dapat dipasarkan. Selain itu akan mendorong pula perkembangan pariwisata remaja ('youth tourism') ke pulau-pulau tersebut. Hal ini diharapkan akan dapat menumbuhkan jiwa pioner di kalangan generasi muda, untuk berani memelopori pembangunan di daerah-daerah terpencil, yang masih belum berkembang.

#### **U. SEBAB DAN LATAR BELAKANG PEMILIHAN WILAYAH PEMBANGUNAN DALAM DAERAH RIAU.**

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan Buku IV Repelita II Wilayah Pembangunan dalam Propinsi Riau terbagi

kepada 4 (empat) daerah pembangunan yang disesuaikan dengan kepentingan serta urgensi daerah tersebut terhadap situasi dan kondisi dewasa ini. Dipilihnya Daerah Pembangunan I dengan pusat Pengembangannya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar merupakan daerah yang terdekat serta perhubungannya sudah demikian lancar. Ditambah lagi kota Pekanbaru terletak di tengah-tengah antara Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) 1 yakni Pekanbaru dengan Satuan Wilayah 2 Bangkinang dan Satuan Wilayah terletak pada bagian barat dalam propinsi Riau yang sebagian besa alamnya merupakan daratan yang sangat luas sekali. Oleh karena daerah daerah tersebut sebagian besar daratan maka usaha-usaha pertanian dapat dikembangkan. Daratan merupakan tempat yang subur untuk usaha pertanian, ditambah lagi keadaan yang berpayapaya di daerah Kampar merupakan tempat yang subur bagi usaha pertanian terutama padi.

Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi Riau merupakan kota pusat pemerintahan dan untuk ini perlu dibangun kantor-kantor pemerintahan untuk kelancaran administrasi pemerintahan baik pembangunan untuk instansi pemerintah sentral maupun instansi pemerintah otonom. Demikian juga kota Pekanbaru sebagai pusat pendidikan perlu sekali adanya sarana pendidikan dari tingkat rendah sampai ke Perguruan Tinggi. Juga kota Pekanbaru dan daerah Pembangunan I dipersiapkan untuk usaha dagang. Oleh sebab itu ketiga masalah tersebut perlu mendapat perhatian untuk pembangunan daerah Riau.

Dipilihnya Daerah Pembangunan II dengan pusat pengembangannya Dumai, karena kota Dumai letaknya sangat strategis, sebagai pintu gerbang perhubungan perdagangan antara Bagan Siapi-api, Dumai, Bengkalis dan Selat Panjang, adalah Dumai. Dari Dumai hubungan ke daerah Satuan Pengembangan lainnya itu sangat mudah dan perlu dibina dengan baik. Daerah ini cocok untuk pengembangan pembangunan perdagangan. Di samping itu Dumai juga dipersiapkan untuk pembangunan perindustrian, karena fasilitas perminyakan dan bahan bakar yang mencukupi yang sangat diperlukan untuk kepentingan perindustrian.

Dipilihnya Daerah Pembangunan III, dengan pusat pengembangannya Rengat, karena Rengat terletak di tengah-tengah daerah Pembangunan III tersebut. Satuan Wilayah Pengembangan

Pembangunan tersebut yakni Tembilahan. Pulau Kijang, Rengat dan Teluk Kuantan. Daerah tersebut dipersiapkan untuk pertanian dan perkebunan. Hal ini erat hubungannya dengan keadaan tanah dan alam yang sebagian besar terdiri dari daratan dan paya-paya yang cocok untuk pertanian dan perkebunan. Daerah Indragiri Hilir dengan Proyek Pasang Surutnya telah menampakkan hasil yang nyata di bidang pertanian. Untuk daerah perkebunan Daerah Pembangunan III ini sudah semenjak dahulu dicoba dan nyatanya memang berhasil yakni daerah Indragiri Hilir dengan perkebunan kopronya. Onderneming-onderneming bangsa asing sudah semenjak dahulu beroperasi di daerah Indragiri Hulu dan Hilir itu. Oleh karena itu daerah tersebut tentu akan lebih mudah dibangun untuk usaha pembangunan pertanian dan perkebunan.

Dipilihnya pusat utama daerah Pembangunan IV Tanjung Pinang, karena sebagai ibu negeri kabupaten Kepulauan Riau daerah tersebut sudah lama dikembangkan tetapi karena sebagian besar kabupaten Kepulauan Riau terdiri dari lautan dan pulau-pulau yang dilingkungi lautan maka untuk pengembangan kota Tanjung Pinang sebagai pusat pemerintahan dalam daerah Riau sulit terpenuhi. Faktor inilah salah satu sebabnya maka ibukota Propinsi Riau dipindahkan dari kota Tanjung Pinang ke kota Pekanbaru, pada tahun 1958.

Akan tetapi daerah-daerah yang terpecah-pecah di pelbagai pulau tersebut dapat dikembangkan untuk usaha perdagangan dan perindustrian. Tanjung Pinang terletak di tengah-tengah dari 6 satuan Wilayah Pengembangan Pembangunan yaitu Tanjung Pinang, Tanjung Batu, Tarempa, Sedanau, Tambelan dan Dabo Singkep. Daerah Kepulauan Riau banyak menghasilkan hasil tambang seperti timah, bauksit, dan sebagainya yang sudah diolah semenjak dahulu. Oleh sebab itu pengembangan industri-industri dapat diharapkan dari daerah Pembangunan IV ini.

Kalau kita tinjau tentang wilayah-wilayah Pembangunan di daerah Riau ini, kita akan dihadapkan kepada dua masalah yakni :

1. Cocokkah Daerah Pembangunan tersebut pada saat sekarang ini?

2. Bagaimana sebaiknya seandainya wilayah-wilayah Pembangunan tersebut kurang cocok dengan keadaan sekarang ini.

Menurut peninjauan kami sektor-sektor Wilayah Pembangunan tersebut sudah mencakup segala aspek kehidupan masyarakat Riau akan tetapi ada beberapa faktor yang perlu kami ketengahkan di sini tentang wilayah-wilayah Pembangunan tersebut. Untuk memudahkan kita, baiklah kami uraikan menurut daerah Pembangunannya.

I. Daerah Pembangunan I, dengan sentral pembangunan Pekanbaru, dipersiapkan untuk usaha-usaha pertanian, pusat pemerintahan, pendidikan dan perdagangan. Memang keempat sektor itu perlu sekali dikembangkan di daerah Pembangunan I, mengingat daerah tersebut pusat pemerintahan, keadaan tanahnya yang cocok untuk pertanian. Demikian juga pendidikan dan perdagangan. Kami juga mengusulkan agar pembangunan perindustrian juga ditingkatkan dalam Daerah Pembangunan ini.

II. Daerah Pembangunan II, dengan pusat pengembangannya Dumai dipersiapkan untuk kegiatan perindustrian dan perdagangan. Secara khusus kami belum melihat pembangunan yang bertalian dengan perikanan. Sebaiknya untuk daerah Pembangunan II ini dipentingkan khusus tentang masalah perikanan ini, seperti di Bagan Siapi-api, Selat Panjang dan Bengkalis. Hal ini juga mencakup cara-cara penangkapan ikan pengawetannya yang erat sekali hubungannya dengan masalah pemasarannya (sektor perdagangan).

III. Daerah Pembangunan III, dengan pusat pengembangannya Rengat. Menurut hemat kami sebaiknya pusat pengembangannya ini dipindahkan ke Air Molek. Disebabkan Air Molek dapat dikembangkan karena tanahnya yang luas dan lebih tinggi dari Rengat. Kota Rengat sebaiknya dibangun untuk pelabuhan saja disebabkan daerahnya terlalu rendah dan berpaya-paya. Apabila musim penghujan kebanjiran. Dan untuk turunnya air banjir itu (surutnya) memerlukan waktu yang lama. Berbeda dengan Air Molek yang daratannya cukup luas dan dapat di-

kembangkan sampai ke Kecamatan Peranap. Satu hal lagi yang menguntungkan kalau sentral pembangunan itu dipindahkan ke Air Molek disebabkan dekatnya hubungan dengan PTSI. Jadi daerah Pembangunan III tidak hanya dipersiapkan untuk pertanian dan perkebunan saja, tetapi juga perindustriannya. Lalu lintas udara jauh lebih mudah dengan Air Molek dari Rengat disebabkan lapangan udara Jepara lebih dekat ke Air Molek.

IV. Daerah Pembangunan IV, dengan pusat pengembangannya Tanjung Pinang, dengan dipersiapkan untuk pembangunan perdagangan dan perindustrian perlu dipikirkan lagi dengan unsur lainnya. Untuk daerah kepulauan Riau saat sekarang sangat subur usaha penanaman cengkeh, seperti Pulau Tujuh, Tarempa, Midai dan lain-lain. Malah pemerintah melalui BUUD dan KUD telah memberikan kredit yang cukup besar untuk penanaman cengkeh tersebut. Sebaiknya untuk daerah Kepulauan Riau pembangunan sektor pertanian perlu sekali ditambahkan. Hal ini terbukti bahwa daerah Pembangunan III tersebut juga dapat dikembangkan untuk usaha pertanian.

—oOo—

## DAFTAR INFORMAN

1. H. Nahar Effendi BA, staf ahli pada Kantor Gubernur KDH Tingkat I Riau.
2. Mukadi Hadiwidjojo, Kepala Kantor Sensus dan Statistik Daerah Tingkat I Propinsi Riau.
3. Drs. S. Subagyo, Staf Bappeda Daerah Tingkat I Propinsi Riau.
4. Drs. Roesli Idar, Kepala Direktorat Pemerintahan Daerah Tingkat I Propinsi Riau.
5. Drs. Riva'i Rachman, Ketua Bappeda Daerah Tingkat I Propinsi Riau.
6. Drs. Rustam S. Abrus, Sekwilda Tingkat II Kabupaten Bengkalis.
7. Drs. Mohd. Thaher, Kepala Personalia Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau.
8. M. Taharuddin BA, Kepala Sekretariat Bappeda Tingkat I Propinsi Riau.
9. Kamaruddin BA, Staf Direktorat Pemerintahan Kantor Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Riau, Pekanbaru.

—oOo—

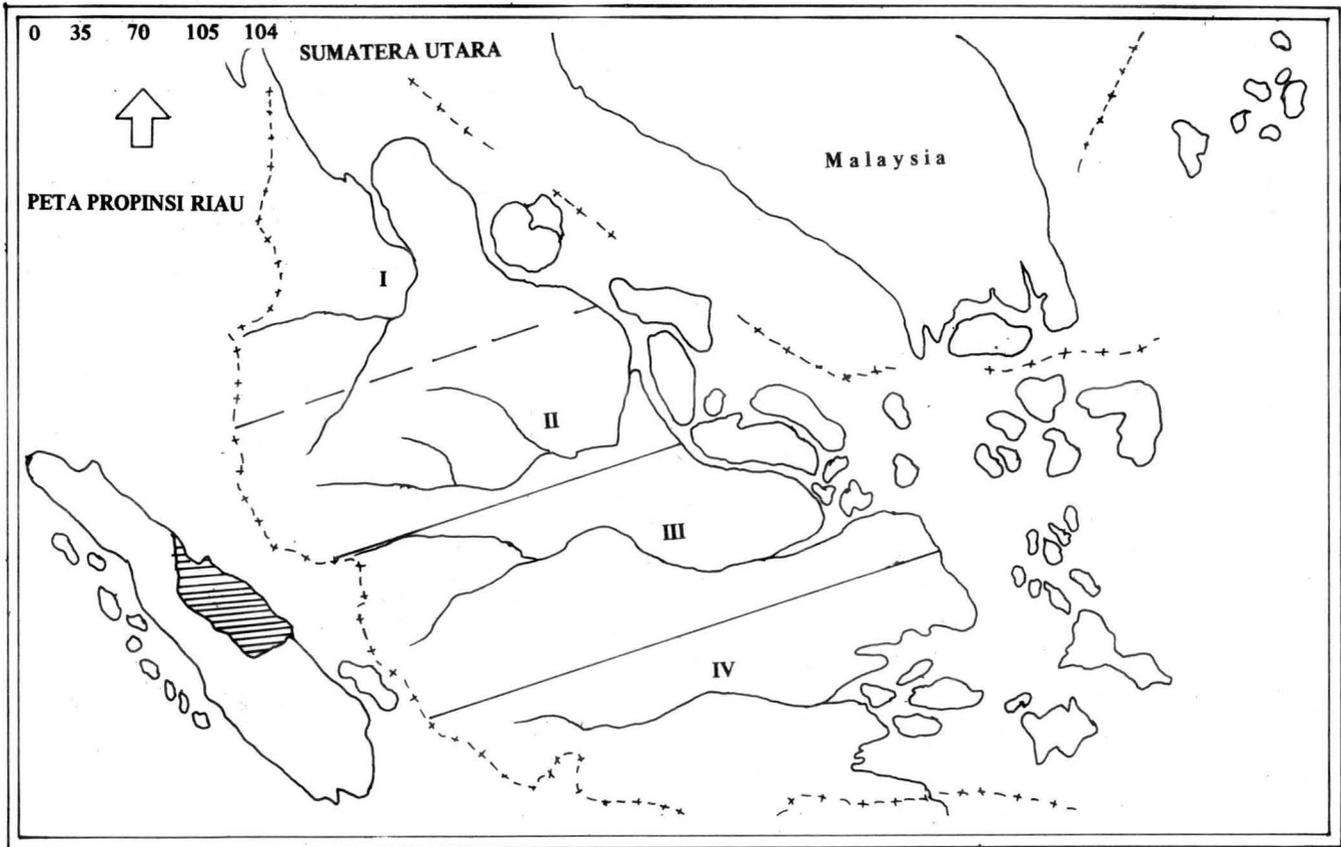
## DAFTAR BACAAN

1. Amir Machmud, *Sambutan pada Seminar Perkotaan II*, yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Perkotaan Indonesia Ditjen Puod Depdagri bekerjasama dengan LPP-ITB Ditjen Bina Marga PUTL dan BKS-BKS Jakarta dari tanggal 28 s/d 30 Juni 1977.
2. Aripin, Aldian Dalimunte, "*Selayang Pandang Mengenai Keimigrasian di Indonesia*", Alumni I Akademi Imigrasi Jakarta, 1964.
3. *Buku IV Repelita II*.
4. *Buku Rancangan Pembangunan Lima Tahun Kedua, 1974/1975 – 1978/1979* Propinsi Riau Jilid I dan II.
5. *Buku Pengenalan Potensi dan Tata Guna Tanah dalam rangka Inventarisasi Hutan Propinsi Riau*. Laporan No. 65 tahun 1969, terbitan : Direktorat Inventarisasi dan Perencanaan Kehutanan (Direktorat Jenderal Kehutanan).
6. *Buku Monografi Daerah Propinsi Riau : Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Riau*.
7. *Buku Riau pada tahun pertama Pelita I* Kuliah Umum Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau di muka Siswa SESKAU dalam rangka study tour ke darah Riau, 1 Oktober 1969. Terbitan : Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Riau.
8. *Buku Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua* Propinsi Riau tahun 1969 – 1973. Terbitan : Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Riau.
9. *Buku Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua* Propinsi Riau tahun 1974/1975 – 1978/1979. Terbitan : Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Riau.

10. Bappeda Dati I Riau, *Data Dasar Daerah Tingkat I Riau*, Pekanbaru, 1976.
11. Biro Pusat Statistik, *Survey Ekonomi Perikanan Laut Propinsi Riau*, Pekanbaru, 1976.
12. Dinas Pertanian Rakyat Daerah Tingkat I Riau, *Monografi Daerah Tingkat I Riau*, Pekanbaru, 1976.
13. Data Dasar Daerah Tingkat I Riau, *Bappeda Dati I Riau*, 1976.
14. Hamidy, UU, "*Sosiolinguistik Dialek Melayu Riau*", hasil/laporan penelitian, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.
15. *Hasil Penelitian Daerah Propinsi Riau*, Universitas Riau, 1973.
16. Indikator Ekonomi, *Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau*, Januari – Mei 1972.
17. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Riau, *Laporan Tahunan 1976*, Pekanbaru 1976.
18. K.N.P.I. Dati I Riau, *Peningkatan Taraf Hidup Nelayan Dalam Pengembangan Desa Pantai Daerah Riau*, Pekanbaru, 1976.
19. Nyoman Westa, Drs. *Peranan Perhubungan Laut Dalam Pelaksanaan Ekspor* (Paper), Pekanbaru, 1976.
20. Nurdin, Harto, "*Sketsa Demografi Propinsi Riau*", Warta Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 10 Oktober 1976.
21. Penduduk Riau Sensus Penduduk 1971, *Biro Pusat Statistik*, Jakarta, 1974.

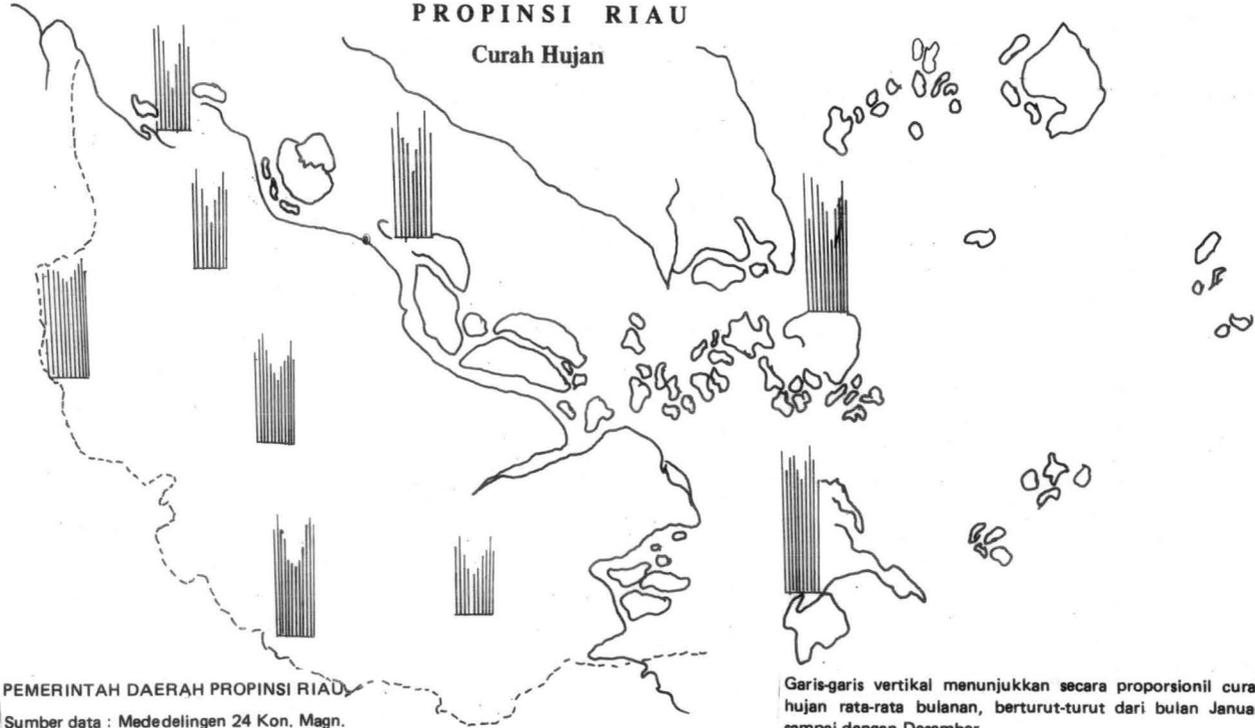
22. Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat, 15 Agustus 1974, Departemen Penerangan Republik Indonesia.
23. *Riau*, Pemerintah Daerah Tingkat I Riau.
24. *Riau Dalam Angka (In Figures) 1975*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
25. Suryadi, A. *Pembangunan Masyarakat Desa*, Penerbit : Alumni, Bandung, 1975.
26. *Statistik Universitas Riau*, 1976.
27. Ulasan Singkat Sensus Penduduk 1971 Propinsi Riau, *Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Riau*, 1973.
28. Wibisono, Ir. A., *Strategi Pembangunan Perikanan Daerah Tingkat I Riau (Paper)* Dalam Symposium Peningkatan Taraf Hidup Nelayan Dalam Rangka Pengembangan Desa Pantai, K.N.P.I. Pekanbaru, 1976.

—oOo—



# PROPINSI RIAU

## Curah Hujan



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI RIAU

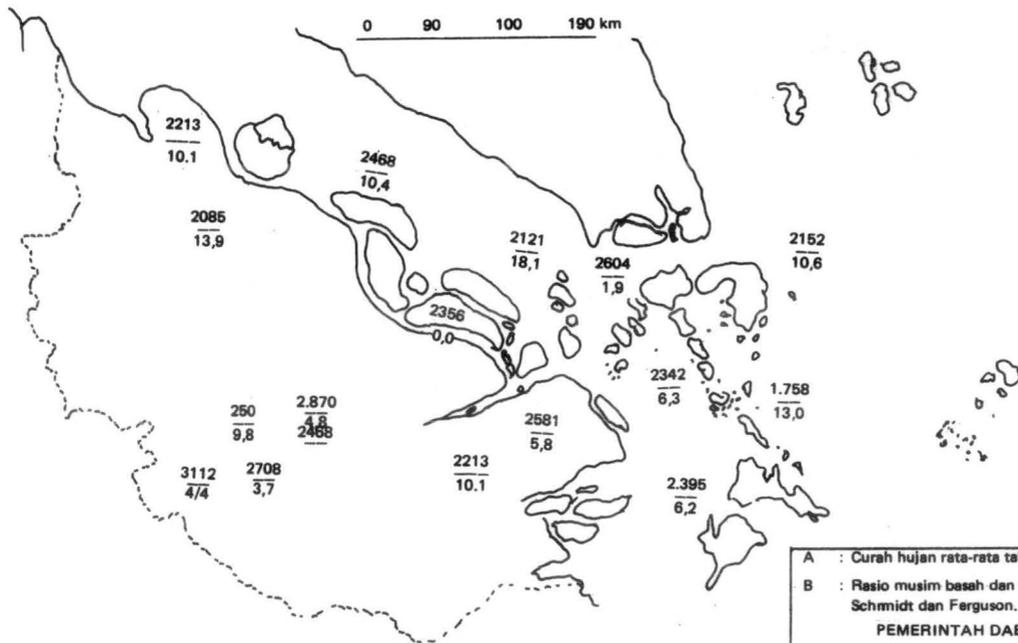
Sumber data : Mededelingen 24 Kon. Magn.  
Meteor Cbs.

Garis-garis vertikal menunjukkan secara proporsional curah hujan rata-rata bulanan, berturut-turut dari bulan Januari sampai dengan Desember.

# PROPINSI RIAU

Penyebaran Stasiun Curah Hujan

0 90 100 190 km



A : Curah hujan rata-rata tahunan dalam m.m.

B : Rasio musim basah dan musim kering (Q)  
Schmidt dan Ferguson.

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI RIAU

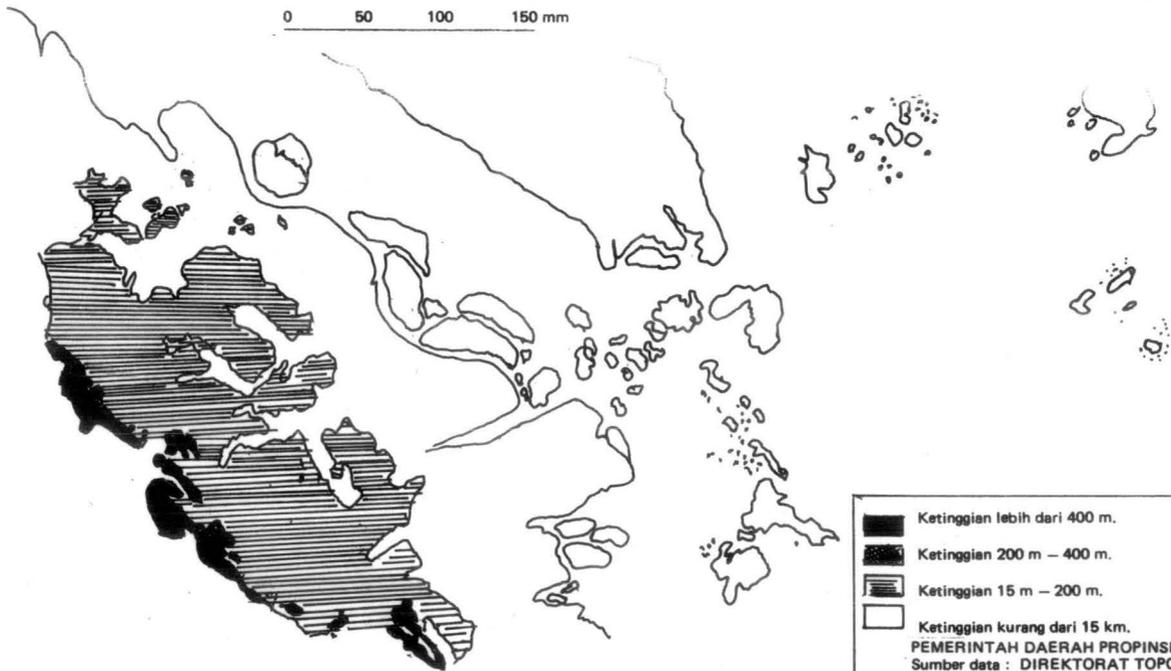
Sumber data : Verhandelingen No. 42.

Lembaga Meteorologi dan Geofisika

# PROPINSI RIAU

## Wilayah ketinggian

0 50 100 150 mm



 Ketinggian lebih dari 400 m.

 Ketinggian 200 m – 400 m.

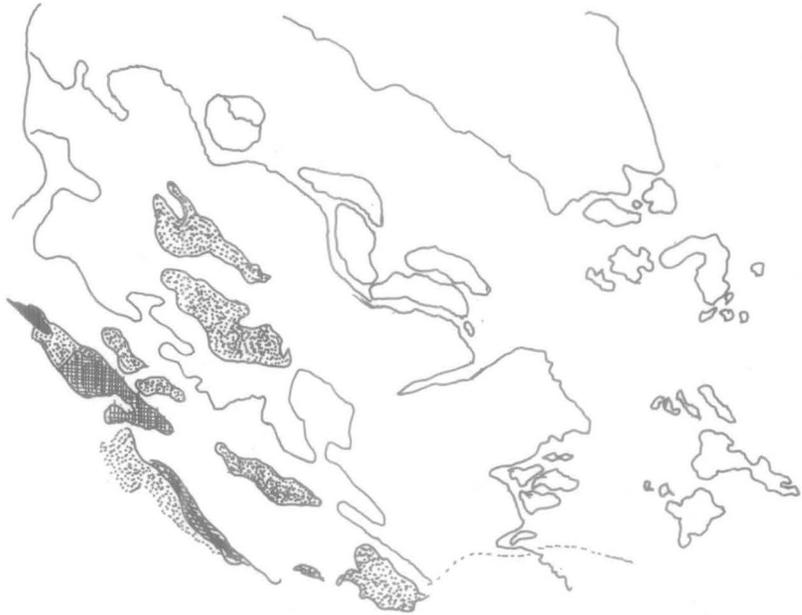
 Ketinggian 15 m – 200 m.

 Ketinggian kurang dari 15 m.

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI RIAU  
Sumber data : DIREKTORAT TOPOGRAFI  
ANGKATAN DARAT

# PROPINSI RIAU

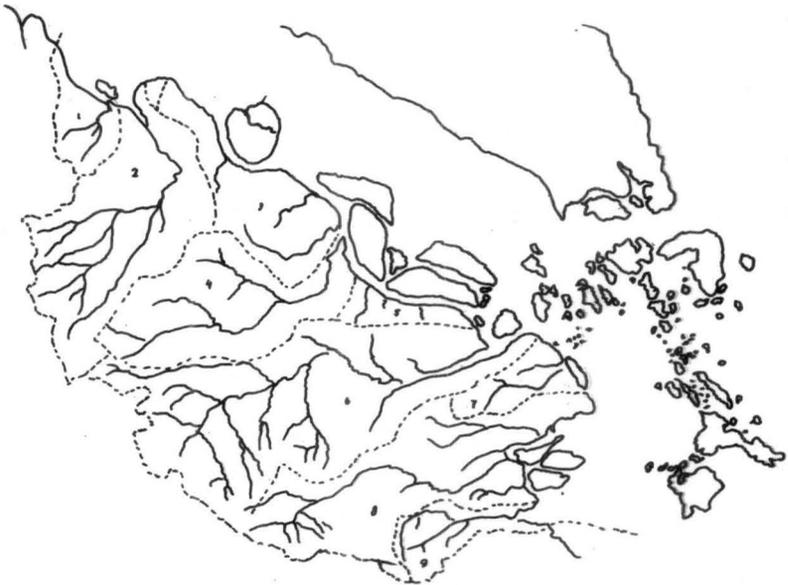
## Peta Tanah Eksplorasi



NOMOR	SIMBOL	SATUAN-TANAH	BAHAN INDUK	FISIOGRAFI
= 1 OHG $\frac{P}{A}$		ORGANOSOL dan GLEI HUMUS	BAHAN INDUK	FISIOGRAFI
= 8 RYP $\frac{P}{S}$		PODSOLIK MERAH-KUNING	Bahan aluvial	Dataran
= 9 RYP $\frac{P}{A}$		LATOSOL	Bahan endapan	Dataran
= 15 L $\frac{V}{I}$		PODSOLIK MERAH-KUNING	Batuan beku	Volkan
= 17 RYP $\frac{F}{S}$		Kompleks PODSOLIK MERAH KUNING dan LITOSOL	Batuan endapan dan beku	Pegunungan lipatan
= 21 RYPL $\frac{I}{I}$		Kompleks PODSOLIK MERAH KUNING LATOSOL dan LITOSOL	Batuan beku	Intrusi
= 22 PAY/P/L $\frac{B}{I/S/M}$		LITOSOL	Batuan beku, endapan dan metamorf	Pegunungan patahan
= 23 BP/P/LI $\frac{B}{I/S/M}$		Kompleks PODSOLIK COKLAT PODSOL dan LITOSOL		

PROPINSI RIAU

Daerah Aliran Sungai



Batas daerah  
aliran sungai

Pembagian Daerah Aliran Sungai

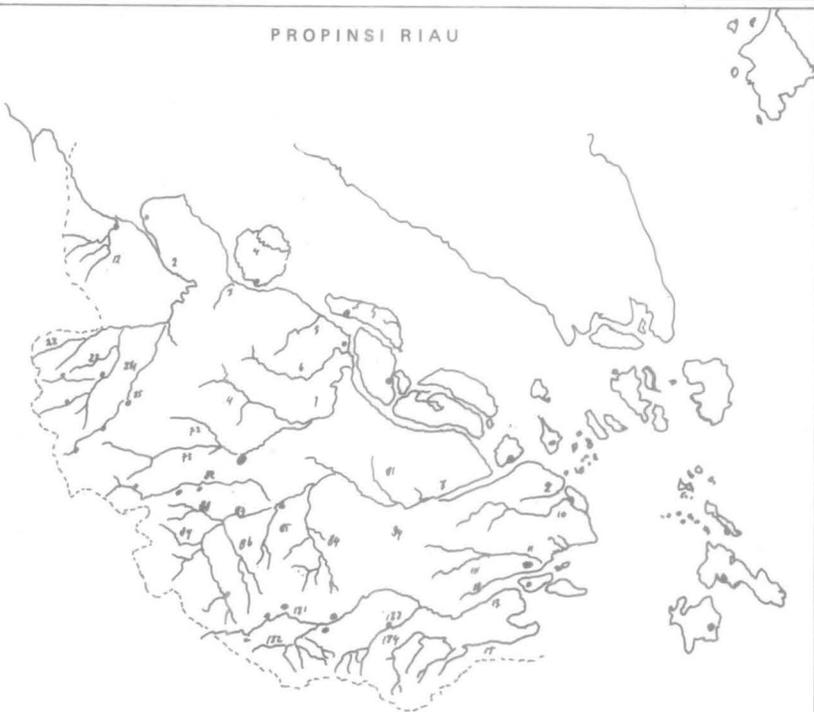
1. D.A.S. Kubu
2. D.A.S.

Pembagian Daerah Aliran Sungai

1. D.A.S. Kubu
2. D.A.S. Rokan
3. D.A.S. Siak Kecil
4. D.A.S. Siak
5. D.A.S. Rawa-Metas-Bela.
6. D.A.S. Kampar
7. D.A.S. Kateman Guntung
8. D.A.S. Kuantan
9. D.A.S. Retih

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI RIAU  
Sumber data : Dinas Kehutanan Propinsi Riau

PROPINSI RIAU

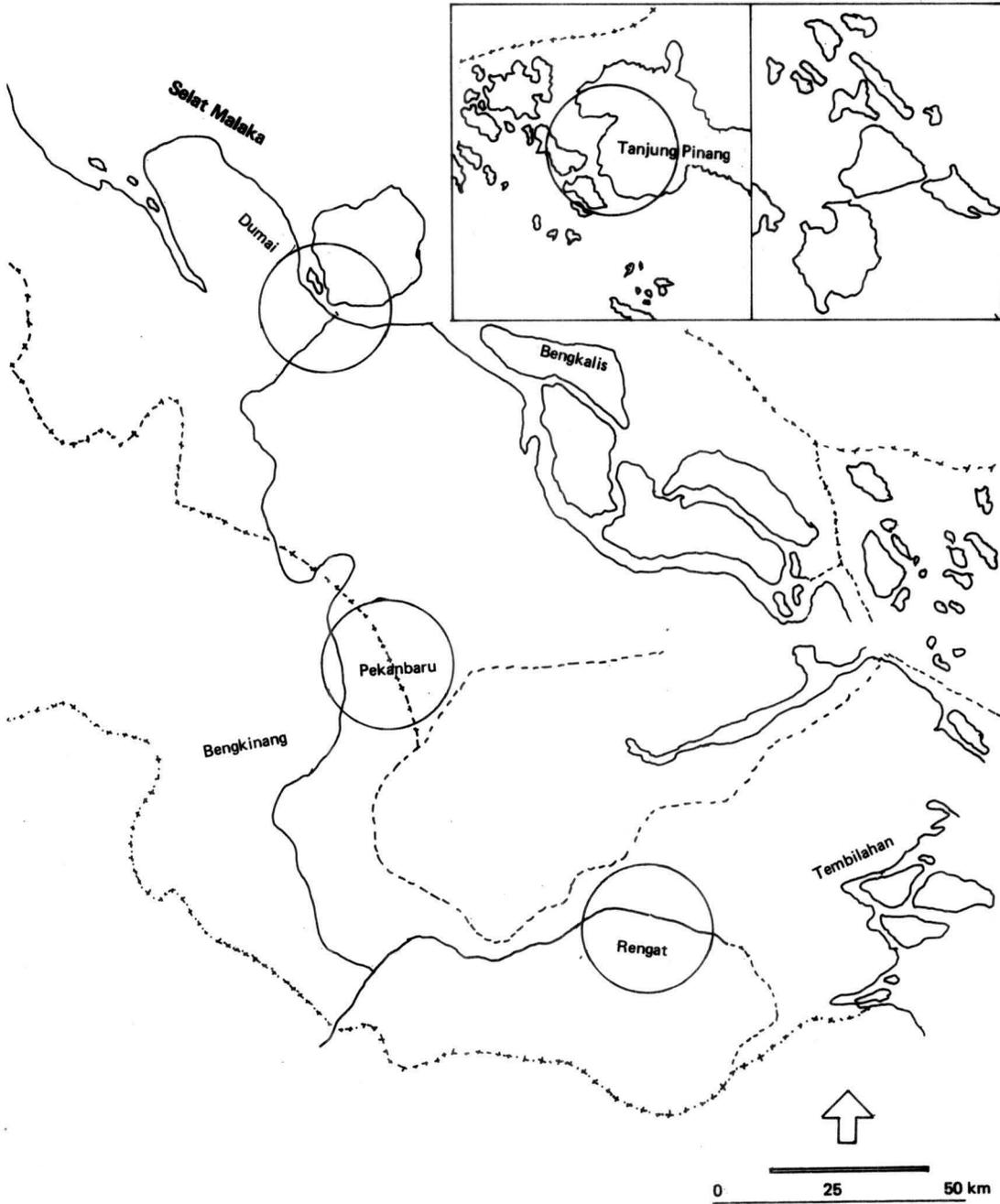


NAMA - NAMA SUNGAI

- |                       |                      |                     |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. S. Kubu            | 7. S. Siak           | 8.10 S. Simpangi    |
| 1.1. S. Simpang Kanan | 7.1. S. Mandau       | 9. S. Guntung       |
| 1.2. S. Rantau Buluh  | 7.2. S. Tapung Kanan | 10. S. Kateman      |
| 2. S. Rokan           | 7.3. S. Tapung Kiri  | 11. S. Gaung        |
| 2.1. B. Kumu          | 8. S. Kampar         | 11.1. S. Anak Serka |
| 2.2. S. Mahato        | 8.1. S. Pelalawan    | 12. B. Tuaka        |
| 2.3. Air Hitam        | 8.2. S. Kampar Kanan | 13. S. Inderagiri   |
| 2.4. B. Lubuk         | 8.3. S. Kerumutan    | 13.1 B. Kuantan     |
| 2.5. S. Rokan Kiri    | 8.4. B. Nilo         | 13.2 S. Peranap     |
| 3. S. Masjid          | 8.5. B. Segati       | 13.3 S. Cenako      |
| 4. Selat Morong       | 8.6. B. Teso         | 14. S. Enok         |
| 5. S. Bukit Batu      | 8.7. S. Kampar Kiri  | 15. S. Reteh        |
| 6. S. Siak Kecil      | 8.8. B. Lipai        | 15.1. S. Gangsal    |
|                       | 8.9. S. Sibayang     |                     |

(S = Sungai, B = Batang) PEMERINTAH DAERAH PROPINSI RIAU

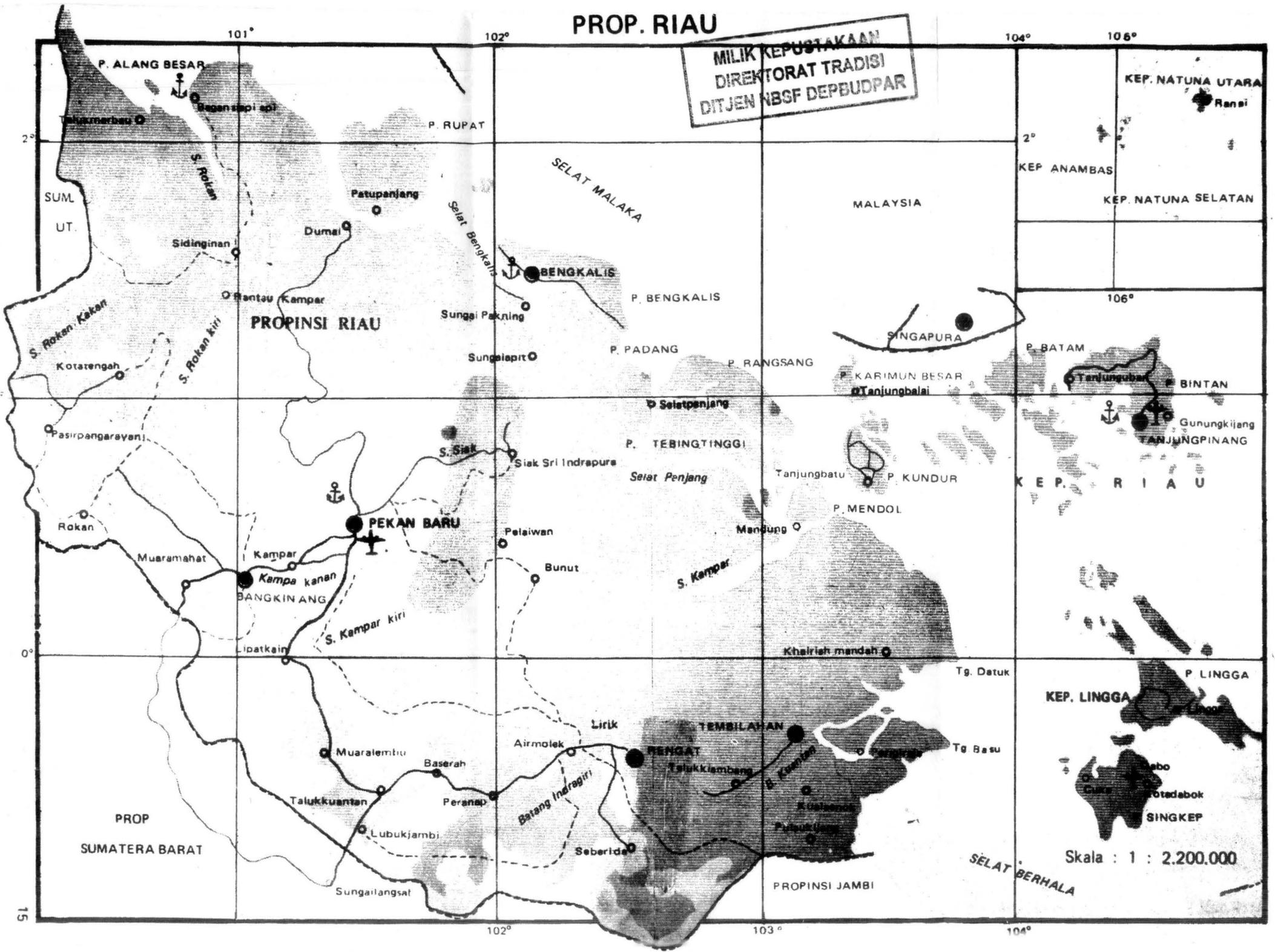
**PUSAT-PUSAT PEMBANGUNAN  
PROPINSI RIAU**



0 25 50 km

# PROP. RIAU

MILIK KEPUSTAKAAN  
DIREKTORAT TRADISI  
DITJEN NBSF DEPBUDPAR



Tidak diperdagangkan untuk umum

